



PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2020



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-4
1.5. Maksud Dan Tujuan.....	I-4
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II.....	II-1
2.2. Pencegahan dan Penanganan COVID-19	II-14
2.2.1. Jumlah Kasus COVID-19 Kota Jambi	II-14
2.2.2. Peta Sebaran COVID-19 Kota Jambi	II-16
2.2.3. Strategi Pencegahan Penyebaran Penularan COVID-19	II-17
2.2.4. Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh	II-25
2.2.5. Peningkatan Kapasitas Kesehatan.....	II-26
2.2.6. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Industri Alat Kesehatan	II-28
2.2.7. Memperkuat Jaring Pengaman Nasional (<i>Sosial Safety Net</i>).....	II-29
2.2.8. Kebijakan Non Anggaran Penanganan COVID-19 Kota Jambi.....	II-29
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2019 dan Perkiraan Tahun 2020.....	III-1

3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun Prubahan Tahun 2020.....	III-18
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-22
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-26
3.2.2.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-26
3.2.3.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-32
3.2.4.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-35
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2.	Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021.....	IV-7
4.2.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.....	IV-7
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2020.....	IV-12
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2020.....	IV-13
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2020	II-1
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Kota Jambi Tahun 2020	II-5
2.3	Recoffusing APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Pemerintah Kota Jambi	II-18
2.4	Penyediaan Sarana Fasilitas Kesehatan Dalam Rangka Pelayanan COVID-19	II-27
3.1	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019	III-5
3.2	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019 ..	III-6
3.3	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019	III-8
3.4	Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019	III-9
3.5	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019	III-11
3.6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019	III-13
3.7	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019	III-14
3.8	Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2015-2019	III-15
3.9	Inflasi Kota Jambi Tahun 2015-2019	III-15
3.10	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi Tahun 2017 s.d Perubahan Tahun 2020	III-23
3.11	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2017 s.d Perubahan Tahun 2020	III-24
3.12	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 s.d Perubahan Tahun 2020	III-25
3.13	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi	III-26

3.14	Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2018 dengan TA 2019	III-29
3.15	Perbandingan Target Realisasi Dana Perimbangan TA 2018 Dengan TA 2019.....	III-30
3.16	Perbandingan Target dan Realisasi LLPdYS TA 2018 Dengan TA 2019.....	III-31
3.17	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Jambi.....	III-34
3.18	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi .	III-35
4.1	Indikator Kinerja Utama Kota Jambi Tahun 2020	IV-5
4.2	Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi.....	IV-5
4.3	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan.....	IV-12
4.4	Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan	IV-13
5.1	Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2020.....	V-2
5.2	Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2020 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	V-12
5.3	Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2020.....	V-13

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
2.1.	Jumlah Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2020.....	II-13
2.2.	Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2020 berdasarkan Prioritas Pembangunan.....	II-13
2.3.	Tren Jumlah Kasus ODP dan PDP COVID-19 di Kota Jambi.....	II-15
2.4.	Tren Jumlah Kasus Positif COVID-19 di Kota Jambi.....	II-15
2.5.	Peta Sebaran Kasus COVID-19 di Kota Jambi.....	II-16
3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dan Perbandingannya dengan Provinsi Jambi dan Nasional	III-4
3.2.	Porsi Masing-masing Lapangan Usaha terhadap Total PDRB Kota Jambi Tahun 2019	III-10
3.3.	Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2014-2019.....	III-17



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 355 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Jambi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil hasil triwulan II Tahun Berkenaan
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V : Rencana kerja dan pendanaaan daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat tentang isi dan uraian Perubahan RKPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 29 Agustus 2020

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 29 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



BUDIDAYA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada esensinya berupaya meningkatkan kewenangan dan peranan daerah kabupaten/kota dalam mengelola potensi yang ada guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat.

Dalam menerapkan hal tersebut, diperlukan suatu *Sistem Perencanaan* guna dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang terukur maka pemerintah pada tahun 2004 mengesahkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD yang sekaligus menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah selama 6 (enam) bulan tahun anggaran berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Jambi Tahun 2020, yang didahului dengan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2020 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jambi Tahun 2005 – 2025.
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jambi Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033.
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013 -2018.
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2020.
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus;
20. Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, Dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
25. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD merupakan penjabaran RPJPD Kota Jambi 2005-2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi dokumen ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2020, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

1.5.2 Tujuan

- (1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyusun program / kegiatan yang didasarkan pada prinsip- prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018).

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 Sampai dengan Triwulan II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2020 terbagi ke dalam 5 Prioritas Pembangunan dan 34 sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan pelayanan transportasi	64,38%
			Persentase Pelayanan Perparkiran	80.74%
			Cakupan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Darat	74%
			Rasio jalan kota dalam kondisi baik	91.79%
			Persentase perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	40%
			Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	68,39%
			Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	1,07%
			Rasio Bangunan dalam kondisi baik	61,99%
			Titik genangan	19 Titik
			Ratio ketaatan RTRW	95.2%
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola	97.5%
		Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Indeks Kualitas Air	47,14
			Indeks Kualitas Udara	91.84
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,05			
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,35
			Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan		17,32
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		10,69
		Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk
		Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,46%	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	
		Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,91
			Indeks Pemberdayaan Gender	68,20
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	80%
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	61,43 %
		Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	50 %
		Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	70%
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	52%
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	88,6%
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%
		Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,25%
		Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	8,54%
			Persentase Daya Saing Produk IKM	5,35 %
			Persentase koperasi berkualitas	19,27%
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,38%
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	430.5 M
5	Good Governance	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,44
			Indeks Profesionalitas ASN	74%
			Nilai SAKIP	A
			Indeks persepsi anti Korupsi	3,69
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86%
		Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	80%
		meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%
		Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20%
		Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPd disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada tahun 2020 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPd 2020 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil

RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi perencanaan pembangunan Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2020. Hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

Secara garis besar, hasil pengisian Formulir E.79 yang disertakan secara lengkap di dalam lampiran, yaitu: Pengisian format Formulir E.79 per sasaran per Perangkat Daerah dimana program dan kegiatan Perangkat Daerah dikelompokkan menurut Perangkat Daerah nya masing-masing. Pada format ini dapat diketahui berapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai prioritas masing-masing. Selain itu juga dapat diketahui target indikatornya secara detail. Namun kelemahannya adalah untuk program/kegiatan yang sama tidak dapat diketahui besaran anggaran, realisasi serapan dana, dan rata-rata capaian kinerjanya karena program/kegiatan yang sama dapat dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang berbeda.

Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD tahun 2020 Triwulan II secara singkat dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah anggaran untuk melaksanakan 5 prioritas pembangunan di Kota Jambi mencapai Rp. 1.458.798.632.000,00 atau 0,47% dari Rp. 1.452.038.632.000,00 yang dianggarkan di RKPD dimana serapan anggaran oleh seluruh SKPD hingga Bulan Mei 2020 (triwulan II) mencapai Rp. 253.495.787.441,00 atau sekitar 17,38% terhadap APBD dan 17,46% terhadap RKPD. Capaian ini tergolong sangat rendah dibandingkan dengan APBD dan sangat rendah bila dibandingkan dengan RKPD.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II di Kota Jambi antara lain adalah :

1. Peraturan perundang-undangan tersedia.
2. Komitmen Pimpinan dan Kerjasama Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.
4. Personil mencukupi, baik kualitas maupun kuantitas.
5. Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari tim pelaksana.

6. Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal.
7. Tersedianya SOP Pelayanan.
8. Tersedia media komunikasi dan informasi.

Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II di Kota Jambi antara lain :

1. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 yang mengharuskan semua OPD melakukan penyesuaian target kinerja akibat realokasi dan refocusing, sehingga banyak terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
3. Proses pengadaan barang dan jasa seperti mundurnya jadwal lelang, gagal lelang, perubahan metode lelang, e-catalogue yang belum tayang, keterlambatan serah terima barang.
4. OPD tidak mematuhi jadwal kegiatan yang direncanakan.
5. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan.
6. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat.
7. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang narasumber, instruktur, tenaga ahli, dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh pihak lain.
8. Ketidacermatan dalam perencanaan kegiatan sehingga terdapat kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan rencana kegiatan.

Jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (39 Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung 5 prioritas pembangunan adalah sejumlah 66 program urusan dan 3 program non urusan.

Hasil ringkasan isian Formulir E.79 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Kota Jambi Tahun 2020

NO	PRIORITAS	SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	ANGGARAN RKPD 2020 (Rp)	ANGGARAN APBD 2020 (Rp)	TRIWULAN II (S.D 31 MEI) REALISASI ANGGARAN			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	REALISASI S/D TRIWULAN TERAKHIR (Rp)	TOTAL			PROGRAM	OPD	
						(Rp)	% (RKPD)	% (APBD)			% (RKPD)	% (APBD)	CAPAIAN KINERJA FISIK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	1. Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan; 2. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 3. Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan.	1. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas Kota Yang Terpadu Dan Berkelanjutan	681,700,000,000	686,400,000,000	108,236,662,003	15.88	15.77						8	DPUPR	
			2. Terkendalinya Pemanfaatan Lahan													
			Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	33,248,000,000	30,168,000,000	8,274,870,884	24.89	27.43							6	DPRKP
				10,333,000,000	10,333,000,000	2,037,222,104	19.72	19.72							4	DISDAMKAR
			Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	58,250,000,000	58,250,000,000	14,215,847,887	24.40	24.40							6	DLH
			1. Meningkatkan Fasilitas Keselamatan Lalulintas & Angkutan Perhubungan Darat. 2. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas.	17,637,000,000	17,637,000,000	5,097,246,955	28.90	28.90					6	DISHUB		
				801,168,000,000	802,788,000,000	137,861,849,833	17.21	17.17						30		

NO	PRIORITAS	SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	ANGGARAN RPKD 2020 (Rp)	ANGGARAN APBD 2020 (Rp)	TRIWULAN II (S.D 31 MEI) REALISASI ANGGARAN			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	REALISASI S/D TRIWULAN TERAKHIR (Rp)	TOTAL			PROGRAM	OPD
						(Rp)	% (RKPD)	% (APBD)			% (RKPD)	% (APBD)	CAPAIAN KINERJA FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan; 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan; 3. Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk; 4. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan; 5. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	1. Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar 2. Meningkatkan Aksebilitas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 1. Meningkatkan Jumlah Pengunjung Perpustakaan. 2. Meningkatnya Kepatuhan PD Terhadap Penyelenggaraan Kearsipan.	123,113,000,000	123,113,000,000	14,414,030,997	11.71	11.71						4	DISDIK
				201,002,615,000	201,002,615,000	21,820,036,188	10.86	10.86						6	DINKES
				7,799,000,000	7,799,000,000	1,651,791,221	21.18	21.18						4	DPPKB
				8,814,000,000	8,814,000,000	1,027,003,328	11.65	11.65						4	DISPORA
				5,592,000,000	5,592,000,000	1,095,639,613	19.59	19.59						5	DKP

NO	PRIORITAS	SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	ANGGARAN RPKD 2020 (Rp)	ANGGARAN APBD 2020 (Rp)	TRIWULAN II (S.D 31 MEI) REALISASI ANGGARAN			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	REALISASI S/D TRIWULAN TERAKHIR (Rp)	TOTAL			PROGRAM	OPD
						(Rp)	% (RKPD)	% (APBD)			% (RKPD)	% (APBD)	CAPAIAN KINERJA FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1. Meningkatkan kualitas penataan Aparatur Sipil Negara. 2. Terciptanya pelayanan kepegawaian yang akurat dan tepat waktu. 3. Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara. 4. Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi ASN.	9,193,000,000	9,193,000,000	1,881,891,942	20.47	20.47						4	BKPSDMD
				355,513,615,000	355,513,615,000	41,890,393,289	11.78	11.78						27	
3	<i>Penanggulangan Kemiskinan</i>	<i>1. Menurunkan angka PMKS; 2. Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja; 3. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil; 4. Meningkatkan Kesetaraan Gender; 5. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak;</i>	1.Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti; 2.Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial	5,835,000,000	5,835,000,000	1,690,019,851	28.96	28.96						4	DINSOS

NO	PRIORITAS	SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	ANGGARAN RPKD 2020 (Rp)	ANGGARAN APBD 2020 (Rp)	TRIWULAN II (S.D 31 MEI) REALISASI ANGGARAN			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	REALISASI S/D TRIWULAN TERAKHIR (Rp)	TOTAL			PROGRAM	OPD
						(Rp)	% (RKPD)	% (APBD)			% (RKPD)	% (APBD)	CAPAIAN KINERJA FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 7. Meningkatkan Ketahanan Pangan; 8. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	1. Meningkatkan produktivitas dan penempatan tenaga kerja, serta hubungan industrial yang harmonis. 2. Meningkatkan kualitas koperasi dan usaha kecil menengah. 3. Meningkatkan kualitas koperasi dan usaha kecil menengah.	5,197,000,000	5,197,000,000	1,204,448,657	23.18	23.18						6	DTKK, UKM
			1. Tercapainya Persentase Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.2. Tercapainya Standar Kota Layak Anak.3. Meningkatnya Usaha Ekonomi Perempuan.4. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan.	9,167,000,000	9,167,000,000	1,773,228,444	19.34	19.34						5	DPMPA
			1. Terpenuhinya ketersediaan pangan. 2. Meningkatnya keamanan pangan.	8,151,000,000	8,151,000,000	1,845,310,451	22.64	22.64						5	DPKP

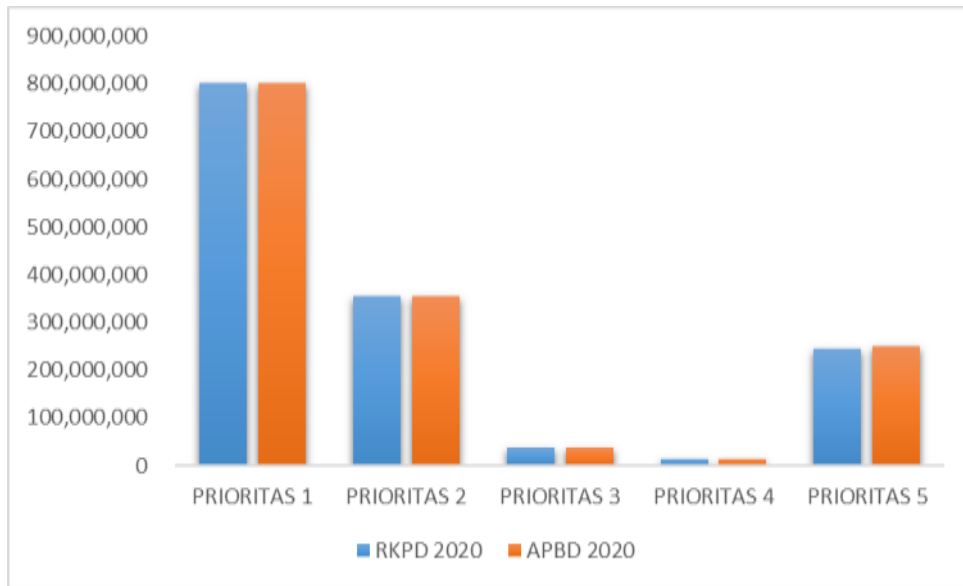
NO	PRIORITAS	SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	ANGGARAN RPKD 2020 (Rp)	ANGGARAN APBD 2020 (Rp)	TRIWULAN II (S.D 31 MEI) REALISASI ANGGARAN			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	REALISASI S/D TRIWULAN TERAKHIR (Rp)	TOTAL			PROGRAM	OPD
						(Rp)	% (RKPD)	% (APBD)			% (RKPD)	% (APBD)	CAPAIAN KINERJA FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1. Meningkatkan pengawasan, pembinaan, penataan sarana dan prasarana perdagangan. 2. Meningkatkan Pertumbuhan dan Kemitraan Industri Kecil dan Menengah.	9,277,385,000	9,277,385,000	1,962,233,847	21.15	21.15						5	DPP
				37,627,385,000	37,627,385,000	8,475,241,250	22.52	22.52						25	
4	<i>Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah</i>	<i>1. Meningkatkan Realisasi Investasi; 2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB.</i>	1. Meningkatkan Realisasi Investasi. 2. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan Non Perizinan.	4,541,000,000	4,541,000,000	1,149,708,965	25.32	25.32						5	DPMPTSP
			1. Meningkatkan jumlah penyelenggaraan even seni budaya. 2. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi dari sektor Pariwisata.	8,832,000,000	8,832,000,000	965,176,526	10.93	10.93						5	DPK
				13,373,000,000	13,373,000,000	2,114,885,491	15.81	15.81						10	

NO	PRIORITAS	SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	ANGGARAN RPKD 2020 (Rp)	ANGGARAN APBD 2020 (Rp)	TRIWULAN II (S.D 31 MEI) REALISASI ANGGARAN			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	REALISASI S/D TRIWULAN TERAKHIR (Rp)	TOTAL			PROGRAM	OPD
						(Rp)	% (RKPD)	% (APBD)			% (RKPD)	% (APBD)	CAPAIAN KINERJA FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	<i>Good Governance</i>	<p>1. Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL;</p> <p>2. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK;</p> <p>3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);</p> <p>4. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat;</p> <p>5. Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan.</p> <p>6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</p>	<p>1. Menurunkan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap PERDA Dan PERWAL</p> <p>2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan</p>	7,813,000,000	7,813,000,000	2,570,794,510	32.90	32.90						5	SATPOL PP
			Meningkatnya Kualitas dan jangkauan layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,170,000,000	8,170,000,000	2,606,273,497	31.90	31.90						4	DKPS
			Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika Yang Berkualitas	6,500,000,000	6,500,000,000	2,026,430,746	31.18	31.18						6	DISKOMINFO
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	4,890,000,000	4,890,000,000	1,334,423,982	27.29	27.29						4	INSPEKTORAT
			<p>1. Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan</p> <p>2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan</p> <p>3. Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah</p>	6,782,000,000	6,782,000,000	1,261,973,593	18.61	18.61						6	BAPPEDA

NO	PRIORITAS	SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	ANGGARAN RKPD 2020 (Rp)	ANGGARAN APBD 2020 (Rp)	TRIWULAN II (S.D 31 MEI) REALISASI ANGGARAN			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	REALISASI S/D TRIWULAN TERAKHIR (Rp)	TOTAL			PROGRAM	OPD
						(Rp)	% (RKPD)	% (APBD)			% (RKPD)	% (APBD)	CAPAIAN KINERJA FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10,367,632,000	13,367,632,000	2,756,037,420	26.58	20.62						4	BPKAD
			Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	7,818,000,000	7,818,000,000	1,899,754,743	24.30	24.30						4	BPPRD
			1. Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan bidang pemerintahan, Humas, Hukum dan Kerjasama.2. Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ekonomi, administrasi pembangunan dan kesra.3. Meningkatkan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang administrasi umum, kelembagaan dan pelayanan publik.	54,160,000,000	54,700,000,000	20,187,764,994	37.27	36.91						13	SETDA

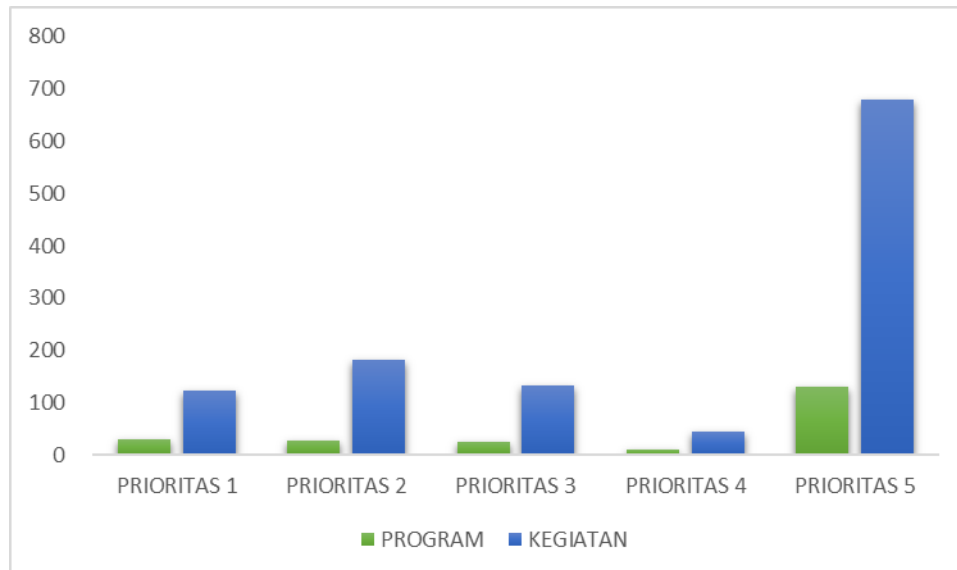
NO	PRIORITAS	SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	ANGGARAN RPKD 2020 (Rp)	ANGGARAN APBD 2020 (Rp)	TRIWULAN II (S.D 31 MEI) REALISASI ANGGARAN			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	REALISASI S/D TRIWULAN TERAKHIR (Rp)	TOTAL			PROGRAM	OPD
						(Rp)	% (RKPD)	% (APBD)			% (RKPD)	% (APBD)	CAPAIAN KINERJA FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi DPRD	44,134,000,000	45,734,000,000	10,732,578,211	24.32	23.47						4	SET. DPRD
			1. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik. 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	90,887,000,000	90,887,000,000	17,150,416,069	18.87	18.87						76	KECAMATAN
			Meningkatkan Pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinnekaan dalam kehidupan masyarakat	2,835,000,000	2,835,000,000	626,969,813	22.12	22.12						5	BKBP
				244,356,632,000	249,496,632,000	63,153,417,578	25.84	25.31						131	
		TOTAL		1,452,038,632,000	1,458,798,632,000	253,495,787,441	17.46	17.38						223	

Secara grafis, gambaran masing masing prioritas diperbandingkan dengan dukungan pendanaannya adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1
Jumlah Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2020 (Rp.000)

Secara grafis pula, dukungan masing masing program terhadap prioritas pembangunan tahun 2020 adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.2
Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2020 berdasarkan Prioritas Pembangunan

2.2. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19

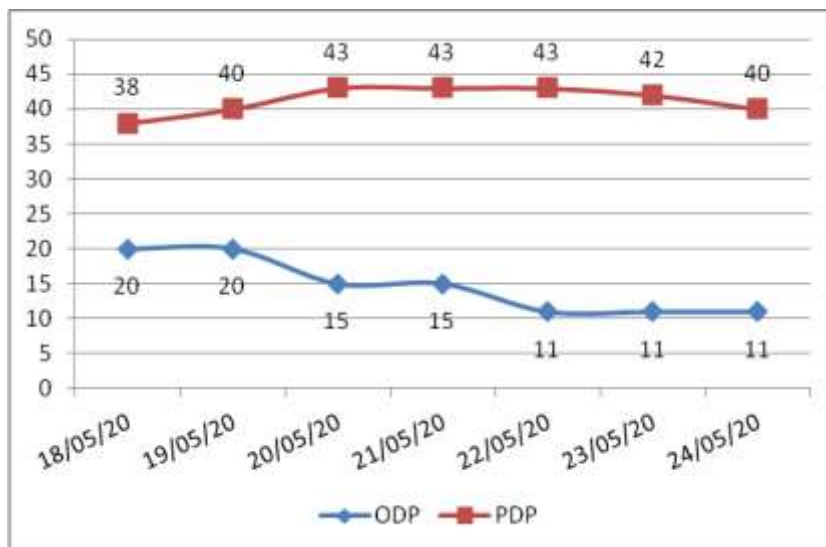
Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas batas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam waktu singkat.

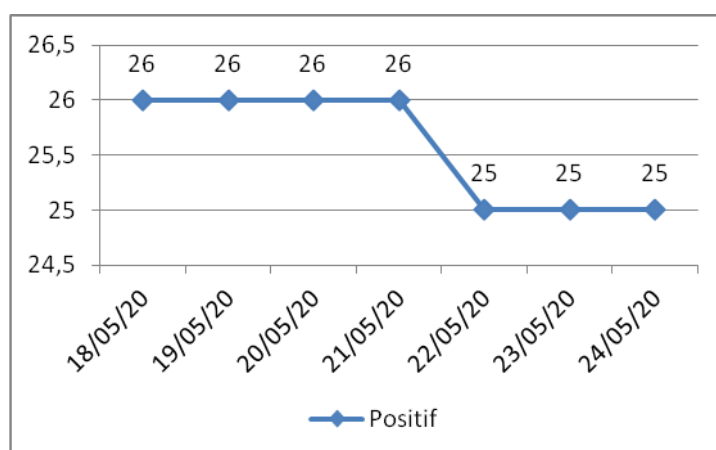
Dalam memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dibidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Jambi terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Jumlah Rumah sakit yang ada di Kota Jambi sebanyak 17 unit dan puskesmas sebanyak 20 unit.

2.2.1. Jumlah Kasus Covid-19 Kota Jambi

Kasus Covid-19 di Kota Jambi menyebar hampir di seluruh Kecamatan di Kota Jambi, hingga tanggal 24 Mei 2020 kasus Covid-19 di Kota Jambi terdiri dari positif 25 kasus, ODP 11 kasus dan PDP 40 kasus.



Gambar 2.3
Tren Jumlah Kasus ODP dan PDP Covid-19 di Kota Jambi

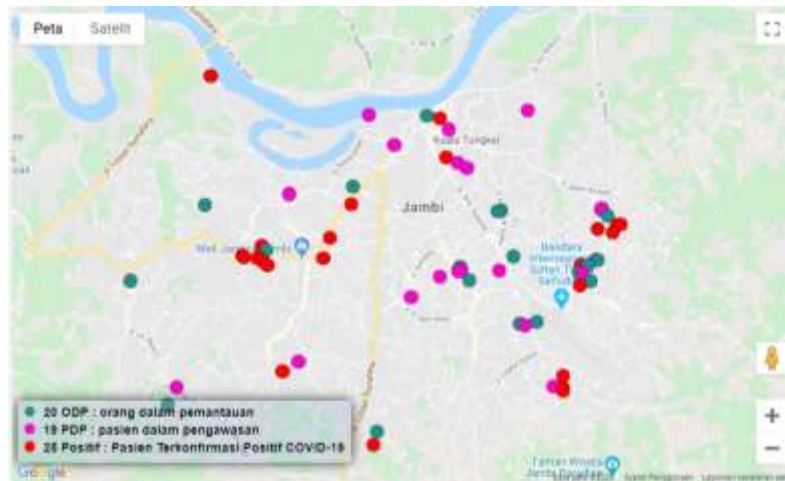


Gambar 2.4
Tren Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Jambi

Merujuk pada grafik di atas, dapat dilihat ada perkembangan kasus dalam kurun waktu seminggu terakhir (18 Mei s/d 24 Mei 2020) di Kota Jambi. Kasus ODP Covid-19 di Kota Jambi mengalami penurunan, dari 20 kasus ODP menjadi 11 kasus. Sedangkan PDP Covid-19 mengalami peningkatan dari 38 kasus PDP menjadi 40 kasus PDP dan Kasus Positif Covid-19 terdapat penurunan dari 26 kasus menjadi 25 kasus yang disebabkan telah sembuhnya 1 orang pasien positif (dari Kelurahan rawasari) di Kota Jambi.

2.2.2. Peta Sebaran Covid-19 Kota Jambi

Sebaran Kasus Covid-19 ODP dan PDP di Kota Jambi hampir merata diseluruh Kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi per tanggal 24 Mei 2020. Sebaran kasus Covid-19 dapat dilihat pada peta berikut:



Sumber. <https://covid19.jambikota.go.id/>

Gambar 2.5
Peta Sebaran Kasus Covid-19 di Kota Jambi

Pada tanggal 24 Mei 2020 jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 berjumlah 26 orang dengan 1 orang dinyatakan sembuh, yang tersebar di:

1. Kec. Paal Merah sebanyak 9 orang, dengan sebaran:
 - a. Kelurahan Ekajaya 4 orang
 - b. Kelurahan Talang Bakung 2 Orang
 - c. Kelurahan Lingkar Selatan 3 orang
2. Kec. Danau Sipin sebanyak 2 orang, dengan sebaran:
 - a. Kelurahan Sungai Putri 1 orang
 - b. Kelurahan Legok 1 orang
3. Kec. Kota Baru sebanyak 1 orang, dengan sebaran:
 - a. Kelurahan Kenali Asam Bawah 1 orang
4. Kec. Alam Barajo sebanyak 9 orang, dengan sebaran:
 - a. Kelurahan Rawasari 8 orang (berkurang 1 orang sembuh)
5. Kec. Telanaipura sebanyak 1 orang, dengan sebaran:

- a. Kelurahan Teluk Kenali 1 orang
- 6. Kec. Jelutung sebanyak 3 orang, dengan sebaran:
 - a. Kelurahan Talang Jauh 1 orang
 - b. Kelurahan Payo Lebar 2 orang
- 7. Kec. Pasar Jambi sebanyak 1 orang, dengan sebaran:
 - a. Kelurahan Orang Kayo Hitam 1 orang

2.2.3. Strategi Pencegahan Penyebaran Penularan COVID-19

1. Penyiapan Protokol

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 maka Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Gugus Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Penularan COVID-19 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 172 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Jambi, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan protokol sebagai berikut:

- a. Protokol Acara Resmi: Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan rapat dan Koordinasi baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara virtual atau menggunakan *video conference*. Pemerintah Kota Jambi Menyediakan Cuci tangan dan *Hand Sanitizer* di lingkungan pemerintah, Selain itu Pemerintah Kota Jambi juga rutin melakukan penyemprotan di perkantoran dan tempat acara untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19.
- b. Protokol Tempat Publik: Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan pembatasan di area publik dengan memberlakukan pembatasan waktu buka area publik dan mewajibkan menjaga jarak antar masyarakat di lingkungan publik. Pemerintah juga rutin melakukan penyemprotan disinfektan di area publik.
- c. Protokol BTT: Pemerintah Kota Jambi akan tetap mengambil langkah taktis dan konkrit, sebagai upaya tanggap darurat pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19, serta melindungi masyarakat Kota Jambi, baik

dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Kebijakan anggaran dilakukan Pemerintah Kota Jambi dengan *re-focussing* APBD Pemerintah Kota Jambi tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 terutama pada 3 aspek yang dipersiapkan yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan Penyediaan *social safety net/jaring* pengaman sosial.

- d. Protokol Pasar Rakyat: Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan Penyemprotan rutin di area pasar tradisional yang ada di Kota Jambi, pemerintah juga menyediakan tempat cuci tangan untuk masyarakat yang berbelanja ke pasar.
- e. Selain Protokol diatas, Pemerintah Kota Jambi juga akan tetap melakukan penyemprotan disinfektan di 11 Kecamatan di Kota Jambi. Petugas penyemprotan terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan DAMKAR Kota Jambi. Penyemprotan dilakukan dengan pengawalan 12 Petugas pengawalan yang terdiri dari Komando Distrik Militer (KODIM), Polisi, Dinas Perhubungan dan POL PP. Adapun lokus yang dilakukan penyemprotan meliputi: sekolah, rumah ibadah, pasar, fasilitas umum lingkungan perumahan serta perkantoran.
- f. Untuk menghentikan penyebaran infeksi Covid-19 terutama pada tenaga medis yang memiliki resiko tinggi tertular infeksi virus maka ditetapkan prosedur dalam pemakaian alat-alat pelindung diri (APD) pada saat merawat pasien Covid-19 PDP/ODP dengan Co morbid di ruang isolasi.

Tabel 2.3
Refocussing APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Pandemi
COVID-19 Pemerintah Kota Jambi

NO.	PRIORITAS	KEGIATAN		
		NOMENKLATUR		(Rp.)
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Penanganan Kesehatan	1	Penyediaan sarana prasarana kesehatan	17.280.643.000,00
		2	Penyediaan sarana fasilitas kesehatan	7.428.430.000,00
		3	Pemberian insentif untuk tenaga kesehatan	6.580.500.000,00
		4	Penyemprotan disinfektan	225.000.000,00
		5	Penyewaan rumah singgah	216.000.000,00
	Sub Total 1			31.730.573.000,00
2	Penanganan Dampak Ekonomi	1	Padat Karya	3.000.000.000,00
	Sub Total 2			3.000.000.000,00

NO.	PRIORITAS	KEGIATAN		
		NOMENKLATUR	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)		
(1)	(2)	(4)		
3	Penyediaan <i>social safety net</i> /jaring pengaman sosial	1	Penyediaan bantuan barang kepada masyarakat yang terdampak (20.000 KK + 10.000 KK)	18.750.000.000,00
		2	Pembayaran Insentif instansi vertikal	1.062.000.000,00
		3	Bantuan Operasional Instansi Vertikal	600.000.000,00
		4	Bantuan Operasional Kecamatan	165.000.000,00
		5	Penyediaan makan minum untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19	2.380.150.000,00
		6	Pengadaan Peralatan dan pendukung Posko	318.000.000,00
		7	Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pemkot	106.200.000,00
		8	Bantuan Pasien Corona	100.000.000,00
	Sub Total 3			23.481.350.000,00
TOTAL (Sub Total 1 + Sub Total 2 + Sub Total 3)				58.211.923.000,00

2. Sosialisasi

Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan sosialisasi baik melalui media Sosial maupun media cetak terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19 adapun beberapa edaran/Instruksi yang telah dikeluarkan antara lain:

- a. Surat Edaran Walikota Jambi No.440/497/DINKES/2020 tanggal 2 maret 2020 kepada Pemilik Swalayan, Mall, Minimarket, Hotel dan Pemilik tempat-tempat umum tentang Himbauan Penyediaan Fasilitas Cuci Tangan dengan Air Mengalir dan Sabun serta Hand Sanitizer bagi Pengunjung.
- b. Surat Edaran Walikota No. 443/498/DINKES/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Himbauan Walikota Kewaspadaan terhadap Corona Virus Diseases (Covid-19).
- c. Instruksi Walikota Jambi Nomor: 4/INS/IV/HKU/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perlindungan bagi pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di perusahaan di Kota Jambi, dimana salah satu isinya memberikan instruksi kepada pengusaha untuk menyediakan tempat cuci tangan dan peyediaan masker bagi pekerja.
- d. Instruksi Walikota Jambi Nomor: 08/INS/IV/HKU/2020 tanggal 23 April tentang Penggunaan masker untuk mencegah penularan Corona Virus Disease (Covid-19).

3. Identifikasi

Dalam melakukan identifikasi petugas medis di semua level dan semua tipe institusi medis harus segera mengisolasi dan menangani setiap kasus terduga Covid-19 diruangan terpisah (*single room*). Orang yang masih dianggap sebagai kasus terduga perlu melapor secara daring dalam dua jam. Harus dilakukan pengambilan spesimen dan tes asam nukleat nCoV-2019. Pasien suspek (*suspected patients*) harus dipindahkan ke rumah sakit rujukan secepatnya. Orang yang kontak dekat dengan pasien COVID-19 atau bahkan mereka dengan hasil positif untuk tes patogen pernapasan umum, dianjurkan untuk nantinya melakukan deteksi patogenik nCoV- 2019.

4. Testing

Untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Kota Jambi, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Jambi akan tetap melakukan rappid test terhadap orang dalam pengawasan di Kota Jambi. Sampai saat ini (Mei 2020) Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan rappid test sebanyak 1400 kali, baik itu hasil *tracking* dari jamaah tabligh akbar maupun hasil *tracking* pendatang lainnya.

5. Tracking

Kegiatan pengawasan dan penjagaan pos di 6 pintu masuk dan Keluar Kota Jambi juga dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Enam pos yang dalam pengawasan yaitu PAAL 10 dijaga 20 petugas, Simpang Rimbo dijaga 18 petugas, Auduri I dijaga 18 petugas, Auduri II dijaga 15 petugas, Talang dijaga 10 petugas dan Angso duo dijaga 9 petugas. Personil yang melakukan pengawasan terdiri dari PM, KODIM, Polisi, Dinas Perhubungan, POL PP, Dinas Kesehatan dan Damkar. Kegiatan yang dilakukan antara lain: pengukuran suhu tubuh, cuci tangan dan *screening* awal pendatang. Selain itu tim Surveilans dari Dinas Kesehatan Kota Jambi juga terus melakukan pemantauan masyarakat yang berstatus ODP di Kota Jambi.

6. Karantina

Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan tindakan karantina terhadap pasien maupun masyarakat di Kota Jambi antara lain dengan cara:

- a. Melakukan karantina mandiri bagi masyarakat Kota Jambi bila ada anggota keluarga atau saudara baru berpulang dari bepergian dari luar kota atau luar negeri, dengan cara:
 - Tetap dirumah selama 14 hari, tidak pergi keluar rumah, tetap diam didalam rumah dan lakukan *social distancing*.
 - Pelaku perjalanan melaporkan kepada penanggung jawab *surveillance* di wilayah tersebut dengan melampirkan nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi.
 - Selama 14 hari perilaku perjalanan akan dipantau via telpon atau WA oleh petugas (tenaga medis tidak datang kerumah).
 - Jika gejala mengarah ke penyakit Covid-19 maka dinkes setempat akan mendatangkan “Tim Khusus” dengan menggunakan APD lengkap untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
- b. Menyiapkan ruangan khusus di Rumah Sakit Rujukan bagi pasien yang PDP maupun Positif untuk menghindari kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi kepada orang lain.

7. Social dan Physical Distancing

Dalam percepatan pencegahan penanganan Covid-19 di Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan beberapa aturan untuk mendukung kegiatan *social* dan *physical distancing* dengan tetap berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, antara lain:

- a. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Jambi telah melakukan langkah antisipasi penularan COVID-19 dengan memberlakukan pembelajaran dirumah yang dimulai 17 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dengan surat Edaran Pelaksanaan Pembelajaran di rumah melalui:
 1. Intruksi Walikota Nomor 188.5.5/1671/DINKES/2020 tanggal 22 Maret 2020

2. Intruksi Walikota Nomor 188.5.5/1672/DINKES/2020 tanggal 27 Maret 2020
3. Intruksi Walikota Nomor 188.5.5/1673/DINKES/2020 tanggal 3 April 2020
4. Instruksi Walikota Nomor 188.5.5/1674/DINKES/2020 tanggal 19 April 2020
5. Instruksi Walikota Nomor 188.5.5/1675/DINKES/2020 tanggal 3 Mei 2020
6. Surat Dinas Pendidikan Nomor 420/659/DISDIK/2020
7. Surat Dinas Pendidikan Nomor 800/740/DISDIK/2020 Tanggal 30 Maret 2020
8. Surat Dinas Pendidikan Nomor 420/777/DISDIK/2020 Tanggal 03 April 2020
9. Surat Dinas Pendidikan Nomor 420/895/DISDIK/2020 Tanggal 3 Mei 2020

Keputusan libur sekolah mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), selama di rumah kegiatan belajar mengajar (KBM) para siswa dilakukan dengan pembelajaran sistem *online*.

- b. Pemerintah Kota Jambi memberlakukan *work from home* (WFH) atau bekerja di rumah bagi ASN dan TTK, Eselon IV kebawah dengan komposisi 50% bekerja di rumah dan 50% bekerja di kantor secara bergantian sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 29 Mei 2020. Hal ini dilakukan berdasarkan:
 1. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 188.5.5/343/2020 tanggal 20 Maret 2020
 2. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor. 188.5.5/378/2020 tanggal 31 Maret 2020
 3. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 188.5.5/430/2020 tanggal 20 April 2020
 4. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor. 188.5.5/456/2020 tanggal 4 Mei 2020

5. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor. 188.5.5/486/2020 tanggal 13 Mei 2020

Mulai bulan Juni Tahun 2020 direncanakan akan kembali memberlakukan Jam Kerja seperti biasa (tanpa WFH) dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan penanganan Covid-19, sampai dengan kebijakan lagi terkait Covid-19 yang ditentukan kemudian.

- c. Sebagaimana **Instruksi Walikota Jambi No. 03/INS/2I/HKU/2020 tanggal 31 Maret 2020** Pemerintah Kota Jambi tetap memberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, dengan tujuan untuk mengurangi kegiatan masyarakat di luar rumah. Adapun petugas yang dibutuhkan untuk patroli jam malam sebanyak 320 personil. Patroli diberlakukan di 11 kecamatan di Kota Jambi dengan petugas patroli terdiri dari KODIM, Polisi, Dinas Perhubungan, POL PP, DAMKAR dan petugas dari setiap kecamatan. Pemberlakuan jam malam ini sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dan mengurangi tindak kriminal yang semakin meningkat.
- d. Dalam hal kegiatan keagamaan dengan memperhatikan **Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19**. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan keputusan:
 1. Keputusan Bersama Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 antara Pemerintah Kota Jambi dengan Ketua DPRD Kota Jambi, FORKOPIMDA, Kepala Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi, FKUB Kota Jambi, Pengurus Cabang Muhammadiyah, Pengurus Cabang NU dan DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kota Jambi, menghasilkan keputusan Ibadah atau ritual keagamaan dijalankan di rumah masing-masing untuk sementara waktu, begitu pula menunda semua kegiatan majelis taklim rutin dan tidak rutin serta peringatan hari besar keagamaan baik di tempat ibadah dan tempat lainnya dalam bentuk:
 2. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Ketua DPRD, Kejaksaan Negeri, Polisi Resort Kota, Komando Distrik Militer 0415 Batang Hari, Pengadilan Negeri, Detasemen Polisi Militer,

Kementerian Agama Kota, Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Masjid Indonesia Kota Jambi tentang Upaya atau Langkah-Langkah Pencegahan Terhadap Penyebaran Covid-19 di Kota Jambi Nomor 451/740.a/2020, Nomor 01/DPRD/2020, Nomor B.1465/1.5.10/CP.2/04/2020, Nomor B/318/IV/2020, Nomor WS.NI/1219/KP.01.1/4/2020, Nomor 164/IV/2020, Nomor B.440/KK.5.6/1/4/2020, Nomor 07/MUI/2020, Nomor R.03/FKub.165.JB/2020, Nomor 19/PD.DMI/IV/2020 Tentang Upaya atau Langkah-Langkah Pencegahan terhadap Penyebaran Covid-19 di Kota Jambi, dengan isi kesepakatan antara lain:

- 1) Pelaksanaan Sholat Jum'at agar jarak makmun 1-2 meter dan lebih diutamakan sholat zuhur dirumah masing-masing.
- 2) Pembatasan dan pemberlakuan jam malam bagi masyarakat dan pelaku usaha tetap diberlakukan sampai jam 21.00 WIB.
- 3) Para Ketua RT agar mengaktifkan kembali Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan).

- e. Pemerintah Kota Jambi telah membuat keputusan melalui **Instruksi Walikota Jambi No.3/INS/III/HKU/2020 tentang penetapan pemberlakuan jam malam bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya antisipasi dan penanganan terhadap penularan infeksi virus corona (Covid-19) di Kota Jambi.**
- f. Selain itu pemerintah Kota Jambi memberlakukan penutupan sementara kegiatan operasional usaha Club malam, diskotik, Pub/musik hidup, karaoke keluarga, Karaoke eksekutive, cafe, spa, bioskop, tempat permainan anak-anak, kolam renang, arena permainan ketangkasan manual / mekanik / elektronik untuk orang dewasa, warnet, fitness dan senam serta kegiatan usaha pariwisata lainnya. Penutupan sementara tersebut diatas diatur dalam:
 1. Instruksi Walikota Jambi Nomor 02/INS/III/HKU/2020 Tanggal 23 Maret 2020 (Penutupan sementara kegiatan operasional terhitung mulai 24 Maret s/d 06 April 2020)

2. Instruksi Walikota Nomor 05/INS/IV/HKU/2020 tanggal 06 April 2020 (Penutupan sementara kegiatan operasional terhitung mulai 07 April s/d 23 April 2020)
 3. Instruksi Walikota Nomor 07/INS/IV/HKU/2020 tanggal 23 April 2020 (Penutupan sementara kegiatan operasional terhitung mulai 24 April s/d 29 Mei 2020).
- g. Pencegahan penularan Covid-19 melalui pembatasan moda transportasi dinilai tidak cukup jika hanya dilakukan dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Hal yang juga penting adalah memastikan kesehatan penumpang, pengemudi, dan awak alat transportasi. **Dinas Perhubungan Kota Jambi mengeluarkan 551/576/DISHUB/2020 tanggal 3 April 2020 mengenai pembatasan penumpang moda transportasi Koja Trans dan Ketek untuk menjaga jarak (physical distancing).** Selanjutnya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 melalui manusia, Pemerintah Kota Jambi memandang perlu melakukan pengetatan masyarakat yang akan masuk ke Kota Jambi maka dari itu diterbitkan **Keputusan Walikota Jambi No.173 tahun 2020 tentang operasi pembatasan masuk ke wilayah Kota Jambi.** Waktu kegiatan operasi selama 24 jam nonstop mulai tanggal 02 April s/d 29 Mei 2020 (atau sesuai perubahan yang ditentukan kemudian).

2.2.4. Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh

Dalam rangka peningkatan kekebalan tubuh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jambi diminta untuk melakukan gerakan berjemur pada jam 10 pagi selama 10-15 menit dengan tetap menjaga jarak hal ini dilakukan mengingat besarnya manfaat berjemur dibawah matahari pada jam 10 tersebut, diantaranya: meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperkuat tulang, mengurangi depresi ringan dan meningkatkan kualitas tidur. Selain itu melalui akun resmi media sosial Pemerintah Kota Jambi selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga, berjemur dan makan makanan bergizi dan seimbang seperti daging, ayam, susu, sayuran dan buah-buahan untuk memperkuat imun tubuh. Pemerintah Kota Jambi telah

memberikan suntikan Vitamin C ke petugas posko batas, baik untuk tenaga medis maupun non medis.

2.2.5. Peningkatan Kapasitas Kesehatan

1. Peningkatan Tenaga Medis

Untuk memastikan kinerja para petugas medis dan non medis dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 Pemerintah Kota Jambi melalui anggaran biaya tidak terduga akan tetap menyiapkan dana insentif yang diberikan kepada dokter, perawat dan petugas lainnya. Selain itu juga menyiapkan rumah singgah sebagai tempat istirahat bagi petugas medis. Pemerintah Kota Jambi telah merekrut relawan tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat 34 orang, laboratorium 4 orang dan non kesehatan Covid-19 yang terdiri tenaga pemulasaran dan penyelenggara pemakaman jenazah 18 orang.

Persiapan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang terjadi di Kota Jambi, jika wabah Covid-19 terjadi eskalasi dan menimbulkan korban jiwa. Relawan tenaga kesehatan dan petugas pemakaman jenazah Covid-19 diberikan pelatihan pemandian dan pemakaman jenazah Covid-19 bertempat di Posko Gugus Tugas Covid-19 Mako Damkar Kota Jambi. Pelatihan tersebut dilaksanakan untuk melatih kesigapan dan kesiapan petugas dalam skenario terburuk menangani penyelenggaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 di Kota Jambi.

2. Peningkatan Sarana Pendukung Kesehatan

Langkah antisipasi penanganan Covid-19 bagi layanan kesehatan dilakukan dengan menyiapkan mobil Ambulance bagi pasien Covid-19 serta juga menyiapkan petugas pendukung lain seperti tenaga sanitasi/kesling, laboratorium dan pemakaman, selain itu juga perlengkapan paska wafat seperti kantong mayat plastik dan plastik pembungkus jenazah telah disiapkan. Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pusara Agung milik Pemerintah Kota Jambi yang berada di jalan Lingkar Barat Alam Barajo yang dipersiapkan khusus jika terjadi kemungkinan terburuk, jatuhnya korban meninggal akibat wabah Covid-19 di Kota Jambi.

3. Peningkatan Ruang Perawatan

Dalam rangka pelayanan pasien Covid-19 Pemerintah Kota Jambi berusaha menambah fasilitas perawatan yang berada di Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi seperti terdapat ditabel berikut:

Tabel 2.4
Penyediaan Sarana Fasilitas Kesehatan Dalam Rangka Pelayanan Covid-19

No	PENYEDIAAN SARANA FASILITAS KESEHATAN	Jumlah	Satuan
1	Gedung untuk perawatan khusus covid 19	1	Unit
2	tempat tidur pasien	11	Unit
3	Ventilator	1	Unit
4	Peralatan untuk tes lengkap covid 19	2	Unit
5	Pasien monitor	10	Unit
6	Oxymetri	10	Unit
7	Termoscan	50	Unit
8	PCR	1	Pcs
9	Tenda Isolasi	1	Pcs
10	Branker	2	Pcs

Selain sarana fasilitas kesehatan yang sudah ada untuk penanganan Covid-19 di Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan secara khusus gedung baru RSUD. H. Abdul Manap sebagai Ruang Isolasi penanganan Pasien Covid-19 di Kota Jambi. Kemudian untuk para pedagang yang reaktif hasil rapid tes-nya dilakukan isolasi di Graha Lansia fasilitas milik Pemerintah Kota Jambi.

4. Penguatan Sistem

Dalam rangka pengendalian COVID-19 Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan SK Gugus Tugas No. 172 Tahun 2020 dan menjadikan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi sebagai POSKO Gugus Tugas guna mempermudah komunikasi di masing-masing tim. Selain itu demi mempermudah pemberian informasi kepada masyarakat Pemerintah Kota Jambi telah menyediakan media informasi dan juga system informasi geografis melalui website <https://covid19.jambikota.go.id> dan juga tentunya melalui akun resmi di beberapa media social seperti Instagram dan facebook.

2.2.6. Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Industri Alat Kesehatan

1. Peningkatan Alat Kesehatan dan APD

Untuk mendukung tenaga kesehatan Pemerintah Kota Jambi telah menyediakan anggaran dibidang kesehatan untuk peningkatan alat kesehatan dan APD medis.

Pemerintah Kota Jambi mendapatkan bantuan dari pemerintah Singapura berupa 2.500 liter konsentrat hand sanitizer yang dapat diolah menjadi 250.000 liter hand sanitizer, Intermediate bulk Container kapasitas 1000 liter sebanyak 35 pcs, Drum kapasitas 100 liter sebanyak 350 pcs RNA Exraction Kits (alat tes Covid-19) sebanyak 10.368 kali tes dan 50 unit Mixers Fortitude Kit. Bantuan bernilai SGD 125.258 tersebut, memang ditujukan untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Jambi dan Provinsi Jambi dan telah diterima pada tanggal 22 Mei 2020.

2. Mengawal Produksi dan Distribusi Kebutuhan Pokok

Pemerintah Kota Jambi berusaha menjamin kebutuhan pangan masyarakat melalui tim satgas pangan Kota Jambi yang selalu rutin berkoordinasi dengan BULOG untuk kepastian penyediaan bahan pangan masyarakat Kota Jambi. Selain itu untuk membantu masyarakat pemerintah Kota Jambi juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak.

3. Peningkatan Produksi Kebutuhan Medis

Dalam rangka mendukung kebutuhan medis Pemerintah Kota Jambi melakukan Produksi APD Hazmat dengan merangkul UMKM yang bekerjasama dengan 25 perajin. Selain itu pemerintah Kota Jambi juga menginisiasi pembuatan masker yang dibagikan gratis kepada masyarakat. Pada tahap pertama sudah dibagikan sebanyak 20.000 masker dengan sasaran masyarakat yang berada di beberapa pasar dan persimpangan jalan utama Kota Jambi. Pembagian tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Walikota Jambi.

2.2.7. Memperkuat Jaring Pengaman Sosial Nasional (*Social Safety Net*)

1. Stimulus Ekonomi

Dalam penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Jambi telah membuat beberapa kebijakan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat dan pengusaha antara lain:

- a. Kebijakan pembebasan tagihan air minum Perumda Tirta Mayang dalam bentuk menggratiskan tagihan air minum bagi pelanggan golongan sosial (1.045 sambungan) dan rumah tanggal 1 (26.383 sambungan) Menggratiskan pemakaian bulan April dan Mei 2020 (pembayaran bulan Mei dan Juni 2020), pemakaian maksimum 20 M³/ setara Rp. 80.000/Bulan.
- b. Membebaskan kewajiban 4 jenis pajak dari pelaku usaha. Jenis pajak tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah.
- c. Memperpanjang masa jatuh tempo pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) hingga 31 Desember, diakhir tahun mendatang.

2. Bantuan Langsung Kepada Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga masyarakat Kota Jambi yang sangat terdampak akibat wabah pandemi Covid-19 baik melalui APBD maupun bantuan dari berbagai pihak.

2.2.8. Kebijakan Non Anggaran Penanganan COVID-19 Kota Jambi

Kebijakan non anggaran penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi antara lain:

1. Pemerintah Kota Jambi memiliki rekening "**Kota Jambi Peduli**" yang merupakan donasi dalam bentuk uang dan barang. Donasi dalam bentuk barang bersumber dari pelaku usaha, komunitas dan perorangan berupa APD, Masker, Suplemen, Makanan, Minuman, Cairan, Disinfektan, Wastafel cuci tangan, Pompa penyemprot dan galon air.
2. Kebijakan pembagian nasi bungkus kepada pekerja informal (ojek online dan supir angkutan umum) diprioritaskan bagi pekerja informal gaji harian seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan, angkutan umum, pengemudi angkot, juru parkir dan petugas kebersihan.

3. Kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam mengurangi kegiatan masyarakat diluar rumah, Pemerintah Kota Jambi menginisiasi sistem berbelanja secara online menggunakan aplikasi “SANGKEK” di beberapa pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Kota Jambi, pasar modern atau tradisional lainnya. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah.
4. Untuk mendukung gerakan *#dirumahsaja*, Pemerintah Kota Jambi menginisiasi sistem belanja secara online di pasar-pasar tradisional antara lain Pasar Baru Talang Banjar, Pasar Auduri, Pasar Kasang, Pasar TAC, Pasar Angsoduo dan juga retail besar, swalayan bekerjasama dengan Ojek Online (Grab,Gojek dan Maxim) dan Pangkalan Ojek untuk melayani pengantaran pesanan masyarakat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Propinsi Jambi (RKPD) dan Kota Jambi (RPJPD).

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2019 dan Perkiraan Tahun 2020

Pengenalan dan pemahaman mengenai kondisi riil daerah sebagai basis dalam penetapan tujuan pembangunan daerah dan program-program pembangunan daerah salah satunya dilakukan dengan analisis makro ekonomi daerah. Dengan analisis makro ekonomi daerah dapat dilakukan identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2020, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah regional domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam tahun atau periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan..

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan berjalan (*current account*), sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi di wilayah suatu daerah

dalam waktu tertentu (umumnya tahunan atau triwulan). Sektor produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan jumlah pengeluaran yang termasuk dalam komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori & diskrepansi statistik, (6) ekspor barang dan jasa, dan (7) impor barang dan jasa.

c. Pendekatan Pendapatan

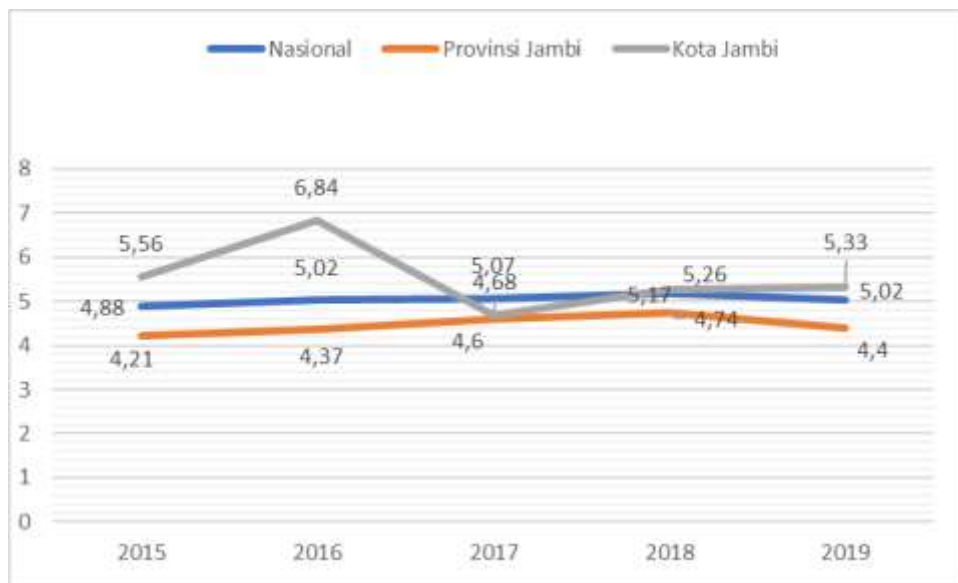
Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan atau tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2015-2019, LPE Kota Jambi lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional, kecuali tahun 2017. LPE tertinggi pada tahun 2016 tercatat 6.84 % dan Pada tahun selanjutnya mengalami fluktuasi, hal

ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global maupun nasional. Pada tahun 2019, LPE Kota Jambi meningkat menjadi 5.33% berada di atas LPE Provinsi Jambi, yaitu 4,4 % dan LPE Nasional yang sebesar 5,02 %. Untuk mengetahui perbandingan LPE Kota Jambi dengan Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dan perbandingannya dengan Provinsi Jambi dan nasional



Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Salah satu informasi yang dapat diperoleh dari perhitungan PDRB adalah pertumbuhan ekonomi. Secara umum, perekonomian di Kota Jambi pada Tahun 2019 menunjukkan kecenderungan meningkat dan meninggalkan pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Jambi (berdasarkan harga konstan 2010). Kondisi ini menggambarkan kondisi sektor riil di Kota Jambil yang lebih kondusif, sehingga terjadi peningkatan investasi. Dilihat dari sisi permintaan, semua komponen permintaan akhir meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan yang merata dan berkesinambungan (*equity* dan *sustainable growth*). Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara dengan pemanfaatan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi Tahun 2015-2019 cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Dari

Grafik 3.1 pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sebesar 6,84 persen, kemudian menurun drastis pada tahun 2017 adalah sebesar 4,68 persen. Pada Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi meningkat sebesar 5,26 persen dan terus mengalami peningkatan yang signifikan sehingga Tahun 2019 mencapai angka 5.33 persen dan merupakan pertumbuhan yang tertinggi selama periode analisis. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada Tahun 2017, yakni karena masih lemahnya ekonomi global, dan juga erat kaitannya dengan penurunan sektor perdagangan besar sebagai sektor utama Kota Jambi.

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015–2019 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	180.64	183.86	187.68	195.98	190.88
B. Pertambangan dan Penggalian	526.09	509	418.28	432.13	425.97
C. Industri Pengolahan	1962.94	2045.89	2124.29	2200.32	2272.93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	29.45	31.18	31.73	33.65	35.61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41.27	42.99	43.96	46.13	46.5
F. Konstruksi	1516.11	1578.66	1703.57	1809.48	1943.29
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4219.92	4544.46	4784.48	5120.19	5505.78
H. Transportasi dan Pergudangan	1995.12	2242.84	2398.29	2481.6	2530.3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350.23	379.07	415.17	447.02	476.26
J. Informasi dan Komunikasi	776.3	843.49	900.36	974.85	1037.68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	936.67	1050.08	1085.94	1079.09	1104.82
L. Real Estate	402.01	421.73	444.99	474.67	510.07
M,N. Jasa Perusahaan	446.93	476.18	504.52	531.25	558.9
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1215.55	1251.81	1282.75	1341.77	1402.2
P. Jasa Pendidikan	725.6	771.53	805.6	858.39	924.88
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401.89	430.57	457.5	486.04	534.36
R,S,T,U. Jasa lainnya	125.23	133.1	139.24	148.78	155.35
Produk Domestik Regional Bruto	15851.95	16936.44	17728.34	18661.33	19655.79

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2019 akibat dari peningkatan 5 (lima) sektor utama yaitu : (a), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5505,78 Miliar; (b), sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 2530,3 Miliar; (c), sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2272,93 Miliar; (d), sektor Konstruksi sebesar Rp. 1943,29 Miliar; dan (e), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp. 1402.2 Miliar.

Untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.58	1.78	2.08	4,42	-2,61
B. Pertambangan dan Penggalian	-31,34	-3.25	-17.82	3.31	-1,43
C. Industri Pengolahan	5.17	4.23	3.83	3,58	3,3
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.55	5.87	1.76	6.05	5,85
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.97	4.17	2.25	4.94	0,8
F. Konstruksi	2.5	4.13	7.91	6.22	7,39
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.13	7.69	5.28	7.02	7,53
H. Transportasi dan Pergudangan	5.7	12.42	6.93	3,47	1,96
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.1	8.24	9.52	7.67	6,54
J. Informasi dan Komunikasi	9.36	8.65	6.74	8.27	6,45
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.85	12.11	3.42	-0.63	2,38
L. Real Estate	2.43	4.9	5.52	6.67	7,46
M,N. Jasa Perusahaan	6.82	6.54	5.95	5.3	5,21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.42	2.98	2.47	4.6	4,5
P. Jasa Pendidikan	7.64	6.33	4.42	6.55	7,75
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.28	7.14	6.25	6.24	9,94
R,S,T,U. Jasa lainnya	7.99	6.28	4.62	6.85	4,41
Produk Domestik Regional Bruto	5,12	6,84	4,68	5,26	5,33

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), cukup baik diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. 2019. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tahun n dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya ($n-1$ atau $n-2$ bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan realisasi investasi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan barang-barang modal melalui berbagai cara diantaranya menunjukkan bahwa daya tarik utama dari investasi terletak pada faktor kelembagaan terdiri dari aparatur dan pelayanan, peraturan dan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepastian hukum.
2. Menjaga ketertiban umum dengan usaha memberi kesadaran kepada masyarakat akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, termasuk kenyamanan dalam politik, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengembangkan pariwisata melalui *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*.

Untuk melihat secara lengkap struktur perekonomian Kota Jambi tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015–2019 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	285.98	310.93	318.35	342.17	341.08
B. Pertambangan dan Penggalian	541.71	519.83	406.74	579.55	548.01
C. Industri Pengolahan	2467.77	2655.3	2830.67	2981.19	3112.5
D. Pengadaan Listrik dan Gas	38.21	47.92	55.56	61.12	66.74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	56.36	62.06	66.78	71.41	83.91
F. Konstruksi	1929.78	2090.38	2308.87	2554.04	2801.84
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5999.14	7233.21	7952.23	8896.46	9712.78
H. Transportasi dan Pergudangan	2535.82	3072.6	3329.32	3570.37	3707.78
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	484.23	558.39	631.99	682.67	735.07
J. Informasi dan Komunikasi	941.74	1115.13	1205.59	1333.28	1436.66
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1251.24	1465.86	1536.12	1582.39	1646.67
L. Real Estate	527	586.66	634.74	715.29	785.76
M,N. Jasa Perusahaan	633.41	729.19	792.13	860.37	931.78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2021.31	2152.99	2263.9	2503.89	2632.52
P. Jasa Pendidikan	956.33	1091.38	1190.86	1289	1398.84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	473.04	544.57	587.99	635.72	703.37
R,S,T,U. Jasa lainnya	150.39	169.12	181.46	199.92	210.6
Produk Domestik Regional Bruto	21293.45	24405.53	26293.31	28858.83	30855.9

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2019 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Kota Jambi pada tahun 2019 dibentuk oleh 5 sektor tersebut.

Semakin besar persentase distribusi suatu sektor lapangan usaha, maka semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu

pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Berikut ditampilkan persentase distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB.

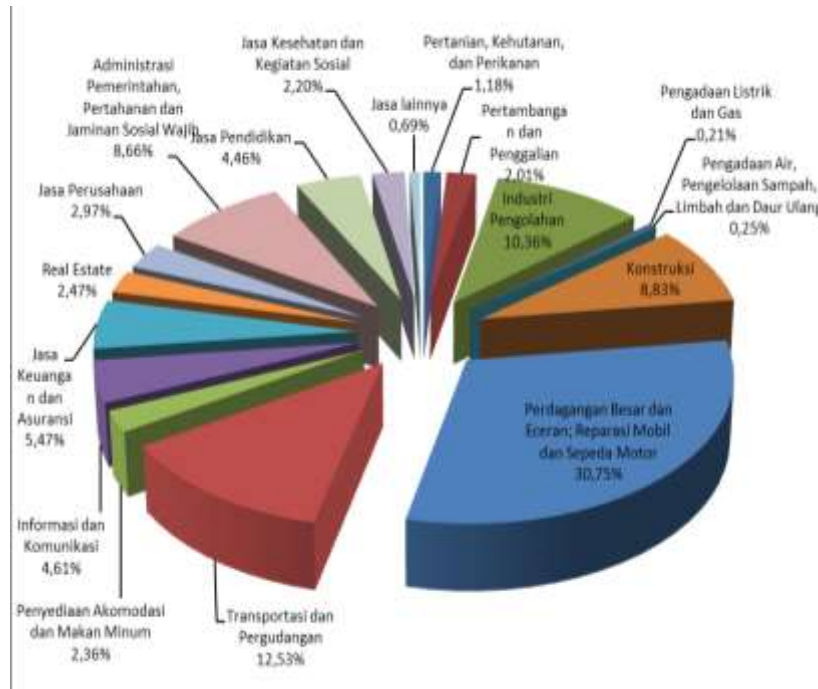
Tabel 3.4.
Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	1,27	1,21	1,19	1,11
B Pertambangan dan Penggalian	2,54	2,13	1,55	2,01	1,78
C Industri Pengolahan	11,59	10,88	10,77	10,33	10,09
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,20	0,21	0,21	0,22
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,26	0,25	0,25	0,25	0,27
F Konstruksi	9,06	8,57	8,78	8,85	9,08
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,17	29,64	30,24	30,83	31,48
H Transportasi dan Pergudangan	11,91	12,59	12,66	12,37	12,02
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,29	2,40	2,37	2,38
J Informasi dan Komunikasi	4,42	4,57	4,59	4,62	4,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,88	6,01	5,84	5,48	5,34
L Real Estate	2,47	2,40	2,41	2,48	2,55
M Jasa Perusahaan	2,97	2,99	3,01	2,98	3,02
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,49	8,82	8,61	8,68	8,53
P Jasa Pendidikan	4,49	4,47	4,53	4,47	4,53
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,22	2,23	2,24	2,20	2,28
R Jasa Lainnya	0,71	0,69	0,69	0,69	0,68
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB TANPA MIGAS	97,94	98,21	98,52	98,05	98,27

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2019 sektor yang paling besar kontribusi persentasenya adalah sektor sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 31,48%; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,02%; sektor Industri Pengolahan sebesar 10,09%; sektor Konstruksi sebesar 9,08%; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,53%. Dengan demikian, struktur perekonomian Kota Jambi paling besar dibentuk oleh 5 (lima) sektor tersebut.

Dari tabel di atas dapat dilihat porsi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kota Jambi pada tahun 2019 seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2

Porsi Masing-Masing Lapangan Usaha Terhadap Total PDRB Kota Jambi tahun 2019

Sedangkan jika dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015-2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.5
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2.	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	13.123,57	14.212,68	15.432,10	16.415,75	17,613,64
2.	Atas Dasar Harga Konstan	10.072,15	10.526,96	11.071,36	11.483,38	12,072,05
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	61,63	58,24	58,69	56,88	57,08
2.	Atas Dasar Harga Konstan	63,54	62,16	62,45	61,54	61,42

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kota Jambi. Semakin besar rasio atau angka pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertambahan pendapatan perkapita masyarakat, maka semakin menunjukkan perbaikan dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Jambi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pada kondisi pendapatan terbatas, terlihat keberhasilan pemerintah dalam edukasi masyarakat dimana pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan

tercermin bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan, dan menunda pengeluaran lainnya.

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku adalah sebesar 13.123.57 Juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 17.613.64 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Tabel 3.6
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2.	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	5.000,77	5.154,58	5,739,32	6,165,09	6,626,44
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3.424,91	3.394,85	3,676,52	3,915,40	4,210,23
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	23,49	21,12	21,83	21,36	21,48
2.	Atas Dasar Harga Konstan	21,61	20,04	20,74	20,98	21,42

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5.000.77 juta rupiah (2016); 5.154.58 juta rupiah (2017); dan 5.739.32 juta rupiah (2018); 6.165.09 juta rupiah serta (2019) sebesar 6.626.44 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 3.7, PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 5.123.10 Juta pada tahun 2015 dan terus

meningkat hingga tahun 2019 sebesar Rp. 6.855.91 Juta. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 3.7
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	5,123,10	5,447,32	5,853,90	6,292,62	6,855,91
2	Atas Dasar Harga Konstan	4,014,60	4,179,20	4,383,19	4,522,82	4,777,22
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto thd PDRB (persen)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	24,06	22,32	22,26	21,80	22,22
2	Atas Dasar Harga Konstan	25,33	24,68	24,72	24,24	24,30

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

3.1.1.2. Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan.

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2019 mencapai 51.024 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar Rp 44.479 juta dan Rp 48.369 juta. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini

disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 3.8.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB (miliar rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	36.963	41.827	44.479	48.369	51.024
2	Atas Dasar Harga Konstan	27.518	29.026	29.990	31.201	32.503
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)						
	Atas Dasar Harga Konstan	3,66	5,48	3,32	4,25	4,17

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

3.1.1.3. Inflasi

Inflasi Kota Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal administered price terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listri. Pada tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap. Untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 laju inflasi terjadi pada kelompok volatile food

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Inflasi Kota Jambi Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Inflasi Kota Jambi	1,37	4,54	2,68	3,02	1,27	3,6
Inflasi Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	3,17

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Perkembangan inflasi Kota Jambi cenderung berfluktuasi dan capaian tahun 2017 sebesar 2,68% masih di bawah rata-rata inflasi nasional yang sebesar 3,17%. Proyeksi inflasi pada tahun 2018 sebesar 3,02% dan 1,27 % pada tahun 2019 didasari oleh pertimbangan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI yang trennya cenderung stabil dan meningkat. Selain itu didukung dengan upaya-upaya pengendalian harga bahan pokok secara konsisten khususnya terkait dengan kelancaran supply dan distribusi, antisipasi iklim yang kurang mendukung dan jaminan ketersediaan yang mencukupi.

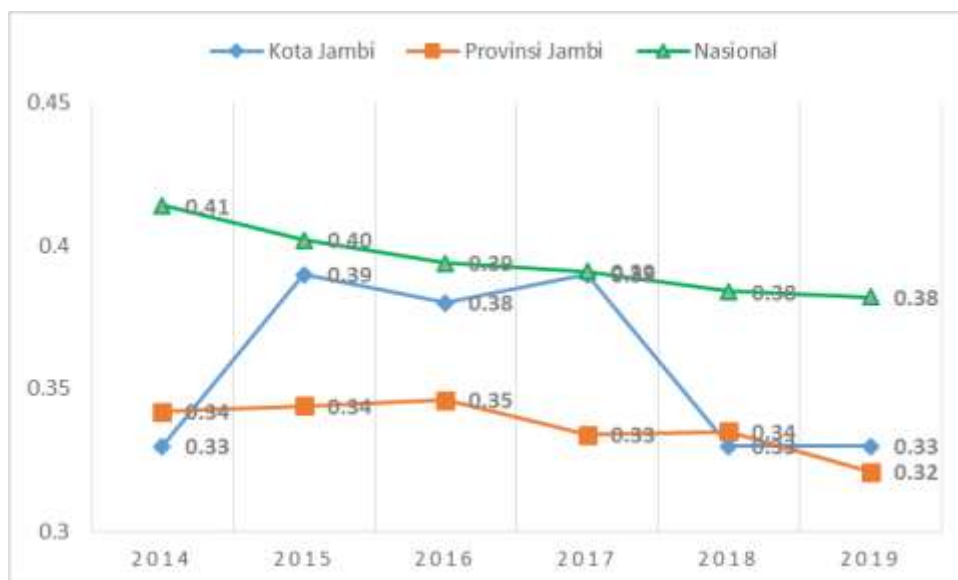
Jika melihat inflasi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yang terjadi pada *volatile food* maka kebijakan yang perlu diambil antara lain adalah fokus pada peningkatan jumlah pasokan dengan memperhatikan tata niaga perdagangan, memperbaiki sarana dan prasarana pasar dan menumbuh kembangkan usaha pedagang-pedagang kecil. Dengan kegiatan yang diarahkan pada Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan melaksanakan penyuluhan sumber-sumber pangan alternatif yang disesuaikan dengan kondisi Kota Jambi.

3.1.1.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Menurut Simon Kuznets mengenai *extensive growth*, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Namun, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) tahun 2019 mencapai sebesar 0,33 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 0,39 atau 0,06 poin. Capaian ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Jambi yang relatif lebih baik dibandingkan pada tahun 2017 meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan

masyarakat secara umum. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2020 diproyeksikan sebesar 0,31.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Gambar 3.3.
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi
Tahun 2014-2019

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun Perubahan Tahun 2020

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2020 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2015-2019), bahkan tahun 2029 mampu tumbuh 7,79 persen, sehingga diperkirakan ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 8,8 persen tahun 2020.

Namun prediksi target pertumbuhan ekonomi tersebut berubah dengan cepat dan tidak mungkin tercapai akibat pengaruh Pandemi Covid 19. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Jambi menyebabkan terganggu bahkan berhentinya aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian pemerintah kota Jambi harus merubah skenario target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 menjadi target yang lebih rasional lagi, demikian juga target indikator makro lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah berdampak negatif terhadap peningkatan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta inflasi, bahkan berimplikasi kepada meningkatnya problem sosial politik.

3.1.2.1. Pandemi Covid 19 dan Ekonomi Kota Jambi

Diawali pada awal tahun 2020 terjadi perubahan dahsyat ekonomi dunia akibat dari **Pendemi Covid 19 atau Virus Corona**, yang dimulai dari negara China berhembus ke semua negara di dunia (Negara Eropa, Amerika, Asia) termasuk Indonesia, yang pada akhirnya berimbas negatif kepada semua Provinsi, Kabupaten dan Kota termasuk kepada Kota Jambi. Virus Corona merupakan persoalan kesehatan yang sudah menyebabkan kematian kepada banyak manusia di dunia dan Indonesia. Kebijakan pemerintah malukan pembatasan gerakan sosial

dan sentuhan secara fisik, bahkan banyak negara melakukan “lock down” untuk menutup akses virus corona tersebut.

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pembatasan sosial dan fisik (*social and physical distancing*) bahkan melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), meskipun tidak untuk semua wilayah telah menimbulkan dampak negatif kepada berhentinya sebagian aktivitas ekonomi masyarakat sehingga terus berimbas kepada terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis. Namun hampir semua negara Eropa dan Amerika Serikat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan diperkirakan negatif pada tahun 2020. Indonesia diperkirakan hanya mampu tumbuh dibawah 2 persen.

3.1.2.2. Prospek Ekonomi Kota Jambi Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2020

Kota Jambi yang merupakan ibu kota Provinsi Jambi terkait erat dengan kondisi ekonomi eksternal (dunia, Indonesia dan Provinsi Jambi) karena perekonomian Kota Jambi termasuk ekonomi terbuka (*open economy*), sehingga fluktuasi ekonomi dunia dan Indonesia mempengaruhi fluktuasi perkembangan ekonomi Kota Jambi. Penurunan pertumbuhan ekonomi eksternal akan menurunkan permintaan terhadap produk ekonomi Kota Jambi. Pandemi Covid 19 telah membuat perubahan dalam perekonomian Kota Jambi, sehingga semua estimasi yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya (asumsi kondisi normal harus berubah), ada dua skenario target pertumbuhan ekonomi Kota **Jambi tahun 2020** yaitu :

1. Skenario optimis, artinya Virus Corona yang terjadi pada kuartalan pertama (Q1) tahun 2020 bisa diatas dan dampak negatif terhadap masyarakat menurun pada kuartalan kedua (Q2), dan terus terjadi pada kuartalan ketiga (Q3), bahkan dapat hilang pada kuartalan ke empat (Q4), maka pertumbuhan ekonomi Kota Jambi terkoreksi, namun di estimasi masih mampu tumbuh mencapai **sekitar 3.5 sampai 4.5 persen**. Hal ini disebabkan : (a), pada periode lima tahun sebelumnya relatif tinggi (2015-2019) bahkan tahun tahun 2019 mampu mencapai 5.33 persen; dan (b), Kota Jambi tidak termasuk **zona merah** dan dikategorikan dalam **wilayah kebijakan PSBB**, sehingga aktivitas ekonomi masih tetap jalan terutama untuk sektor-sektor unggulan (sektor

perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pengadaan listrik dan gas; serta industri pengolahan) bahkan terjadi kenaikan untuk jasa sektor Jasa dan Komunikasi. Kemudian ditopang oleh masih berjalannya sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebagai penggerak sektor lainnya.

2. Skenari moderat, artinya sampai akhir tahun 2020, Virus Corona tidak mampu diturunkan pada kuartalan ke dua, tiga bahkan sampai kuartalan ke empat. Pada sisi lain kebijakan ekonomi pemerintahan Kota Jambi sangat terkait dengan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi, tidak mampu melanggarkan kegiatan ekonomi bahkan aktivitas sektor riil masih tetap tidak berjalan dengan baik sebagaimana kondisi normal, maka pertumbuhan ekonomi Kota Jambi diperkirakan akan lebih kecil berikisar **antara 2 sampai 3 persen namun masih lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional**. Hal ini disebabkan (a), beberapa sektor unggulan di Kota Jambi tidak bergerak dengan baik terutama sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pengadaan listrik dan gas dan industri pengolahan; (b), kemudian sektor informal yang masih menjadi motor penggerak perekonomian menjadi tidak berjalan, karena semakin diperketatnya kebijakan social dan physical distancing. Apalagi jika Kota Jambi ditetapkan sebagai wilayah PSBB dan zona merah; dan (c), semakin menurunnya permintaan konsumen luar wilayah Jambi terhadap produk Jambi.

Skenario optimis pada tahun 2020, asumsi terjadi kestabilan kesehatan masyarakat dimana Covid 19 sudah dapat diatasi dan bahkan tidak ada, maka kebijakan pemerintah akan fokus melakukan pemulihan ekonomi bahkan meningkatkan daya saing daerah Kota Jambi yang semakin dinamis terutama mendorong berkembangannya sektor perdagangan barang dan jasa yang menjadi orientasi kota Jambi, demikian juga daya saing pariwisata yang unggul dan kompetitif serta mendorong sektor administrasi pemerintahan yang semakin dinamis dan inovatif sebagai lokomotif menggerakkan sektor lainnya.

Pada kondisi optimisme ekonomi akan kembali normal, **maka pada Tahun 2021** perekonomian Kota Jambi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan

ekonomi yang lebih baik menjadi **sebesar 4 sampai 5 persen** dan lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional. Hal ini disebabkan bahwa secara makro kondisi perekonomian nasional diperkirakan sudah membaik seiring dengan kondisi perekonomian global yang semakin membaik, stabilitas pemerintahan semakin terjaga dan orientasi pertumbuhan ekonomi nasional yang diarahkan pada percepatan pengembangan daerah. Kemudian, faktor-faktor lain yang diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap tercapainya target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tersebut adalah:

1. Implementasi perdagangan bebas ASEAN (MEA) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri, peningkatan daya saing produk dan peningkatan nilai ekspor sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap PDRB Kota Jambi.
2. Pergeseran struktur perekonomian di Kota Jambi ke arah sektor tersier diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan peluang dan lapangan kerja baru sehingga akan berdampak terhadap pendistribusian pendapatan kepada masyarakat luas.
3. Kebijakan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan diharapkan dapat meningkatkan sektor perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan dan jasa masih merupakan penopang terbesar perekonomian Kota Jambi, namun terus mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan pula dapat memacu peningkatan laju pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi.

Meskipun tidak diharapkan kondisi yang semakin parah, namun masih sulit melakukan prediksi secara pasti tentang perbaikan kondisi variabel gangguan Covid 19, apakah sudah mampu diatasi dengan baik oleh pemerintah dan semua komponen masyarakat, namun terdapat optimisme bahwa Pandemi Covid 19 akan berkurang pada tahun 2021, karena semua negara bergerak menuju titik yang sama untuk menghilangkan Virus Corona tersebut karena jika berlangung lama, ekonomi dunia dan Indonesia akan menuju kepada resesi. Kemudian juga didukung dengan kebiasaan masyarakat secara mandiri terbiasa mengatas

dampak Virus Corona tersebut secara mandiri dan akhirnya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Logika rasionalitas tersebut membuat keyakinan Kota Jambi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi **diatas 4 sampai 5 persen** (lebih tinggi dari tahun 2020) dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan nasional.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

Tabel 3.10
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi Tahun 2017 s.d Perubahan Tahun 2020
 (Berdasarkan RPJMD Kota Jambi 2018-2028)

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Perubahan Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah	397.327.847.290	338.891.882.592,96	393.552.656.640	403.484.193.000	369.594.193.000
1.1.1	Pajak daerah	201.429.136.841	215.444.388.499	256.027.807.314	255.000.000.000	232.060.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	43.077.425.944	40.389.059.087,09	38.540.603.597	47.568.000.000	36.618.000.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.066.340.479	8.854.962.599,49	9.783.144.577	10.000.000.000	10.000.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	144.754.944.026	74.203.426.907,38	89.201.101.152	90.916.193.000	90.916.193.000
1.2	Dana perimbangan	1.013.005.895.282	1.110.714.904.091,00	1.110.177.033.331	1.126.863.703.930	1.029.782.416.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	108.336.723.678	118.633.409.807	132.185.357.673	102.028.814.930	87.667.936.000
1.2.2	Dana alokasi umum	714.783.378.000	714.783.378.000	757.404.051.000	763.018.217.000	690.724.772.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	189.885.793.604	277.298.116.284	220.587.624.658	261.816.672.000	251.389.708.000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	90.299.495.375	175.270.526.028,23	147.840.401.081	215.159.326.000	197.992.458.032
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.819.000.000	59.419.509.209,40	11.918.148.000	58.911.800.000	58.911.800.000
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	80.760.495.375	94.131.016.818,83	114.911.044.081	131.000.000,000	97.614.609.032
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		18.000.000.000	11.291.209.000	18.527.526.000	37.746.049.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	6.720.000.000	3.720.000.000	9.720.000.000	6.720.000.000	3.720.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	1.500.633.237.947	1.624.877.312.712,19	1.651.570.091.052	1.745.507.222.930	1.597.369.067.032

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Jambi
Tahun 2017 s.d Perubahan Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Perubahan Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung	633.792.563.865	657.258.424.968	795.111.216.885	753.881.710.930	773.391.391.117
2.1.1	Belanja pegawai	609.075.861.181	614.857.160.444	769.336.362.485	721.563.236.930	685.933.063.244
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi				1.000.000.000	1.000.000.000
2.1.4	Belanja hibah	18.623.738.650	36.588.195.224	14.725.400.000	21.553.843.619	18.481.774.492
2.1.5	Belanja bantuan sosial	3.407.880.000	3.915.540.000	7.651.455.000	7.637.723.000	7.673.723.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa*					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa*	1.292.132.400	1.292.132.400	1.292.132.400	100.000.000	100.000.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.392.951.634	605.396.900	2.105.867.000	2.026.907.381	60.238.830.381
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	633.792.563.865	759.889.727.857	795.111.216.885	753.881.710.930	773.391.391.117
2.2	Belanja Langsung	862.510.115.270	921.345.540.132,20	915.500.926.000	1.458.798.632.000	1.035.154.595.326
2.2.1	Belanja pegawai	74.716.530.322	59.749.332.455,	64.233.008.032	64.787.962.108	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	368.476.988.979	415.787.045.628,24	472.736.494.365	567.399.452.976	
2.2.3	Belanja modal	419.316.595.968	445.809.162.048,96	378.531.423.603	826.611.216.916	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	862.751.591.768	921.345.540.132,20	915.500.926.000	1.458.798.632.000	1.035.154.595.326
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.496.302.679.135	1.578.603.965.100	1.710.612.142.885	2.212.680.342.930	1.808.545.986.443

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 s.d Tahun Perubahan Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Perubahan Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	134.489.386.517	131.650.797.287,90	50.558.257.885	67.173.120.000	211.176.919.411
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				400.000.000.000	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	134.489.386.517	131.650.797.288	50.558.257.885	467.173.120.000	211.176.919.411
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	6.988.000.000	5.000.000.000		0	0
3.2.3	Pembayaran pokok hutang	181.148.041			0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.169.148.041	5.000.000.000		0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	127.320.238.476	126.650.797.288	50.558.257.885	467.173.120.000	211.176.919.411

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 dan prediksi tahun 2020 penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13
Realisasi dan Target Pendapatan Kota Jambi
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	TARGET 2020
1	PAJAK DAERAH	201.429.136.841,40	215.444.388.499	256.027.807.314	255.000.000.000
2	RETRIBUSI DAERAH	43.077.425.943,53	40.389.059.087,09	38.540.603.597	47.568.000.000
3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.066.340.478,60	8.854.962.599,49	9.783.144.577	10.000.000.000
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	144.754.944.025,57	74.203.472.407,38	89.201.101.152	90.916.193.000
PAD		397.327.847.289,10	338.891.882.592,96	393.552.656.640	403.484.193.000
5	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SDA	108.336.723.678,00	118.633.409.807	132.185.357.673	102.028.814.930
6	D A U	714.783.378.000,00	714.783.378.000	757.404.051.000	763.018.217.000
7	D A K	189.885.793.604,00	277.298.116.284	220.587.624.658	261.816.672.000
DANA PERIMBANGAN		1.013.005.895.282,00	1.110.714.904.091,00	1.110.177.033.331	1.126.863.703.930
8	PENDAPATAN HIBAH	2.819.000.000,00	59.419.509.209,40	11.918.148.000	58.911.800.000
9	BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	80.760.495.375,60	94.131.016.818,83	114.911.044.081	131.000.000.000
10	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	0	18.000.000.000	11.291.209.000	18.527.526.000
11	BANTUAN KEUANGAN	6.720.000.000,00	3.720.000.000	9.720.000.000	6.720.000.000
LAIN-LAIN PEND. DAERAH		90.299.495.375,60	175.270.526.028,23	147.840.401.081	215.159.326.000
JUMLAH PENDAPATAN SELURUHNYA		1.500.633.237.946,70	1.624.877.312.712,19	1.651.570.091.052	1.745.507.222.930

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas :

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dalam rangka upaya untuk terus meningkatkan penerimaan daerah, maka untuk tahun 2020 kebijakan -kebijakan yang diambil yaitu :

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan pemungutan, efisiensi biaya, memperkecil tunggakan dan menegakkan sanksi hukum.
- Meningkatkan Penerimaan dari Dana Perimbangan pada komponen bagi hasil pajak melalui intensifikasi Pajak-pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.
- Menggali dan mendapatkan sumber-sumber pendanaan lain.

Kebijakan Keuangan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Jambi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pencapaian target yang telah direncanakan, pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan kegiatan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi antara lain :

- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah dari masing-masing objek pajak dan retribusi daerah.
- Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan daerah guna mendapatkan data pajak daerah yang akurat.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan dan atau perubahan data objek pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.
- Melakukan pinjaman daerah untuk percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan publik baik melalui lembaga perbankan/non perbankan.
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah.
- Penyelesaian serta pengecekan atas Keberatan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah.
- Penagihan atas tunggakan Pajak Retribusi kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
- Terlaksananya Tertib Administrasi Ketetapan dan Administrasi Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kota Jambi sampai dengan APBD Perubahan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.673.334.071.976,00 yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2019 mencapai Rp. 393.552.656.639,79 atau 103,09% dari target penerimaan sebesar Rp. 381.743.685.000,00 dan memberikan kontribusi sebesar 23,83% terhadap pendapatan Kota Jambi Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018 yakni sebesar Rp. 338.892.256.292,96 maka PAD Tahun 2019 meningkat 16,13% atau naik Rp. 54.660.774.046,83.

Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2018 dengan Tahun 2019.

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2018 dengan TA 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2018 (000)	Realisasi 2018 (000)	% Realisasi	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	203.500.000	215.444.388	105,87	242.090.000	256.027.807	105,76
2.	Ret. Daerah	44.012.000	40.389.059	91,77	45.068.647	38.540.603	85,52
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	8.850.000	8.854.962	100,06	9.700.000	9.783.144	100,86
4.	Lain-lain PAD yg sah	79.540.135	74.203.846	93,29	84.885.038	89.201.101	105,08
TOTAL		390.892.633	335.902.135	100,89	381.743.685	393.552.656	103,09

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diterima Kota Jambi terdiri dari pos bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Perbandingan tahun 2017 dan 2018 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
TA 2018 dengan TA 2019 *(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)*

No	Uraian	Target 2018 (000)	Realisasi 2018 (000)	% Realisasi	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi
1.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	118.890.269	118.633.409	99,78	137.965.056	132.185.357	95,81
2.	Dana Alokasi Umum	714.783.378	714.783.378	100,00	757.404.051	757.404.051	100,00
3.	Dana Alokasi Khusus	291.823.567	277.298.116	95,02	234.950.785	220.587.624	93,89
TOTAL		390.892.633	335.902.135	100,89	381.743.685	393.552.656	103,09

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Pos bagi hasil pajak dan bukan pajak terdiri dari : bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil PPh pasal 21, 25 dan 29 serta bagi hasil bukan pajak/SDA. Target pos bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah sebesar Rp. 137.965.056.000,00 realisasinya mencapai Rp. 132.185.357.673,00 atau 95,81%.

Target penerimaan dari pos Dana Alokasi Umum tahun 2019 adalah sebesar Rp. 757.404.051.000,00 dan realisasinya mencapai Rp. 757.404.051.000,00 atau 100,00%, sedangkan pada penerimaan dari pos Dana Alokasi Khusus hanya mencapai realisasi sebesar 93,89% yaitu Rp. 220.587.624.658,00.

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terakhir Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi. Selama tahun 2019, ditargetkan Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp. 81.347.485.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 114.911.044.081,07 (141,26%). Sedangkan pendapatan hibah sebesar Rp. 61.479.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.918.148.000,00 (19,39%).

Untuk Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya terealisasi sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018 dengan Tahun 2019 di bawah ini:

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2018 dengan TA 2019
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2018 (000)	Realisasi 2018 (000)	% Realisasi	Target 2019 (000)	Realisasi 2019 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	62.534.000	35.914.102	57,43	61.479.800	11.918.148	19,39
2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	81.347.485	92.499.055	113,71	81.347.485	114.911.044	141,26
4.	Dana Penyesuaian Otsus	18.000.000	18.000.000	100,00	11.291.209	11.291.209	100,00
5.	Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya	5.220.000	3.720.000	71,26	9.720.000	9.720.000	100,00
TOTAL		95.684.861	167.101.485	89,85	163.838.494	147.840.401	90,24

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain :

- Masih adanya wajib pajak tidak menyampaikan informasi tentang pindah alamat maupun tutup usaha, yang berdampak pada ketidak akuratan data pajak, sehingga menyulitkan operasional pendataan dilapangan.
- Masih ditemuinya wajib pajak menyampaikan data-data tempat usaha tidak secara lengkap.
- Masih ada pemasangan reklame dilapangan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme/ prosedur perizinan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.
- Terbatasnya tenaga tehnis (staf) dalam pendataan, penyampaian dan penagihan tunggakan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- Masih banyaknya piutang/Retribusi Daerah yang sulit ditagih karena sudah tutup usaha atau pindah alamat tanpa memberikan informasi.
- Belum adanya sistem komputerisasi yang online pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi menyebabkan pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.
- Kewajiban Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih kurang.

- Sanksi/punishment bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melalaikan kewajiban membayar Pajak/Retribusi belum optimal.

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga teknis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Untuk memperlancar penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi daerah sangat diperlukan sarana kendaraan roda dua.
- Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.
- Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
- Penerapan sanksi agar lebih tegas.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) bunga; (3) subsidi; (4) hibah; (5) bantuan sosial; (6) belanja bagi hasil; (7) bantuan keuangan; dan (8) belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang non jasa; dan (3) belanja modal.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Jambi.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas.
- Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.

- Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2020 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Jambi adalah sebesar Rp. 2.212.680.342.930,00 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 1.458.798.632.000,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp. 753.881.710.930,00. Jika dibanding dengan jumlah Anggaran Belanja tahun 2018 sebesar Rp. 1.846.258.216.875,00 maka tahun 2020 belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalami peningkatan.

Realisasi tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 dan target tahun 2020 serta Proyeksi Perubahan Tahun 2020, Belanja Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Jambi

No.	Uraian	Jumlah			
		Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Proyeksi Perubahan 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai	614.857.160.444	780.513.273.241	721.563.236.930	685.933.063.244
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
2.1.4	Belanja hibah	36.588.195.224	14.726.000.000	21.553.843.619	18.481.774.492
2.1.5	Belanja bantuan sosial	3.915.540.000	7.651.455.000	7.637.723.000	7.673.723.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	0	0	0	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	1.292.132.400	1.307.132.400	100.000.000	100.000.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	605.396.900	2.105.867.000	2.026.907.381	60.238.830.381
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	657.258.424.968	806.303.727.641	753.881.710.930	773.391.391.117
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai	59.749.332.455,00	66.138.355.995	64.787.962.108	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	415.787.045.628,24	523.039.125.378	567.399.452.976	
2.2.3	Belanja modal	445.809.162.048,96	450.777.007.861	826.611.216.916	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	921.345.540.132,20	1.039.954.489.234	1.458.798.632.000	1.035.154.595.326
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.578.603.965.100	1.846.258.216.875	2.212.680.342.930	1.808.545.986.443

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Untuk tahun 2020, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan rencana Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Sedangkan tidak terdapat pengeluaran pembiayaan Daerah.

Selama tahun 2017 dan 2018 pembiayaan di Kota Jambi untuk realisasi penerimaan pembiayaan masing-masing sebesar Rp. 134.489.386.517,00 dan Rp 131.650.797.287,90. Penerimaan pembiayaan dimaksud untuk menutupi defisit anggaran, dimana anggaran pendapatan lebih kecil bila dibanding dengan anggaran belanja.

Untuk realisasi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.169.148.041 dan untuk tahun 2018 sebesar Rp 5.000.000.000. Pengeluaran pembiayaan merupakan upaya pemanfaatan surplus realisasi anggaran tahun sebelumnya. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 serta proyeksi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Proyeksi Perubahan 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	131.650.797.287,90	172.924.144.899	67.173.120.000	211.176.919.411
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	400.000.000.000	

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Proyeksi Perubahan 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	131.650.797.287,90	172.924.144.899	467.173.120.000	211.176.919.411
3.2	Pengeluaran pembiayaan	0	0	0	0
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	5.000.000.000	0	0	0
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	0	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	127.320.238.476	172.924.144.899	467.173.120.000	211.176.919.411

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2020

Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto. Dalam APBD tahun anggaran 2020, pembiayaan netto ditargetkan Rp. 467.173.120.000,00 sedangkan realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 126.650.797.287,00.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Jambi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Peningkatan atas kualitas pelayanan publik. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Jambi sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu ***"MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA"***

Visi tersebut mengandung makna:

- Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional;
- Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- Berakhlak : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan peraturan – peraturan baik dari level pusat hingga daerah (PERDA), yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam hal kebencanaan preventif.

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan

dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target di dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan pada misi keempat diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sector perdagangan dan jasa, dalam hal ini menekankan pada penguatan UMKM, meningkatkan sumber-sumber pendapatan, meningkatkan peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah meliputi Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU dan Indikator Kinerja Kunci atau disingkat IKK. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, adapun IKK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.

Target Capaian IKU Kota Jambi tahun 2020 serta penyesuaian target akibat Pandemi COVID -19 dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.
Indikator Kinerja Utama Kota Jambi Tahun 2020

NO	INDIKATOR	TARGET 2020	PENYESUAIAN TARGET 2020 (AKIBAT COVID-19)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B
2	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	6%	6%
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	5.67	5.67
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52.39	52.39
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,39%	3,4-4,5% (optimis) 2-3% (moderat)
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.42	6.72
7	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	9%
8	Indeks Pembangunan Manusia	77.54	77.14

Tabel 4.2.
Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	OPD
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,55	DISKOMINFO SETDA
					Indeks Profesionalitas ASN	57.5	BKPSDMD BAPPEDA SETWAN SETDA DKP
					Nilai SAKIP	BB	SETDA BAPPEDA INSPEKTORAT
					Indeks persepsi anti Korupsi	3,69	BPKAD INSPEKTORAT
					Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	DPMPTSP DKPS KECAMATAN
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	80%	SATPOL PP
			Penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%	DISDAMKAR
		Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20%	BKBP
				Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	BKBP
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	60,77	DPUPR DISHUB DPRKP
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	38.3	DLH
				Indeks Kualitas Udara	80.72	DLH	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,70	DLH	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	OPD
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	52	DPP
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	91	DPKP
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,38%	DPK
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	BPPRD
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	430,5 M	DPMPTSP
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,25%	DTKK
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	8,54%	DTKK
					Persentase Daya Saing Produk IKM	5,35%	DPP
					Persentase koperasi berkualitas	19,27%	DTKK
				5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,61	DISDIK DKP				
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	17,32	DISDIK				
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,69	DISDIK					
Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,05	DPPKB				
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,46%	DPPKB				
Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,91				DPMPPA
		Indeks Pemberdayaan Gender	68,20				DPMPPA
Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	80%				DPMPPA
Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	61,43				DPMPPA
	Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	50,5	DISPORA			
Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	70	DINSOS			

4.2. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2020, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2020. Visi “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulat wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, keseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia yang menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, antara lain :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di

tahun 2020. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2020, antara lain antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2020 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Tema RKP Tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2020 adalah pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.. Rencana pembangunan nasional tahun 2020 dijabarkan dalam 5 prioritas nasional sebagai berikut:

- PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, yang dijabarkan lagi kedalam Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
- e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah yang dijabarkan lagi kedalam Program Prioritas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- d. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

PN 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, yang dijabarkan lagi kedalam Program Prioritas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 4. Ketahanan Pangan, Air, energi dan Lingkungan Hidup, yang dijabarkan lagi kedalam Program Prioritas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

PN 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, yang dijabarkan lagi kedalam Program Prioritas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.

- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2020

Tabel 4.3.
Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan	Indikator	Target
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan menengah dan luar biasa	Indeks Pembangunan Manusia	71,5
		Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat		
		Mendorong pembangunan Gender		
		Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3%
2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana	Share Sektor Sekunder	21,5%
		Peningkatan nilai tambah industri pengolahan	Total Factor Productivity	1.
		Meningkatkan nilai tambah jasa produktif		
		Menumbuh kembangkan riset teknologi untuk komoditas unggulan		
3	Peningkatan Konektivitas & Sarana Prasarana Wilayah	Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan	Jalan provinsi dalam kondisi mantap	78,93%
		Memperluas akses terhadap air minum layak	Akses terhadap air minum layak	75%
		Memperluas akses terhadap sanitasi layak	Akses terhadap sanitasi layak	75%
		Meningkatkan rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	95%
4	Pemantapan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Meningkatkan penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Ketersediaan Energi	1.
		Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka memperkuat akses pangan masyarakat		
		Meningkatkan peranan energi terbarukan dalam energi bauran	Peningkatan Pemanfaatan EBT	1.
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Tibumtranmas	Meningkatkan tata kelola layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Meningkatkan akuntabilitas	Indeks Demokrasi Indonesia	77
		Meningkatkan kemampuan ASN		
		Meningkatkan kamtibmas		

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2020

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2020 berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025 dan dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	1. Meningkatkan system manajemen logistic kebencanaan
		2. Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
		3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
		4. Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
		5. Menyiapkan program padat karya perbaikan lingkungan dan permukiman
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Mengembangkan minat baca masyarakat dan peningkatan pengelolaan kearsipan daerah
		2. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar
		3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas
		4. Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga
		5. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	1. Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan
		2. Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga
		3. Mendorong kewirausahaan dan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif serta memperkuat Koperasi
		4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis
		5. Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk local
		6. Meningkatkan partisipasi dan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan
		7. Memperkuat akses pemenuhan hak anak
		8. Meningkatkan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
		9. Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS
		10. Meningkatkan Pengendalian ketersediaan, distribusi bahan pangan dan juga keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan
		11. Mendorong percepatan rekonstruksi dan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	1. Mengembangkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya
		2. Mengembangkan fasilitas penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>)
		3. Memantapkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
5	Good Governance	1. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK
		2. Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN
		3. Memperkuat Akuntabilitas kinerja keuangan daerah
		4. Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan
		5. Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel
		6. Meningkatkan Koordinasi, Fasilitas dan kerjasama untuk memperkuat potensi dan kapasitas daerah
		7. Memperkuat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
		8. Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta efektivitas fasilitas orkemas dan parpol
		9. Mengoptimalkan pendapatan daerah

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2020 yang dituangkan dalam BAB V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

Mengenai penyajian matrik rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selengkapnya mengenai matrik Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2020

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja	Target	OPD
1	Pendidikan	Peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan	<p>Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF</p> <p>Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan pendidikan</p> <p>Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan kecakapan hidup</p> <p>Angka partisipasi kasar (APK) SD</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) SD</p> <p>Angka Partisipasi SD</p> <p>Rerata UAS SD</p> <p>Angka partisipasi kasar (APK) SMP</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP</p> <p>Angka Partisipasi SMP</p> <p>Rerata UN SMP</p> <p>Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional</p>	<p>APK PAUD usia 5-6 = 100%. usia 3-5 = 60%. usia 0-3 = 35%</p> <p>Paket A:60 Orang. Paket B:310 Orang. Paket C:408 Orang</p> <p>160 Orang</p> <p>114.50%</p> <p>97.90%</p> <p>100.70%</p> <p>60.65%</p> <p>99.30%</p> <p>72.30%</p> <p>83.80%</p> <p>51.40%</p> <p>93%</p>	DISDIK
2	Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan status puskesmas Yang Terakreditasi	8 Puskemas utama	DINKES

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja	Target	OPD
			Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan Sesuai Standar Minimal 85%.	30%	
			Indeks kepuasan masyarakat Pelayanan kesehatan rujukan	B	
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir	100%	
			Persentase pelayanan penyakit menular dan tidak menular	100%	
			Persentase Rumah Sakit pemerintah yang ter akreditasi	50%	
			Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional	100%	
			Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Kesehatan	100%	
			Persentase Pelayanan Imunisasi	100%	
			Persentase pelayanan gizi Masyarakat	100%	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	
			Cakupan pelayanan kesehatan Remaja	100%	
			Cakupan pelayanan kesehatan Lansia	100%	
			Persentase pencapaian Keluarga berPHBS	80%	
			Cakupan Kelurahan yang Melaksanakan STBM	70%	
			Persentase pelayanan Kesehatan olah raga dan kesehatan kerja di puskesmas	100%	
			Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi	100%	
			Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian	100%	

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja	Target	OPD
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	Rasio Cakupan Pelayanan air minum	69.39%	DPUPR
			Rasio Cakupan Pelayanan air limbah	1.56%	
			Rasio Bangunan dalam kondisi baik	64.46%	
		Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Ratio jalan status kota dalam kondisi baik	91.79%	
			Ratio jembatan dalam kondisi baik	97.30%	
			Rasio sistem jaringan drainase/sungai dalam kondisi baik	15.79%	
Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase/sungai	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan	84%			
Perencanaan Teknis ke PU-an	Rasio Kesesuaian Ruang	95.20%			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan	Persentase penanganan Luasan permukiman Kumuh dikawasan perkotaan	83%	DPRKP
			Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	
		Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	40%	
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat	Rasio Petugas perlindungan masyarakat	68%	SATPOL PP
			Penyelenggaraan Trantibum Serta Penegakan Regulasi Daerah	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	
		Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	74%
			Cakupan pelayanan kesiagaan dini	100%	DISDAMKAR

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja	Target	OPD
6	Sosial	Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan	100%	BKBP
			Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	100%	
		Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah	100%	
			Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan PMKS	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar	100%
		Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%		
		Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	100%		
7	Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peningkatan penanganan jumlah keluarga	100%	DTKK
			Persentase tenaga kerja terdaftar yang dilatih dan ditempatkan	7%	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan anak	Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang Harmonis	57%	DPMPPA
			Penurunan Ratio KDRT	0.02%	
			Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0.0227	
			Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	82%	

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja	Target	OPD
9	Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	89	DPKP
			Penurunan Pangan segar yang Tercemar	6	
10	Lingkungan Hidup	Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	78.16%	DLH
			Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat Sumber	12.73%	
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan	153	
		Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber daya alam	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	14%	
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	96%	DKPS
			cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	86.50%	
			validitas database kependudukan	89%	
			Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	33.30%	
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	77%	DPMPPA
			Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	66%	
			Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	77%	
			Persentase Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	94%	
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.05	DPPKB

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja	Target	OPD	
14	Perhubungan	Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96.46%	DISHUB	
			Capaian ruas jalan yang memenuhi standar Keselamatan	74%		
			Cakupan yang terlayani angkutan Umum	54.75%		
			Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	36 Titik		
15	Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase Pelayanan Perparkiran	80.74%	KOMINFO	
			Peningkatan akses dan kualitas informasi publik	Persentase Peningkatan ekosistem TIK		45%
			Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah	Cakupan akses dan kualitas informasi Publik		60%
			Manajemen data/informasi/statistik daerah	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang Diamankan		35%
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik Daerah	20%	DTKK	
			Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil		49.69%
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	57.33%	DTKK	
			Peningkatan realisasi investasi	Realisasi Investasi		430.5 M
18	Kepemudaan dan Olahraga	Program Pembinaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	50%	DISPORA	
			Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	73.33%		
19	Kebudayaan	Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Kebudayaan	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	5	DPK	

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja	Target	OPD
20	Perpustakaan	Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Pertahun	37836 Pengunjung	DKP
21	Kearsipan	Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip yang terselamatkan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1,200 36	DKP
22	Kelautan dan Perikanan				
23	Pariwisata	Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan PAD sektor pariwisata Lama Kunjungan wisata	500000 45.5M 3 hari	DPK
24	Pertanian	Peningkatan, Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/kapita/hari)	2,989	DPKP
25	Perdagangan	Pembinaan, Peningkatan, dan Pengawasan Perdagangan	Cakupan Bina Perdagangan	79 92.25%	DPP
26	Kehutanan				
27	Perindustrian	Pembinaan dan peningkatan Industri Kecil Menengah	Cakupan Bina IKM	5.35	DPP
28	Inspektorat	Peningkatan Sistem pengawasan internal, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	100%	INSPEKTORAT

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja	Target	OPD
29	Perencanaan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat Daerah Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	100% 100%	BAPPEDA
30	Keuangan	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Jumlah OPD dan BLUD yang mneyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK Jumlah OPD yang menyampaik an Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat Waktu Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	35 OPD 80% 40 OPD dan 11 BLUD 20 PD 9% 100% 63% 15%	BPKAD BPPRD
31	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Kebutuhan Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat Waktu Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan Pengendalian Persentase Penilaian Kinerja ASN	96% 89% 83% 87%	BKPSDMD

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja	Target	OPD
32	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non perijinan	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	46%	DPMPTSP
			Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN	27%	
33	Sekretariat Daerah	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekretariat daerah, Aparatur dan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86.75%	SETDA
		Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekretariat daerah, Aparatur dan Keprotokolan	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	80%	
		Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggaan	Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah Daerah	2 Telaah/ rekomendasi	
		Penataan Administrasi pemerintahan dan kewilayahan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	17.30%	
			Ketepatan waktu Penyampaian LPPD		
			Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	16%	
			Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	6 Kec	
		Penataan Peraturan Perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%	
			Presentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27.27%	
		Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	100%	
			Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	76.92%	
			Persentase Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	100%	

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja	Target	OPD
34	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian	75%	DPRD
		Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	38%	
			Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	30%	
			Rata-rata indeks pelayanan Publik	B	
		Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan dan kelembagaan Keagamaan	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	75%	
		Penyebarluasan Informasi	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	72.23%	
		Penyelenggaraan pemerintah daerah			
		Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tertib administrasi pembangunan	75%	
			Persentase Kinerja Kelembagaan Pengadaan	37.81%	
			Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program-program kerja DPRD	9 dok		
35	Kecamatan	Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	89%	KECAMATAN
		Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	75%	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	50%	
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	50%	

Alokasi Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 yang bersumber dana dari APBD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2020
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	APBD 2020	RENCANA PAGU PERUBAHAN TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan	4	48	123.113.000.000	122.281.769.574	DISDIK
2	Kesehatan	6	45	201.002.615.000	216.252.660.128	DINKES
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	29	686.400.000.000	299.513.518.000	DPUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	18	30.168.000.000	28.504.495.000	DPRKP
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	14	66	20.981.000.000	20.125.731.390	SATPOL PP DISDAMKAR BKBP
6	Sosial	4	27	5.835.000.000	4.445.773.250	DINSOS
7	Tenaga Kerja	4	19	3.689.545.250	2.860.907.050	DTKK
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	19	6.692.400.000	4.980.438.832	DPMPPA
9	Pangan	4	18	4.303.740.000	3.621.004.500	DPKP
10	Lingkungan Hidup	6	27	58.250.000.000	57.806.992.111	DLH
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	4	22	8.170.000.000	6.121.936.000	DKPS
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	4	2.474.600.000	1.446.997.600	DPMPPA
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	23	7.799.000.000	6.525.472.100	DPPKB
14	Perhubungan	6	23	17.637.000.000	14.859.280.900	DISHUB
15	Komunikasi dan Informatika	6	20	6.500.000.000	5.102.280.000	DISKOMINFO
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	5	1.507.454.750	848.648.250	DTKK
17	Penanaman Modal	4	19	3.892.633.000	2.817.232.000	DPMPPTSP
18	Kepemudaan dan Olahraga	4	20	8.814.000.000	5.219.624.516	DISPORA
19	Kebudayaan	4	17	3.340.550.000	2.438.010.800	DPK
20	Perpustakaan	4	16	3.607.859.925	2.883.727.925	DKP
21	Kearsipan	1	2	1.984.140.075	1.302.719.875	DKP
22	Kelautan dan Perikanan	0	0	2.031.010.000	1.865.377.250	DPKP
23	Pariwisata	1	4	5.491.450.000	3.682.904.000	DPK
24	Pertanian	1	8	1.816.250.000	1.057.686.500	DPKP
25	Perdagangan	4	26	6.743.995.000	5.431.556.200	DPP
26	Kehutanan	0	0	0	0	DLH
27	Perindustrian	1	6	2.533.390.000	1.696.249.500	DPP
28	Inspektorat	4	22	4.890.000.000	4.173.856.000	INSP
29	Perencanaan	6	22	6.782.000.000	5.128.520.000	BAPPEDA
30	Keuangan	8	51	21.185.632.000	20.160.641.692	BPKAD & BPPRD

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	APBD 2020	RENCANA PAGU PERUBAHAN TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
31	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	4	27	9.193.000.000	6.283.964.000	BKPSDMD
32	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	4	648.367.000	406.792.000	DPMPSTP
33	Sekretariat Daerah	13	48	54.700.000.000	49.105.174.325	SETDA
34	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4	25	45.734.000.000	44.019.249.000	SETWAN
35	Kecamatan	76	431	90.887.000.000	82.183.405.058	KECAMATAN
JUMLAH		223	1.161	1,458,798,632,000	1.035.154.595.326	

Berdasarkan pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2020, maka Rencana Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.3
Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2020

NO.	PRIORITAS DAERAH	OPD	ALOKASI SEBELUM COVID-19	ALOKASI SESUDAH COVID-19
1	<i>Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan</i>	DPUPR	686,400,000,000	299,513,518,000
		DPRKP	30,168,000,000	28,504,495,000
		DISDAMKAR	10,333,000,000	10,941,494,500
		DLH	58,250,000,000	57,806,992,111
		DISHUB	17,637,000,000	14,859,280,900
Jumlah Prioritas 1			802,788,000,000	411,625,780,511
2	<i>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</i>	DISDIK	123,113,000,000	122,281,769,574
		DINKES	201,002,615,000	216,252,660,128
		DPPKB	7,799,000,000	6,525,472,100
		DISPORA	8,814,000,000	5,219,624,516
		DKP	5,592,000,000	4,186,447,800
		BKPSDMD	9,193,000,000	6,283,964,000
Jumlah Prioritas 2			355,513,615,000	360,749,938,118
3	<i>Penganggulangan Kemiskinan</i>	DINSOS	5,835,000,000	4,445,773,250
		DTKK	5,197,000,000	3,709,555,300
		DPMPPA	9,167,000,000	6,427,436,432
		DPKP	8,151,000,000	6,544,068,250
		DPP	9,277,385,000	7,127,805,700
Jumlah Prioritas 3			37,627,385,000	28,254,638,932
4	<i>Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah</i>	DPMPSTP	4,541,000,000	3,224,024,000
		DPK	8,832,000,000	6,120,914,800
Jumlah Prioritas 4			13,373,000,000	9,344,938,800

NO.	PRIORITAS DAERAH	OPD	ALOKASI SEBELUM COVID-19	ALOKASI SESUDAH COVID-19
5	<i>Good Governance</i>	SATPOL PP	7,813,000,000	7,066,207,390
		DKPS	8,170,000,000	6,121,936,000
		DISKOMINFO	6,500,000,000	5,102,280,000
		INSPEKTORAT	4,890,000,000	4,173,856,000
		BAPPEDA	6,782,000,000	5,128,520,000
		BPKAD	13,367,632,000	14,735,049,692
		BPPRD	7,818,000,000	5,425,592,000
		SETDA	54,700,000,000	49,105,174,325
		SET. DPRD	45,734,000,000	44,019,249,000
		KECAMATAN	90,887,000,000	82,183,405,058
		BKBP	2,835,000,000	2,118,029,500
Jumlah Prioritas 5			249,496,632,000	225,179,298,965
TOTAL			1,458,798,632,000	1,035,154,595,326

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020 semester I (Bulan Mei 2020) serta akibat dari Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 yang mengharuskan semua OPD melakukan penyesuaian target kinerja akibat realokasi dan refocusing, sehingga banyak terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penyesuaian indikator kinerja kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2020 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

WALIKOTA JAMBI

DR. H. SYARIF FASHA, ME

Tabel 5.4
Rencana Perubahan Belanja OPD Tahun 2020 berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	PENDIDIKAN	DISDIK	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			38,500,000.00	38,500,000.00	0.00
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			401,500,000.00	401,500,000.00	0.00
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			1,076,946,000.00	1,076,946,000.00	0.00
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			1,607,762,800.00	1,493,926,800.00	(113,836,000.00)
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			185,375,000.00	185,375,000.00	0.00
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			62,500,000.00	62,500,000.00	0.00
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			348,947,520.00	293,374,520.00	(55,573,000.00)
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			576,667,200.00	576,667,200.00	0.00
			10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			267,055,000.00	255,055,000.00	(12,000,000.00)
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			85,604,000.00	46,800,000.00	(38,804,000.00)
			2	Perjalanan Dinas			174,950,000.00	43,000,000.00	(131,950,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			4,250,000.00	4,250,000.00	0.00
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			154,447,500.00	59,900,000.00	(94,547,500.00)
			4	Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan					
			1	Penyelenggara Akreditasi PAUD dan PNF			16,275,000.00	0.00	(16,275,000.00)
			2	Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum PAUD dan PNF			101,753,000.00	0.00	(101,753,000.00)
			3	Peningkatan Kelembagaan serta Sarana Prasarana PAUD dan PNF			894,768,000.00	894,768,000.00	0.00
			4	Pengelolaan bantuan Operasional PAUD			1,426,609,000.00	1,006,400,000.00	(420,209,000.00)
			5	Peningkatan Minat Bakat Peserta Didik PAUD dan PNF			372,444,000.00	0.00	(372,444,000.00)
			6	Penyelenggaraan Pengembangan PAUD dan PNF			142,713,000.00	0.00	(142,713,000.00)
			7	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan			433,305,000.00	379,700,000.00	(53,605,000.00)
			8	Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup			373,470,000.00	0.00	(373,470,000.00)
			9	Penyelenggaraan Akreditasi SD			27,185,000.00	27,185,000.00	0.00
			10	Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum SD			44,200,000.00	0.00	(44,200,000.00)
			11	Peningkatan Sarana Prasarana SD			19,819,133,980.00	19,799,182,905.00	(19,951,075.00)
			12	Pengembangan Kelembagaan SD			107,164,500.00	89,164,500.00	(18,000,000.00)
			13	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD			59,376,430,000.00	60,631,169,314.00	1,254,739,314.00
			14	Peningkatan Minat Bakat, Lomba Kreativitas dan Olahraga Peserta Didik SD			368,758,000.00	14,200,000.00	(354,558,000.00)
			15	Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Sekolah SD			261,667,000.00	146,875,000.00	(114,792,000.00)
			16	Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum SMP			80,825,000.00	55,925,000.00	(24,900,000.00)
			17	Peningkatan Sarana Prasarana SMP			6,649,300,000.00	6,649,800,000.00	500,000.00
			18	Pengembangan Kelembagaan SMP			119,325,000.00	0.00	(119,325,000.00)
			19	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SMP			25,538,880,000.00	27,222,349,335.00	1,683,469,335.00
			20	Peningkatan Minat Bakat, Lomba Kreativitas dan Olahraga Peserta Didik SMP			512,875,000.00	0.00	(512,875,000.00)
			21	Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Nasional SMP			77,750,000.00	54,150,000.00	(23,600,000.00)
			22	Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru			202,080,000.00	202,080,000.00	0.00
			23	Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Peserta Didik Berprestasi Tingkat Nasional			296,058,000.00	0.00	(296,058,000.00)
			24	Orientasi Calon Kepala Sekolah serta Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah			316,636,000.00	480,200,000.00	163,564,000.00
			25	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF			31,105,000.00	0.00	(31,105,000.00)
			26	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah dan Tenaga Perpustakaan SD			36,157,000.00	0.00	(36,157,000.00)
			27	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan dan Tenaga Laboratorium SMP			54,217,500.00	0.00	(54,217,500.00)
			28	Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Nasional			214,815,000.00	0.00	(214,815,000.00)
			29	Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru			46,326,000.00	46,326,000.00	0.00
			30	Penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS			71,225,000.00	0.00	(71,225,000.00)
			31	Rapat Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi			110,545,000.00	40,000,000.00	(70,545,000.00)

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
2	KESEHATAN	DINKES & RSUD	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			50,000,000.00	50,000,000.00	0.00		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1,748,246,500.00	1,603,246,500.00	(145,000,000.00)		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			948,740,000.00	948,740,000.00	0.00		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			5,147,744,000.00	5,589,702,477.00	421,958,477.00		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			374,115,000.00	299,973,808.00	(74,141,192.00)		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			90,000,000.00	90,000,000.00	0.00		
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			1,210,250,000.00	863,831,000.00	(346,419,000.00)		
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			481,340,000.00	481,340,000.00	0.00		
			9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			200,000,000.00	200,000,000.00	0.00		
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			126,000,000.00	126,000,000.00	0.00		
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			184,795,000.00	81,535,000.00	(103,260,000.00)		
			3	Perjalanan Dinas			530,000,000.00	380,000,000.00	(150,000,000.00)		
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah							
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			60,000,000.00	60,000,000.00	0.00		
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			102,264,650.00	72,104,650.00	(30,160,000.00)		
			4	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan							
			1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan			4,086,730,955.00	4,086,730,955.00	0.00		
			2	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit			447,615,000.00	333,165,000.00	(114,450,000.00)		
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar			1,492,896,000.00	7,609,358,500.00	6,116,462,500.00					
4	Kemitraan Asuransi Kesehatan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat			7,466,812,000.00	8,324,441,182.00	857,629,182.00					
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan			315,003,000.00	137,905,000.00	(177,098,000.00)					
6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional			187,360,000.00	77,778,000.00	(109,582,000.00)					
7	Penyuluhan dan Pengembangan Media Promosi Kesehatan serta Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			514,782,000.00	259,595,000.00	(255,187,000.00)					
8	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi			237,506,000.00	148,247,000.00	(89,259,000.00)					
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Anak, Remaja, Lansia dan Keluarga Berencana			1,204,824,200.00	1,074,760,700.00	(130,063,500.00)					
10	Penyehatan Lingkungan			362,900,000.00	397,506,200.00	34,606,200.00					
11	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga			159,300,000.00	81,774,000.00	(77,526,000.00)					
12	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			2,113,317,715.00	2,107,842,715.00	(5,475,000.00)					
13	Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa			1,121,837,463.00	837,159,955.00	(284,677,508.00)					
14	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) serta Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah			248,185,000.00	354,135,800.00	105,950,800.00					
15	Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu			14,135,321,034.00	13,906,040,234.00	(229,280,800.00)					
16	Pembangunan/Rehab Puskesmas/Pustu			2,230,000,000.00	2,230,000,000.00	0.00					
17	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK non Fisik)			10,041,208,000.00	13,886,658,000.00	3,845,450,000.00					
18	Dukungan Pelayanan BLUD			29,529,587,550.00	33,169,874,654.00	3,640,287,104.00					
19	Operasional RSUD H. Abdurrahman Sayoeti			22,627,391,664.00	22,227,336,664.00	(400,055,000.00)					
20	Pendidikan dan pengembangan mutu tenaga kesehatan			222,975,000.00	132,595,000.00	(90,380,000.00)					
21	Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Rujukan di Rumah Sakit yang Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang Berfokus Pada Kepuasan Pelanggan dan Keselamatan Pasien			90,988,567,269.00	94,028,282,134.00	3,039,714,865.00					
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			37,150,000.00	37,150,000.00	0.00		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			428,800,000.00	428,800,000.00	0.00		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			1,537,016,800.00	1,474,516,800.00	(62,500,000.00)		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			265,396,000.00	265,396,000.00	0.00		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			39,050,000.00	39,050,000.00	0.00		
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			590,800,000.00	590,800,000.00	0.00		
			10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			436,195,600.00	436,195,600.00	0.00		
2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			150,000,000.00	0.00	(150,000,000.00)					
2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			200,000,000.00	50,000,000.00	(150,000,000.00)					
3	Perjalanan Dinas			800,000,000.00	400,250,000.00	(399,750,000.00)					

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah							
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		
			4	Program Perencanaan Teknis Ke-Pu an							
			1	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Ke-PU an			8,349,826,000.00	10,693,050,750.00	2,343,224,750.00		
			2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			87,200,000.00	93,200,000.00	6,000,000.00		
			3	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			768,575,000.00	488,965,000.00	(279,610,000.00)		
			5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Drainase/Sungai							
			1	Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Drainase/Sungai dan Pengendalian Banjir			30,108,210,000.00	32,566,210,000.00	2,458,000,000.00		
			6	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan							
			1	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Permukiman Penduduk			8,524,548,000.00	9,192,612,000.00	668,064,000.00		
			2	Pengembangan Sistem Distribusi Jaringan Air Bersih/Air Minum			55,715,344,000.00	6,215,344,000.00	(49,500,000,000.00)		
			3	Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung/Utilitas Pemerintah			459,689,868,600.00	118,553,756,600.00	(341,136,112,000.00)		
			5	Peningkatan Operasional SPAL D			1,883,900,000.00	1,555,821,250.00	(328,078,750.00)		
			7	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan							
			1	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Status Kota			47,739,190,000.00	48,007,090,000.00	267,900,000.00		
			2	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Non Status Kota (Jalan Lingkungan)			63,683,631,000.00	63,647,440,000.00	(36,191,000.00)		
			3	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan			2,572,125,000.00	2,523,125,000.00	(49,000,000.00)		
			4	Peningkatan Operasional Peralatan dan Perbekalan			1,033,112,000.00	689,368,000.00	(343,744,000.00)		
			8	Program Fasilitasi, Koordinasi Pembinaan dan Keterpaduan Tata Ruang							
			1	Penataan Ruang Kota			1,415,562,000.00	1,310,021,000.00	(105,541,000.00)		
			2	Pengawasan Pemanfaatan Ruang			224,500,000.00	135,356,000.00	(89,144,000.00)		
			1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			25,425,000.00	25,425,000.00	0.00		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			204,596,500.00	204,596,500.00	0.00		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			345,460,000.00	345,460,000.00	0.00		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			492,551,400.00	480,051,400.00	(12,500,000.00)		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			82,280,000.00	82,280,000.00	0.00		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			25,000,000.00	20,000,000.00	(5,000,000.00)		
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			64,600,000.00	64,600,000.00	0.00		
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			351,601,000.00	351,601,000.00	0.00		
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			76,000,000.00	76,000,000.00	0.00					
2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			35,000,000.00	30,000,000.00	(5,000,000.00)					
3	Perjalanan Dinas			350,000,000.00	200,000,000.00	(150,000,000.00)					
3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah										
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			11,500,000.00	11,500,000.00	0.00					
2	Penyusunan Laporan Keuangan			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00					
3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			17,400,000.00	17,400,000.00	0.00					
4	Program Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan										
1	Penyelenggaraan, Penyediaan dan Penataan Perumahan			1,476,799,600.00	1,388,424,600.00	(88,375,000.00)					
5	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan										
1	Penyelenggaraan, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman			1,635,144,400.00	1,441,754,400.00	(193,390,000.00)					
6	Program Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum										
1	Pembangunan, Pemeliharaan dan Penataan Penerangan Jalan Umum			22,955,142,600.00	21,750,142,600.00	(1,205,000,000.00)					
2	Peningkatan Pelayanan Pemakaman dan Penataan TPU			2,009,499,500.00	2,005,259,500.00	(4,240,000.00)					
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATPOL PP	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			57,000,000.00	57,000,000.00	0.00		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			147,000,000.00	147,000,000.00	0.00		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			210,000,000.00	210,000,000.00	0.00		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			43,200,000.00	43,200,000.00	0.00		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			34,500,000.00	34,500,000.00	0.00		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			86,000,000.00	50,090,100.00	(35,909,900.00)					

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional		576,800,000.00	546,800,000.00	(30,000,000.00)
				10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor		85,000,000.00	35,000,000.00	(50,000,000.00)
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			193,104,000.00	193,104,000.00	0.00
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			81,000,000.00	0.00	(81,000,000.00)
			3	Perjalanan Dinas			225,258,800.00	119,764,090.00	(105,494,710.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			8,500,000.00	7,000,000.00	(1,500,000.00)
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			35,000,000.00	0.00	(35,000,000.00)
			4	Program Penyelenggaraan Trantibum, Serta Penegakan Regulasi Daerah					
			1	Sosialisasi, pengawasan, penyidikan, dan penegakan Regulasi Daerah			4,620,918,400.00	4,522,918,400.00	(98,000,000.00)
			2	Pengamanan dan pengawalan dan penertiban serta penyusunan, pendataan dan pemetaan rawan trantibum dan tranmas			610,000,000.00	610,000,000.00	0.00
			5	Program Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat					
			1	Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pencitraan satuan Polisi Pamong Praja			200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
			2	Pendataan, Pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat			578,718,800.00	268,830,800.00	(309,888,000.00)
		DISDAMKAR	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			68,500,000.00	68,500,000.00	0.00
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			225,000,000.00	225,000,000.00	0.00
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			230,000,000.00	230,000,000.00	0.00
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			60,640,000.00	58,640,000.00	(2,000,000.00)
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			49,000,000.00	49,000,000.00	0.00
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			241,439,000.00	192,439,000.00	(49,000,000.00)
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			362,400,000.00	362,400,000.00	0.00
			10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			69,100,000.00	15,600,000.00	(53,500,000.00)
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			357,530,000.00	357,530,000.00	0.00
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			54,300,000.00	0.00	(54,300,000.00)
			3	Perjalanan Dinas			365,000,000.00	155,500,000.00	(209,500,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			5,750,000.00	5,750,000.00	0.00
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			75,828,000.00	0.00	(75,828,000.00)
			4	Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan					
			1	Bimbingan Teknis, Diklat dan Sosialisasi Penanganan Bencana			92,670,000.00	74,136,000.00	(18,534,000.00)
			2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan kebakaran			16,500,000.00	16,500,000.00	0.00
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan			3,761,115,000.00	5,015,265,000.00	1,254,150,000.00
			4	Pengadaan Logistik Mitigasi Bencana			20,315,000.00	20,315,000.00	0.00
			5	Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan			334,100,000.00	334,100,000.00	0.00
			6	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			2,570,000.00	2,570,000.00	0.00
			7	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran			454,175,000.00	355,402,500.00	(98,772,500.00)
			8	Kemitraan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan			27,900,000.00	27,900,000.00	0.00
			9	Rekrutmen Tenaga Sukarela Penanggulangan Bencana			3,204,047,000.00	3,134,547,000.00	(69,500,000.00)
			10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebencanaan			200,750,000.00	200,750,000.00	0.00
			11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			9,721,000.00	0.00	(9,721,000.00)
			12	Penyusunan Norma, Strandar, Pedoman dan Manual Kebencanaan			14,650,000.00	14,650,000.00	0.00
			13	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam			16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
		BKBP	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			11,860,000.00	11,860,000.00	0.00
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			66,650,000.00	66,650,000.00	0.00
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			208,288,000.00	208,288,000.00	0.00
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			259,294,000.00	255,974,000.00	(3,320,000.00)
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			78,000,000.00	68,000,000.00	(10,000,000.00)
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			144,712,000.00	70,200,000.00	(74,512,000.00)
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			218,100,000.00	218,100,000.00	0.00

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
6	SOSIAL	DINSOS	2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			38,750,000.00	38,750,000.00	0.00			
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)			
						3	Perjalanan Dinas			350,000,000.00	189,500,000.00	(160,500,000.00)
						3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
						1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			9,200,000.00	9,200,000.00	0.00
						2	Penyusunan Laporan Keuangan			6,550,000.00	6,550,000.00	0.00
						4	Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					
						1	Fasilitasi, Pemantauan dan Pengendalian Keamanan			100,000,000.00	39,845,000.00	(60,155,000.00)
						2	Peningkatan ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi			100,000,000.00	83,360,000.00	(16,640,000.00)
						3	Pembinaan dan Pengembangan ideologi dan wawasan kebangsaan			261,280,000.00	166,648,500.00	(94,631,500.00)
						4	Pembinaan Karakter dan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			447,316,000.00	352,766,000.00	(94,550,000.00)
						5	Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Bagi Orkemas dan Parpol					
						1	Koordinasi, Pemantauan Situasi dan Pendidikan Politik			168,364,500.00	136,002,000.00	(32,362,500.00)
						2	Pembinaan Pertanggung-jawaban Bantuan Keuangan bagi Parpol			31,635,500.00	25,061,000.00	(6,574,500.00)
						3	Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian Orkemas			300,000,000.00	151,275,000.00	(148,725,000.00)
						1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
						1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			29,000,000.00	29,000,000.00	0.00
						2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
						3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			184,000,000.00	184,000,000.00	0.00
						4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			434,529,600.00	411,309,600.00	(23,220,000.00)
						5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
						6	Penyediaan Makanan dan Minuman			40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
						7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			290,000,000.00	290,000,000.00	0.00
						9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			350,000,000.00	350,000,000.00	0.00
						10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			78,270,400.00	78,270,400.00	0.00
						2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
						1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			42,000,000.00	42,000,000.00	0.00
						2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)
						3	Perjalanan Dinas			300,000,000.00	140,510,000.00	(159,490,000.00)
						3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
						1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			12,500,000.00	12,500,000.00	0.00
						2	Penyusunan Laporan Keuangan			5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			4,200,000.00	4,200,000.00	0.00			
			4	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial								
			1	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat			600,000,000.00	540,770,000.00	(59,230,000.00)			
			2	Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)			750,000,000.00	553,425,250.00	(196,574,750.00)			
			3	Pemberdayaan dan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)			250,000,000.00	177,490,000.00	(72,510,000.00)			
			4	Pembinaan dan pelayanan sosial bagi orang terlantar			150,000,000.00	150,000,000.00	0.00			
			5	Pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak yang bermasalah sosial dan lansia			425,000,000.00	315,878,000.00	(109,122,000.00)			
			6	Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial			400,000,000.00	282,970,000.00	(117,030,000.00)			
			7	Pelayanan dan rehabilitasi disabilitas, korban napza			200,000,000.00	87,550,000.00	(112,450,000.00)			
			8	Pelayanan dan pembinaan kepehlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial			175,000,000.00	112,030,000.00	(62,970,000.00)			
			9	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial			50,000,000.00	50,000,000.00	0.00			
			10	Pendataan dan informasi fakir miskin			165,000,000.00	165,000,000.00	0.00			
			11	Penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin			450,000,000.00	0.00	(450,000,000.00)			
			12	Pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin			85,000,000.00	73,370,000.00	(11,630,000.00)			
7	TENAGA KERJA	DTKK	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran								
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			11,250,000.00	11,250,000.00	0.00			
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			247,500,000.00	247,500,000.00	0.00			
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			219,904,000.00	219,904,000.00	0.00			
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			420,609,800.00	406,014,700.00	(14,595,100.00)			
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			111,801,450.00	111,801,450.00	0.00			
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			26,000,000.00	26,000,000.00	0.00			
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			327,150,000.00	209,900,000.00	(117,250,000.00)			
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			295,700,000.00	290,700,000.00	(5,000,000.00)			
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			36,400,000.00	36,400,000.00	0.00			
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			120,000,000.00	16,106,900.00	(103,893,100.00)			

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DPMPPA	3	3	Perjalanan Dinas		460,000,000.00	229,500,000.00	(230,500,000.00)
				3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah				
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		16,500,000.00	16,500,000.00	0.00
				2	Penyusunan Laporan Keuangan		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
				3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi		66,600,000.00	66,600,000.00	0.00
				4	Program Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja				
				1	Pemberian Fasilitas dan Pengadaan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat		560,000,000.00	560,000,000.00	0.00
				2	Penyusunan dan Perluasan Informasi Tenaga Kerja		290,130,000.00	64,705,000.00	(225,425,000.00)
				3	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		366,450,000.00	324,775,000.00	(41,675,000.00)
				4	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		103,550,000.00	13,250,000.00	(90,300,000.00)
				1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran				
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan		17,716,000.00	17,716,000.00	0.00
				2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		272,155,200.00	272,155,200.00	0.00
				3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset		297,360,700.00	301,828,700.00	4,468,000.00
				4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran		1,268,698,400.00	1,235,698,400.00	(33,000,000.00)
				5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan		45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
				6	Penyediaan Makanan dan Minuman		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor		168,172,826.00	116,729,620.00	(51,443,206.00)
				9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional		272,620,360.00	272,620,360.00	0.00
				10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor		50,500,000.00	50,500,000.00	0.00
				2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
				1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
				2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus		35,000,000.00	0.00	(35,000,000.00)
3	Perjalanan Dinas		430,867,964.00	258,325,502.00	(172,542,462.00)				
3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00				
2	Penyusunan Laporan Keuangan		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00				
3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi		54,880,000.00	54,880,000.00	0.00				
4	Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak								
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		1,032,570,000.00	694,210,000.00	(338,360,000.00)				
2	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		522,000,000.00	281,775,000.00	(240,225,000.00)				
3	UPTD Perlindungan Perempuan & Anak (PPA)		125,000,000.00	99,571,500.00	(25,428,500.00)				
4	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		1,993,858,550.00	1,173,428,550.00	(813,350,000.00)				
9	PANGAN	DPKP	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan		45,200,000.00	45,200,000.00	0.00
				2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		325,020,000.00	325,020,000.00	0.00
				3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset		305,892,000.00	286,692,000.00	(19,200,000.00)
				4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran		940,969,600.00	947,049,600.00	6,080,000.00
				5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan		105,114,400.00	105,114,400.00	0.00
				6	Penyediaan Makanan dan Minuman		23,000,000.00	23,000,000.00	0.00
				7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor		168,031,000.00	164,031,000.00	(4,000,000.00)
				9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional		770,160,000.00	770,160,000.00	0.00
				10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor		10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)
				2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
				1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya		128,500,000.00	128,500,000.00	0.00
				2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus		189,553,000.00	100,990,000.00	(88,563,000.00)
				3	Perjalanan Dinas		416,600,000.00	303,155,000.00	(113,445,000.00)
				3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah				
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
				2	Penyusunan Laporan Keuangan		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
				3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi		15,600,000.00	15,600,000.00	0.00
				4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani				
				1	Pengembangan Diversifikasi dan Keamanan Pangan		422,500,000.00	187,837,500.00	(234,662,500.00)
				2	Pengembangan Cadangan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan		315,600,000.00	139,055,000.00	(176,545,000.00)
				3	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan		100,000,000.00	57,600,000.00	(42,400,000.00)

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
10	LINGKUNGAN HIDUP	DLH	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			194,693,500.00	194,693,500.00	0.00
			2	2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			379,493,500.00	379,493,500.00	0.00
			3	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			346,802,200.00	346,802,200.00	0.00
			4	4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			1,329,850,800.00	1,352,638,800.00	22,788,000.00
			5	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			150,973,330.00	132,430,791.00	(18,542,539.00)
			6	6 Penyediaan Makanan dan Minuman			84,000,000.00	57,000,000.00	(27,000,000.00)
			7	7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			181,968,520.00	198,468,520.00	16,500,000.00
			9	9 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			205,060,000.00	205,060,000.00	0.00
			10	10 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			274,900,000.00	274,900,000.00	0.00
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			108,750,000.00	108,750,000.00	0.00
			2	2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			74,642,500.00	74,642,500.00	0.00
			3	3 Perjalanan Dinas			500,000,000.00	270,000,000.00	(230,000,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
			2	2 Penyusunan Laporan Keuangan			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
			3	3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			155,000,000.00	105,000,000.00	(50,000,000.00)
			4	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					
			1	1 Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Serta Kerusakan Lingkungan			625,500,000.00	590,300,000.00	(35,200,000.00)
			2	2 Pengujian Kadar Polusi limbah padat dan limbah cair			975,000,000.00	756,100,000.00	(218,900,000.00)
			3	3 Pengkajian dampak lingkungan			739,325,000.00	387,075,000.00	(352,250,000.00)
			4	4 Penegakan hukum lingkungan			193,000,000.00	100,350,000.00	(92,650,000.00)
			5	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam					
			1	1 Pengendalian dampak perubahan iklim			550,000,000.00	175,489,000.00	(374,511,000.00)
			2	2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau			8,018,318,000.00	7,176,510,000.00	(841,808,000.00)
			3	3 Pengelolaan Hutan Kota			1,500,000,000.00	1,229,480,000.00	(270,520,000.00)
			6	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah					
			1	1 Pengurangan Sampah dan Peningkatan Kinerja Bank Sampah			2,058,007,500.00	1,209,107,500.00	(848,900,000.00)
			2	2 Peningkatan Kinerja Penanganan Sampah			15,083,239,750.00	15,031,273,750.00	(51,966,000.00)
			3	3 Peningkatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3			192,850,000.00	171,600,000.00	(21,250,000.00)
			4	4 Peningkatan Pengelolaan Angkutan dan Mobilisasi			14,733,151,000.00	20,006,550,400.00	5,273,399,400.00
			5	5 Peningkatan Kinerja Operasional TPA Talang Gulo			9,585,474,400.00	7,263,276,650.00	(2,322,197,750.00)
11	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DKPS	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			22,400,000.00	22,400,000.00	0.00
			2	2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			320,600,000.00	320,600,000.00	0.00
			3	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			207,976,000.00	207,976,000.00	0.00
			4	4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			902,530,000.00	877,062,000.00	(25,468,000.00)
			5	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			197,942,000.00	197,942,000.00	0.00
			6	6 Penyediaan Makanan dan Minuman			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
			7	7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			1,003,853,000.00	935,853,000.00	(68,000,000.00)
			9	9 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			1,123,500,000.00	263,600,000.00	(859,900,000.00)
			10	10 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			185,000,000.00	185,000,000.00	0.00
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			69,000,000.00	69,000,000.00	0.00
			2	2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			10,000,000.00	18,000,000.00	8,000,000.00
			3	3 Perjalanan Dinas			280,000,000.00	134,000,000.00	(146,000,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
			2	2 Penyusunan Laporan Keuangan			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
			3	3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			170,000,000.00	130,000,000.00	(40,000,000.00)
			4	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
			1	1 Pelatihan tenaga pengelola SIAK			69,200,000.00	0.00	(69,200,000.00)
			2	2 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			147,715,000.00	101,600,000.00	(46,115,000.00)
			3	3 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil			114,845,000.00	111,845,000.00	(3,000,000.00)
			4	4 Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan			166,815,000.00	50,200,000.00	(116,615,000.00)
			5	5 Pemutakhiran Data Kependudukan			795,100,000.00	307,000,000.00	(488,100,000.00)
			6	6 Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			229,000,000.00	150,000,000.00	(79,000,000.00)
			7	7 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (DAK)			2,121,524,000.00	2,006,858,000.00	(114,666,000.00)

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
12	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DPMPPA	1	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat					
			1	Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)			1,787,000,000.00	970,280,000.00	(816,720,000.00)
			2	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			120,050,000.00	19,625,000.00	(100,425,000.00)
			3	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			367,550,000.00	357,550,000.00	(10,000,000.00)
			4	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan TTG			200,000,000.00	99,542,600.00	(100,457,400.00)
13	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DPPKB	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			153,360,000.00	153,360,000.00	0.00
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			180,620,000.00	180,620,000.00	0.00
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			909,580,000.00	909,580,000.00	0.00
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			127,305,750.00	74,487,000.00	(52,818,750.00)
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			19,950,000.00	0.00	(19,950,000.00)
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			142,178,800.00	87,178,800.00	(55,000,000.00)
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			513,529,200.00	513,529,200.00	0.00
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			63,000,000.00	63,000,000.00	0.00
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			25,000,000.00	0.00	(25,000,000.00)
			3	Perjalanan Dinas			350,000,000.00	113,468,600.00	(236,531,400.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			55,000,000.00	0.00	(55,000,000.00)
			4	Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
			1	Pembinaan dan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi			197,180,000.00	52,330,000.00	(144,850,000.00)
			2	Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat serta KIE			164,126,250.00	87,890,000.00	(76,236,250.00)
			3	Bantuan Operasional KB			2,982,682,000.00	2,717,978,000.00	(264,704,000.00)
			4	Pembinaan dan Operasional Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			285,270,000.00	58,445,000.00	(226,825,000.00)
			5	Pengendalian penduduk dan pengembangan data/informasi			301,018,000.00	192,405,500.00	(108,612,500.00)
			6	Pengadaan barang dan jasa/konstruksi (DAK)			1,296,200,000.00	1,296,200,000.00	0.00
14	PERHUBUNGAN	DISHUB	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			109,350,000.00	109,350,000.00	0.00
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			310,200,000.00	310,200,000.00	0.00
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			409,380,000.00	409,380,000.00	0.00
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			914,962,000.00	893,962,000.00	(21,000,000.00)
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			138,250,000.00	128,400,000.00	(9,850,000.00)
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			70,416,000.00	49,291,200.00	(21,124,800.00)
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			412,050,000.00	361,500,000.00	(50,550,000.00)
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			627,000,000.00	591,000,000.00	(36,000,000.00)
			10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			173,200,000.00	87,511,500.00	(85,688,500.00)
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			488,350,000.00	488,350,000.00	0.00
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			150,000,000.00	25,000,000.00	(125,000,000.00)
			3	Perjalanan Dinas			475,000,000.00	306,505,200.00	(168,494,800.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
			4	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan					
			1	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Perhubungan			3,791,882,000.00	3,300,400,000.00	(491,482,000.00)
			2	Perencanaan dan Peningkatan Pelayanan Angkutan			3,565,092,000.00	2,675,536,000.00	(889,556,000.00)
			3	Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan, dan Standar Perhubungan			203,500,000.00	153,500,000.00	(50,000,000.00)
			5	Program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas					
			1	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas			1,203,432,000.00	1,070,788,000.00	(132,644,000.00)
			2	Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan dan Angkutan Jalan			652,418,000.00	590,858,000.00	(61,560,000.00)
			3	Sosialisasi dan bimbingan peraturan lalulintas dan angkutan jalan			234,000,000.00	30,000,000.00	(204,000,000.00)
			6	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran					
			1	Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi			784,000,000.00	589,500,000.00	(194,500,000.00)
			2	Perencanaan dan Peningkatan sarana dan prasarana parkir			1,215,920,000.00	1,215,920,000.00	0.00
			3	Penertiban dan penataan parkir			1,694,098,000.00	1,457,829,000.00	(236,269,000.00)

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
15	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISKOMINFO	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			17,950,000.00	17,950,000.00	0.00		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			204,000,000.00	129,580,000.00	(74,420,000.00)		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			206,548,000.00	169,777,000.00	(36,771,000.00)		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			246,850,000.00	257,370,000.00	10,520,000.00		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			75,000,000.00	31,000,000.00	(44,000,000.00)		
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			88,500,000.00	78,500,000.00	(10,000,000.00)		
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			361,700,000.00	329,700,000.00	(32,000,000.00)		
			10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			200,000,000.00	200,000,000.00	0.00		
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			61,540,000.00	60,750,000.00	(790,000.00)		
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			200,000,000.00	42,330,000.00	(157,670,000.00)		
			3	Perjalanan Dinas			500,000,000.00	210,081,000.00	(289,919,000.00)		
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah							
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			5,400,000.00	5,400,000.00	0.00		
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			2,250,000.00	2,250,000.00	0.00		
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			75,000,000.00	70,000,000.00	(5,000,000.00)		
			4	Program Peningkatan Akses Dan Kualitas Informasi Publik							
			1	Tata Kelola Teknologi Informatika dan Komunikasi			289,430,000.00	201,460,000.00	(87,970,000.00)		
			2	Pengelolaan Aplikasi Informatika			3,147,912,000.00	2,692,286,000.00	(455,626,000.00)		
3	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			623,046,000.00	481,596,000.00	(141,450,000.00)					
5	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah										
1	Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi			74,124,000.00	25,000,000.00	(49,124,000.00)					
6	Program Manajemen Data / Informasi / Statistik Daerah										
1	Pengkoordinasian Pelaksanaan Survey, Verifikasi, Kompilasi dan Diseminasi Data Statistik			40,750,000.00	17,250,000.00	(23,500,000.00)					
16	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DTKK	1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							
			1	Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi			165,954,750.00	19,654,750.00	(146,300,000.00)		
			2	Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah			250,000,000.00	250,000,000.00	0.00		
			3	Penguatan pemasaran bagi produk UMKM			392,500,000.00	148,100,000.00	(244,400,000.00)		
			2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi							
			1	Pembinaan, Pengembangan dan pengawasan koperasi			662,000,000.00	413,500,000.00	(248,500,000.00)		
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			37,000,000.00	17,393,500.00	(19,606,500.00)					
17	PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			15,500,000.00	15,500,000.00	0.00		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			396,700,000.00	391,700,000.00	(5,000,000.00)		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			216,384,000.00	216,384,000.00	0.00		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			705,885,000.00	652,143,000.00	(53,742,000.00)		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			181,000,000.00	169,250,000.00	(11,750,000.00)		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			42,446,000.00	34,446,000.00	(8,000,000.00)		
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			339,850,000.00	297,850,000.00	(42,000,000.00)		
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			458,522,000.00	199,800,000.00	(258,722,000.00)		
			10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			237,134,000.00	237,134,000.00	0.00		
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			175,000,000.00	38,680,000.00	(136,320,000.00)		
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			75,000,000.00	0.00	(75,000,000.00)		
			3	Perjalanan Dinas			359,188,000.00	160,931,000.00	(198,257,000.00)		
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah							
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			11,000,000.00	11,000,000.00	0.00		
3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			90,000,000.00	0.00	(90,000,000.00)					
4	Program Peningkatan Realisasi Investasi										
1	Pengembangan potensi unggulan daerah			163,844,000.00	44,494,000.00	(119,350,000.00)					
2	Penyusunan Rencana Penanaman Modal Daerah			123,055,000.00	60,795,000.00	(62,260,000.00)					
3	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			96,525,000.00	96,525,000.00	0.00					
4	Pengelolaan Sistem Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Secara Elektronik			185,600,000.00	170,600,000.00	(15,000,000.00)					

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
18	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DISPORA	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			121,500,000.00	121,500,000.00	0.00		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			211,680,000.00	211,680,000.00	0.00		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			309,370,000.00	302,870,000.00	(6,500,000.00)		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			160,000,000.00	160,000,000.00	0.00		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			30,000,000.00	30,000,000.00	0.00		
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			131,000,000.00	131,000,000.00	0.00		
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			190,000,000.00	190,000,000.00	0.00		
			10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			25,000,000.00	25,000,000.00	0.00		
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			33,800,000.00	33,800,000.00	0.00		
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		
			3	Perjalanan Dinas			358,946,880.00	244,612,816.00	(114,334,064.00)		
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah							
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
			4	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan							
			1	Pembinaan Kepemudaan			1,213,458,250.00	1,045,418,750.00	(168,039,500.00)		
2	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat			908,301,500.00	875,301,500.00	(33,000,000.00)					
3	Pemassalan Olahraga			4,651,506,920.00	1,421,005,000.00	(3,230,501,920.00)					
4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga			7,750,000.00	7,750,000.00	0.00					
5	Peningkatan Pembangunan Sarpras Olahraga dan Pemuda			397,686,450.00	355,686,450.00	(42,000,000.00)					
19	KEBUDAYAAN	DPK	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			22,824,000.00	22,824,000.00	0.00		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			84,000,000.00	84,000,000.00	0.00		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			183,544,500.00	183,544,500.00	0.00		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			336,062,000.00	320,882,000.00	(15,180,000.00)		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			51,860,000.00	51,860,000.00	0.00		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			25,000,000.00	25,000,000.00	0.00		
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			239,780,000.00	239,780,000.00	0.00		
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			441,694,500.00	234,694,500.00	(207,000,000.00)		
			10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			50,000,000.00	50,000,000.00	0.00		
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			41,000,000.00	41,000,000.00	0.00		
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			25,000,000.00	25,000,000.00	0.00		
			3	Perjalanan Dinas			343,550,000.00	159,190,800.00	(184,359,200.00)		
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah							
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			77,485,000.00	77,485,000.00	0.00		
			4	Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Kebudayaan							
			1	Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah			1,343,750,000.00	847,750,000.00	(496,000,000.00)		
2	Penyusunan Profil Seni Budaya			65,000,000.00	65,000,000.00	0.00					
20	PERPUSTAKAAN	DKP	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			17,600,000.00	17,600,000.00	0.00		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			339,510,000.00	336,868,000.00	(2,642,000.00)		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			191,302,800.00	191,152,800.00	(150,000.00)		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			694,103,200.00	675,103,200.00	(19,000,000.00)		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			39,010,875.00	35,110,875.00	(3,900,000.00)		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			35,000,000.00	31,500,000.00	(3,500,000.00)		
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			239,441,800.00	236,121,800.00	(3,320,000.00)		
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			315,000,000.00	315,000,000.00	0.00		
			10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			335,140,000.00	0.00	(335,140,000.00)		
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			55,200,000.00	55,200,000.00	0.00		
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			100,000,000.00	66,000,000.00	(34,000,000.00)		
3	Perjalanan Dinas			292,350,000.00	131,870,000.00	(160,480,000.00)					

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
21	KEARSIPAN	DKP	3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah							
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			2,700,000.00	2,700,000.00	0.00		
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			872,150.00	872,150.00	0.00		
			4	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan							
			1	Pengembangan koleksi perpustakaan, layanan dan pelestarian bahan pustaka			626,863,700.00	591,863,700.00	(35,000,000.00)		
			2	Pembinaan pengembangan perpustakaan, kerjasama dan pembudayaan gemar membaca			323,765,400.00	196,765,400.00	(127,000,000.00)		
22	KELAUTAN DAN PERIKANAN	DPKP	1	Program peningkatan produksi, Mutu produk, dan Diversifikasi Sektor pertanian, Peternakan dan Perikanan							
			1	Pengembangan Agribisnis Perikanan			415,000,000.00	249,367,250.00	(165,632,750.00)		
23	PARIWISATA	DPK	2	Pengembangan Perbenihan Ikan			1,616,010,000.00	1,616,010,000.00	0.00		
			1	Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Pariwisata							
			1	Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah			4,131,835,000.00	2,777,460,000.00	(1,354,375,000.00)		
			2	Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah			1,118,000,000.00	824,444,000.00	(293,556,000.00)		
			3	Monitoring dan Evaluasi Kepariwisataaan			35,000,000.00	0.00	(35,000,000.00)		
			4	Perencanaan Pengembangan Pariwisata Daerah			206,615,000.00	81,000,000.00	(125,615,000.00)		
			24	PERTANIAN	DPKP	1	Program peningkatan produksi, Mutu produk, dan Diversifikasi Sektor pertanian, Peternakan dan Perikanan				
			1	Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura				548,000,000.00	321,290,000.00	(226,710,000.00)	
2	Peningkatan Jumlah Bibit Buah Bersertifikat			237,000,000.00		154,664,000.00	(82,336,000.00)				
3	Pengembangan Agribisnis Peternakan			427,850,000.00		268,798,500.00	(159,051,500.00)				
4	Pengembangan Rumah Potong Hewan			180,400,000.00		132,224,000.00	(48,176,000.00)				
5	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan			100,000,000.00		63,500,000.00	(36,500,000.00)				
25	PERDAGANGAN	DPP	6	Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian			323,000,000.00	117,210,000.00	(205,790,000.00)		
			1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			21,000,000.00	21,000,000.00	0.00		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			477,000,000.00	417,000,000.00	(60,000,000.00)		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			262,468,000.00	262,468,000.00	0.00		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			1,763,670,800.00	1,573,494,800.00	(190,176,000.00)		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			126,830,000.00	116,143,700.00	(10,686,300.00)		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			66,658,700.00	61,658,700.00	(5,000,000.00)		
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			285,500,000.00	265,500,000.00	(20,000,000.00)		
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			383,600,000.00	360,000,000.00	(23,600,000.00)		
			10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			533,720,000.00	319,720,000.00	(214,000,000.00)		
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			176,000,000.00	176,000,000.00	0.00		
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			31,000,000.00	0.00	(31,000,000.00)		
			3	Perjalanan Dinas			687,500,000.00	382,500,000.00	(305,000,000.00)		
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah							
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			14,650,000.00	14,650,000.00	0.00		
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
			4	Program Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Perdagangan							
			1	Peningkatan Penagihan dan Penerimaan Retribusi Pasar			100,000,000.00	100,000,000.00	0.00		
			2	Penyelenggaraan Pendataan Objek Retribusi Pasar			80,000,000.00	50,960,000.00	(29,040,000.00)		
			3	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Pasar			12,237,500.00	10,000,000.00	(2,237,500.00)		
			4	Penertiban dan Pengawasan Pedagang Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah			370,000,000.00	251,350,000.00	(118,650,000.00)		
			5	Pemantauan Distribusi Barang			416,425,000.00	16,765,000.00	(399,660,000.00)		
			6	Pembinaan Pengawasan dan Peningkatan Pelaku Usaha Formal			41,335,000.00	36,535,000.00	(4,800,000.00)		
			7	Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen			23,500,000.00	15,725,000.00	(7,775,000.00)		
			8	Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrolgian			67,400,000.00	67,400,000.00	0.00		
			9	Pelatihan, Sosialisasi, Seminar dan Penyuluhan Perdagangan			152,000,000.00	65,790,000.00	(86,210,000.00)		
10	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			50,000,000.00	50,000,000.00	0.00					
11	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan			600,000,000.00	795,396,000.00	195,396,000.00					

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
26	KEHUTANAN PERINDUSTRIAN	DLH DPP	1	Program Pembinaan dan Peningkatan Industri Kecil Menengah						
27			1	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan			125,000,000.00	62,170,000.00	(62,830,000.00)	
			2	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Kerajinan			72,100,000.00	72,100,000.00	0.00	
			3	Peningkatan, Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah			99,100,000.00	0.00	(99,100,000.00)	
			4	Peningkatan dan Pengembangan Kemasan IKM			117,500,000.00	70,390,000.00	(47,110,000.00)	
			5	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta			1,500,000,000.00	1,115,499,500.00	(384,500,500.00)	
			6	Promosi/Pameran Produk Jambi			619,690,000.00	376,090,000.00	(243,600,000.00)	
28	INSPEKTORAT	INSP	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran						
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			124,375,000.00	124,375,000.00	0.00	
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			177,860,000.00	177,000,000.00	(860,000.00)	
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			175,695,000.00	168,695,000.00	(7,000,000.00)	
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			161,690,000.00	156,690,000.00	(5,000,000.00)	
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			30,895,000.00	25,895,000.00	(5,000,000.00)	
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			171,500,000.00	142,580,000.00	(28,920,000.00)	
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			218,340,000.00	194,340,000.00	(24,000,000.00)	
			9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			170,000,000.00	49,386,000.00	(120,614,000.00)	
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			227,000,000.00	77,000,000.00	(150,000,000.00)	
			3	Perjalanan Dinas			450,000,000.00	230,250,000.00	(219,750,000.00)	
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah						
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			54,000,000.00	0.00	(54,000,000.00)	
	4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
	1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala			1,461,595,000.00	1,461,595,000.00	0.00			
	2	Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah			250,000,000.00	250,000,000.00	0.00			
	3	Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			225,000,000.00	220,000,000.00	(5,000,000.00)			
	4	Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintahan			356,755,000.00	356,755,000.00	0.00			
	5	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas			399,250,000.00	373,250,000.00	(26,000,000.00)			
	6	Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			174,745,000.00	104,745,000.00	(70,000,000.00)			
29	PERENCANAAN	BAPPEDA	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran						
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			310,000,000.00	265,000,000.00	(45,000,000.00)	
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			260,312,000.00	260,312,000.00	0.00	
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			602,668,000.00	602,668,000.00	0.00	
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			120,000,000.00	100,000,000.00	(20,000,000.00)	
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			95,000,000.00	85,000,000.00	(10,000,000.00)	
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			286,500,000.00	536,000,000.00	249,500,000.00	
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			276,720,000.00	691,720,000.00	415,000,000.00	
			10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			199,000,000.00	199,000,000.00	0.00	
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			481,760,000.00	25,000,000.00	(456,760,000.00)	
			3	Perjalanan Dinas			1,000,000,000.00	452,780,000.00	(547,220,000.00)	
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah						
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			20,000,000.00	35,000,000.00	15,000,000.00	
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			355,900,000.00	298,400,000.00	(57,500,000.00)	
			4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan						
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah			928,500,000.00	406,500,000.00	(522,000,000.00)	
			2	Monitoring dan Evaluasi			245,000,000.00	130,000,000.00	(115,000,000.00)	
			3	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur			251,400,000.00	166,400,000.00	(85,000,000.00)	
			4	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi			176,000,000.00	61,000,000.00	(115,000,000.00)	
			5	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			378,075,000.00	223,075,000.00	(155,000,000.00)	
	5	Program Penelitian dan Pengembangan								
	1	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya			588,665,000.00	429,665,000.00	(159,000,000.00)			
	2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			91,500,000.00	46,000,000.00	(45,500,000.00)			

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
30	KEUANGAN	BPKAD	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			29,000,000.00	29,000,000.00	0.00		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			564,710,450.00	477,710,450.00	(87,000,000.00)		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			924,400,000.00	1,019,400,000.00	95,000,000.00		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			759,480,000.00	869,725,694.00	110,245,694.00		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			120,000,000.00	120,000,000.00	0.00		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			45,000,000.00	45,000,000.00	0.00		
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			853,850,000.00	1,304,800,000.00	450,950,000.00		
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			930,060,000.00	595,060,000.00	(335,000,000.00)		
			9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			288,000,000.00	228,000,000.00	(60,000,000.00)		
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya					135,000,000.00	135,000,000.00	0.00
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus					86,250,000.00	106,250,000.00	20,000,000.00
			3	Perjalanan Dinas					600,000,000.00	425,000,000.00	(175,000,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah							
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan					11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
			2	Penyusunan Laporan Keuangan					10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi					70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
			4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah							
			1	Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Regional					267,816,875.00	257,691,069.00	(10,125,806.00)
			2	Penyusunan Ranperda dan Ranperkada APBD					1,706,911,900.00	2,319,811,900.00	612,900,000.00
			3	Penyusunan Ranperda dan Ranperkada Perubahan APBD					230,442,925.00	228,551,902.00	(1,891,023.00)
			4	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah					3,083,886,600.00	3,141,544,100.00	57,657,500.00
			5	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah					295,260,000.00	523,059,500.00	227,799,500.00
			6	Pengelolaan dan Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah					189,050,000.00	189,050,000.00	0.00
			7	Operasional Majelis Pertimbangan TGR					121,362,500.00	118,912,500.00	(2,450,000.00)
			8	Pembinaan Penatausahaan Bendahara					187,644,000.00	175,850,600.00	(11,793,400.00)
		9	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Umum Daerah					82,887,500.00	80,612,500.00	(2,275,000.00)	
		10	Penatausahaan Barang Milik Daerah					314,800,000.00	261,675,000.00	(53,125,000.00)	
		11	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah					197,542,250.00	183,159,000.00	(14,383,250.00)	
		12	Pengamanan Barang Milik Daerah					493,750,000.00	1,121,636,250.00	627,886,250.00	
		13	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					199,500,000.00	174,370,000.00	(25,130,000.00)	
		14	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan					186,066,750.00	182,880,601.00	(3,186,149.00)	
		15	Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD					278,924,350.00	251,239,300.00	(27,685,050.00)	
		16	Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD					105,035,900.00	79,059,326.00	(25,976,574.00)	
				BPPRD	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
					1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			55,395,000.00	55,395,000.00	0.00
					2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			581,400,000.00	496,700,000.00	(84,700,000.00)
					3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			300,300,000.00	246,700,000.00	(53,600,000.00)
					4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			1,166,281,200.00	1,021,903,200.00	(144,378,000.00)
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			641,835,000.00	641,835,000.00	0.00
					6	Penyediaan Makanan dan Minuman			90,000,000.00	65,000,000.00	(25,000,000.00)
					7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			527,033,800.00	446,033,800.00	(81,000,000.00)
					9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			535,720,000.00	377,200,000.00	(158,520,000.00)
					10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
					2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
		1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya				100,150,000.00	0.00	(100,150,000.00)		
		2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus				36,500,000.00	1,500,000.00	(35,000,000.00)		
		3	Perjalanan Dinas				450,000,000.00	165,000,000.00	(285,000,000.00)		
		3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah								
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				33,000,000.00	33,000,000.00	0.00		
		2	Penyusunan Laporan Keuangan				13,650,000.00	7,200,000.00	(6,450,000.00)		
		4	Program peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah								
		1	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah				680,000,000.00	277,000,000.00	(403,000,000.00)		
		2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			1,188,410,000.00	168,000,000.00	(1,020,410,000.00)			
		3	Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah			287,000,000.00	377,000,000.00	90,000,000.00			
		4	Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah			72,250,000.00	72,250,000.00	0.00			
		5	Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah			42,200,000.00	24,700,000.00	(17,500,000.00)			
		6	Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah			986,875,000.00	919,175,000.00	(67,700,000.00)			

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
31	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BKPSMDM	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			37,000,000.00	32,000,000.00	(5,000,000.00)		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			357,000,000.00	337,000,000.00	(20,000,000.00)		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			230,000,000.00	230,000,000.00	0.00		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			623,302,400.00	575,234,400.00	(48,068,000.00)		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			135,300,000.00	126,800,000.00	(8,500,000.00)		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			90,000,000.00	75,000,000.00	(15,000,000.00)		
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			403,354,350.00	350,400,350.00	(52,954,000.00)		
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			586,400,500.00	314,400,500.00	(272,000,000.00)		
			9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			528,000,000.00	282,400,000.00	(245,600,000.00)		
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			53,900,000.00	53,900,000.00	0.00		
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			133,600,000.00	63,600,000.00	(70,000,000.00)		
3	Perjalanan Dinas			893,200,000.00	634,240,000.00	(258,960,000.00)					
32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	DPMPTSP	3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah							
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			30,000,000.00	12,100,000.00	(17,900,000.00)		
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			20,000,000.00	4,250,000.00	(15,750,000.00)		
			4	Program Penataan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur							
			1	Penyusun Kebutuhan dan Seleksi Penerimaan Calon ASN			1,037,400,000.00	781,325,000.00	(256,075,000.00)		
			2	Pembinaan Karir ASN			541,120,000.00	521,120,000.00	(20,000,000.00)		
			3	Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS			48,505,000.00	38,505,000.00	(10,000,000.00)		
			4	Pelayanan Administrasi Pangkat PNS			60,565,500.00	25,795,500.00	(34,770,000.00)		
			5	Pembinaan ASN			379,790,000.00	151,007,500.00	(228,782,500.00)		
			6	Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai			174,035,000.00	27,193,500.00	(146,841,500.00)		
			7	Penegakan Disiplin dan Peningkatan Kinerja ASN			48,185,000.00	48,185,000.00	0.00		
			8	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional			325,960,000.00	262,775,000.00	(63,185,000.00)		
			9	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN			946,010,250.00	660,485,250.00	(285,525,000.00)		
10	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS			342,590,000.00	0.00	(342,590,000.00)					
11	Pendidikan dan Pelatihan Pengkaderan Formal			284,000,000.00	0.00	(284,000,000.00)					
12	Penilaian Kompetensi dan Potensi (Talent pool)			330,000,000.00	330,000,000.00	0.00					
13	Pengembangan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			553,782,000.00	346,247,000.00	(207,535,000.00)					
33	SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	17	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan							
			1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial			267,940,000.00	134,365,000.00	(133,575,000.00)		
			2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan			266,100,000.00	168,100,000.00	(98,000,000.00)		
			3	Pengelolaan Data dan Penataan Arsip Perizinan			48,415,000.00	38,415,000.00	(10,000,000.00)		
4	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan			65,912,000.00	65,912,000.00	0.00					
33	SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			17,000,000.00	12,000,000.00	(5,000,000.00)		
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2,602,000,000.00	2,890,000,000.00	288,000,000.00		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			1,345,800,000.00	1,107,128,000.00	(238,672,000.00)		
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			1,657,614,000.00	1,967,904,000.00	310,290,000.00		
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			145,000,000.00	170,000,000.00	25,000,000.00		
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			2,362,440,000.00	1,963,000,000.00	(399,440,000.00)		
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			1,518,144,475.00	1,942,480,400.00	424,335,925.00		
			8	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			503,997,385.00	637,167,385.00	133,170,000.00		
			9	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			1,976,578,740.00	2,275,578,740.00	299,000,000.00		
			10	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			300,000,000.00	135,000,000.00	(165,000,000.00)		
11	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan/Dinas			170,000,000.00	290,000,000.00	120,000,000.00					
33	SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			234,920,400.00	234,920,400.00	0.00		
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			274,000,000.00	70,257,500.00	(203,742,500.00)		
			3	Perjalanan Dinas			2,441,190,000.00	1,725,018,200.00	(716,171,800.00)		
33	SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah							
			1	Penyusunan Laporan Keuangan			617,010,000.00	385,034,000.00	(231,976,000.00)		
33	SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	4	Program Peningkatan Kerjasama Daerah							
			1	Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri			237,400,000.00	161,400,000.00	(76,000,000.00)		
2	Pemberian Informasi, Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama			250,982,000.00	222,332,000.00	(28,650,000.00)					

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
34	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SETWAN	5	3	Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Dalam Negeri		315,618,000.00	291,618,000.00	(24,000,000.00)			
				1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan Perundang-undangan		560,000,000.00	692,191,000.00	132,191,000.00			
				2	Legislasi rancangan peraturan Perundang-undangan		200,600,000.00	234,140,200.00	33,540,200.00			
				3	Fasilitasi Sosialisasi peraturan Perundang-undangan		307,400,000.00	221,916,000.00	(85,484,000.00)			
				6	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		460,450,000.00	204,950,000.00	(255,500,000.00)			
				1	Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Daerah		1,210,550,000.00	796,875,000.00	(413,675,000.00)			
				2	Pengembangan Data dan Informasi Komunikasi Sosial		4,396,000,000.00	5,146,000,000.00	750,000,000.00			
				3	Publikasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi Daerah							
				7	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan		1	Pelayanan Administrasi Kepala Daerah		479,400,000.00	479,400,000.00	0.00
				2	Pelaksanaan Keprotokolan Kepala Daerah		445,000,000.00	445,000,000.00	0.00			
				3	Fasilitasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah		2,875,600,000.00	1,474,400,000.00	(1,401,200,000.00)			
				4	Pemberdayaan dan Kapasitas Staf Ahli Walikota Jambi		40,805,000.00	35,805,000.00	(5,000,000.00)			
				8	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Bidang Perekonomian		1	Pemantauan dan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, CSR dan BUD		255,000,000.00	216,331,000.00	(38,669,000.00)
				2	Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Ekonomi		261,000,000.00	173,035,000.00	(87,965,000.00)			
				3	Kegiatan Pengendalian Produksi dan Distribusi		266,000,000.00	212,452,500.00	(53,547,500.00)			
				9	Program Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang / Jasa		1	Fasilitasi Evaluasi Pelaporan		96,962,000.00	44,228,000.00	(52,734,000.00)
				2	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		1,624,105,500.00	1,453,606,000.00	(170,499,500.00)			
				3	Pengembangan sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara elektronik (LPSE)		146,152,500.00	109,015,000.00	(37,137,500.00)			
				4	Peningkatan Kapasitas pengelola pengadaan barang / jasa		298,780,000.00	293,180,000.00	(5,600,000.00)			
				10	Program Fasilitas dan Koordinasi Kegiatan dan Kelembagaan Keagamaan		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan		9,361,000,000.00	8,905,910,000.00	(455,090,000.00)
				2	Koordinasi, Fasilitasi, dan Pembinaan Kesejahteraan		200,000,000.00	189,000,000.00	(11,000,000.00)			
				3	Koordinasi, Fasilitasi, dan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga		200,000,000.00	191,000,000.00	(9,000,000.00)			
				11	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumah tanggahan		1	Belanja pemeliharaan kesehatan		17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
				2	Rumah tangga kepala daerah dan Wakil kepala daerah		1,080,000,000.00	1,296,000,000.00	216,000,000.00			
				12	Program Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan		1	Penyusunan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi		242,000,000.00	213,576,000.00	(28,424,000.00)
				2	Peningkatan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik		718,250,000.00	781,625,000.00	63,375,000.00			
				3	Penataan Perangkat Daerah		156,750,000.00	146,750,000.00	(10,000,000.00)			
				13	Program Penataan Administrasi Pemerintahan dan Wilayah		1	pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		500,000,000.00	203,800,000.00	(296,200,000.00)
				2	Fasilitasi dan Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah		460,000,000.00	460,000,000.00	0.00			
				3	Pengadaan Tanah		10,421,000,000.00	7,536,650,000.00	(2,884,350,000.00)			
				4	Fasilitasi percepatan tapal batas wilayah		450,000,000.00	450,000,000.00	0.00			
				1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan		66,000,000.00	76,000,000.00	10,000,000.00
				2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		975,200,000.00	977,200,000.00	2,000,000.00			
				3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset		362,652,000.00	362,652,000.00	0.00			
				4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran		3,441,668,300.00	3,377,498,300.00	(64,170,000.00)			
				5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan		689,500,000.00	794,500,000.00	105,000,000.00			
				6	Penyediaan Makanan dan Minuman		350,000,000.00	315,000,000.00	(35,000,000.00)			
				7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor		3,553,066,000.00	3,098,566,000.00	(454,500,000.00)			
				8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional		887,700,000.00	942,700,000.00	55,000,000.00			
				9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor		1,248,730,000.00	1,228,730,000.00	(20,000,000.00)			
				2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya		194,100,000.00	194,100,000.00	0.00
				2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus		146,000,000.00	146,000,000.00	0.00			
				3	Perjalanan Dinas		3,169,198,700.00	3,169,198,700.00	0.00			
				3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
				2	Penyusunan Laporan Keuangan		5,500,000.00	5,500,000.00	0.00			
				3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi		30,000,000.00	10,000,000.00	(20,000,000.00)			

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
35	KECAMATAN	KECAMATAN Kecamatan Kota Baru	4	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Pelayanan Kedinasan DPRD							
			1	Penyediaan Kebutuhan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Non Rancangan Peraturan Daerah			4,948,500,000.00	2,498,037,000.00	(2,450,463,000.00)		
			2	Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD			2,283,280,000.00	1,335,300,000.00	(947,980,000.00)		
			3	Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD			2,806,800,000.00	2,649,737,000.00	(157,063,000.00)		
			4	Penyediaan Kebutuhan Rapat-rapat Paripurna Istimewa			871,255,000.00	318,690,000.00	(552,565,000.00)		
			5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD			707,250,000.00	530,000,000.00	(177,250,000.00)		
			6	Pelayanan Keprotokolan DPRD			575,000,000.00	322,500,000.00	(252,500,000.00)		
			7	Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan Beserta Perlengkapannya			418,590,000.00	297,800,000.00	(120,790,000.00)		
			8	Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Fungsi Penganggaran			2,842,310,000.00	3,868,290,000.00	1,025,980,000.00		
			9	Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan			13,636,400,000.00	16,313,950,000.00	2,677,550,000.00		
			10	Penyediaan Kebutuhan Reses dan Penerimaan Aspirasi Masyarakat			1,519,800,000.00	1,181,800,000.00	(338,000,000.00)		
			1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran							
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan					11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					210,541,760.00	217,949,260.00	7,407,500.00
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset					315,120,000.00	315,120,000.00	0.00
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran					359,943,800.00	337,504,000.00	(22,439,800.00)
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan					53,000,000.00	53,000,000.00	0.00
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman					60,500,000.00	60,500,000.00	0.00
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor					193,450,000.00	243,644,800.00	50,194,800.00
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional					122,600,000.00	126,600,000.00	4,000,000.00
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya					45,500,000.00	45,500,000.00	0.00
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus					20,000,000.00	12,000,000.00	(8,000,000.00)
			3	Perjalanan Dinas					183,750,000.00	127,750,000.00	(56,000,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah							
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan					10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
			2	Penyusunan Laporan Keuangan					5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi					56,550,000.00	56,550,000.00	0.00
			4	Program Pelayanan Umum Kecamatan							
			1	Peningkatan kualitas pelayanan umum dan penkoordinasian Kecamatan					73,550,000.00	53,200,000.00	(20,350,000.00)
			2	Pembinaan Administrasi Pemerintah umum					66,295,000.00	0.00	(66,295,000.00)
			3	Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan					58,100,000.00	56,850,000.00	(1,250,000.00)
			4	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana					72,812,500.00	44,500,000.00	(28,312,500.00)
			5	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan							
			1	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan					340,255,000.00	250,355,000.00	(89,900,000.00)
			2	Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan					276,146,140.00	231,721,140.00	(44,425,000.00)
			6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sukakarya					299,000,000.00	363,317,893.00	64,317,893.00
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Simpang III Sipin					299,000,000.00	380,011,845.00	81,011,845.00
			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Paal Lima					299,000,000.00	387,954,448.00	88,954,448.00
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kenali Asam Bawah					299,000,000.00	322,862,133.00	23,862,133.00			
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kenali Asam Atas					299,000,000.00	384,635,647.00	85,635,647.00			
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan										
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukakarya					481,287,600.00	465,587,600.00	(15,700,000.00)			
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang III Sipin					735,588,400.00	826,843,400.00	91,255,000.00			
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paal Lima					691,500,200.00	647,400,200.00	(44,100,000.00)			
4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenali Asam Bawah					931,699,600.00	941,399,600.00	9,700,000.00			
5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenali Asam Atas					571,810,000.00	553,910,000.00	(17,900,000.00)			
6	Bangkit Berdaya di Kelurahan Sukakarya					200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)			
7	Bangkit Berdaya di Kelurahan Simpang III Sipin					200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)			
8	Bangkit Berdaya di Kelurahan Paal Lima					200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)			
9	Bangkit Berdaya di Kelurahan Kenali Asam Bawah					200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)			
10	Bangkit Berdaya di Kelurahan Kenali Asam Atas					200,000,000.00	2,100,000.00	(197,900,000.00)			

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Kecamatan Telanaipura	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			6,100,000.00	6,100,000.00	0.00
			2	2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			137,940,000.00	137,940,000.00	0.00
			3	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			328,464,000.00	328,464,000.00	0.00
			4	4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			495,803,600.00	498,303,600.00	2,500,000.00
			5	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			32,279,640.00	30,254,540.00	(2,025,100.00)
			6	6 Penyediaan Makanan dan Minuman			40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
			7	7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			170,550,000.00	181,950,000.00	11,400,000.00
			8	8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			152,350,000.00	122,100,000.00	(30,250,000.00)
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			54,850,000.00	54,850,000.00	0.00
			2	2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
			3	3 Perjalanan Dinas			173,000,000.00	131,100,000.00	(41,900,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			7,000,000.00	10,550,000.00	3,550,000.00
			2	2 Penyusunan Laporan Keuangan			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
			3	3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
			4	Program Pelayanan Umum Kecamatan					
			1	1 Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan			12,000,000.00	8,000,000.00	(4,000,000.00)
			2	2 Pembinaan Administrasi Pemerintah umum			16,000,000.00	3,000,000.00	(13,000,000.00)
			3	3 Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan			23,000,000.00	13,500,000.00	(9,500,000.00)
			4	4 Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana			21,750,000.00	21,750,000.00	0.00
			5	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan					
			1	1 Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan			419,425,000.00	329,325,000.00	(90,100,000.00)
			2	2 Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan			264,590,000.00	159,910,000.00	(104,680,000.00)
			6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			1	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Simpang IV Sipin			296,200,000.00	418,687,080.00	122,487,080.00
			2	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Buluran Kenali			297,383,000.00	428,203,000.00	130,820,000.00
			3	3 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Teluk Kenali			297,000,000.00	482,485,500.00	185,485,500.00
			4	4 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Telanaipura			296,200,000.00	424,093,200.00	127,893,200.00
			5	5 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Penyengat Rendah			296,200,000.00	436,170,000.00	139,970,000.00
			6	6 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pematang Sulur			300,036,000.00	421,093,000.00	121,057,000.00
			7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
			8	8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang IV Sipin			654,158,480.00	493,008,480.00	(161,150,000.00)
			9	9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buluran Kenali			456,040,920.00	329,673,920.00	(126,367,000.00)
			10	10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Kenali			297,268,080.00	165,518,080.00	(131,750,000.00)
			11	11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Telanaipura			401,525,520.00	252,375,520.00	(149,150,000.00)
			12	12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penyengat Rendah			667,460,080.00	598,310,080.00	(69,150,000.00)
			13	13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pematang Sulur			509,825,680.00	402,311,680.00	(107,514,000.00)
			14	14 Bangkit Berdaya di Kelurahan Simpang IV Sipin			196,000,000.00	22,476,500.00	(173,523,500.00)
			15	15 Bangkit Berdaya di Kelurahan Buluran Kenali			133,000,000.00	45,393,500.00	(87,606,500.00)
			16	16 Bangkit Berdaya di Kelurahan Teluk Kenali			90,000,000.00	49,234,000.00	(40,766,000.00)
			17	17 Bangkit Berdaya di Kelurahan Telanaipura			192,000,000.00	83,482,100.00	(108,517,900.00)
			18	18 Bangkit Berdaya di Kelurahan Penyengat Rendah			190,000,000.00	184,250,000.00	(5,750,000.00)
			19	19 Bangkit Berdaya di Kelurahan Pematang Sulur			199,000,000.00	199,000,000.00	0.00
		Kecamatan Jelutung	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			12,450,000.00	12,450,000.00	0.00
			2	2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			134,100,000.00	163,353,000.00	29,253,000.00
			3	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			430,800,000.00	390,072,000.00	(40,728,000.00)
			4	4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			420,541,185.00	382,586,400.00	(37,954,785.00)
			5	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			37,204,375.00	28,415,375.00	(8,789,000.00)
			6	6 Penyediaan Makanan dan Minuman			24,675,000.00	17,775,000.00	(6,900,000.00)
			7	7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			178,400,000.00	178,400,000.00	0.00
			8	8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			106,800,000.00	106,800,000.00	0.00
			9	9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			60,250,000.00	46,750,000.00	(13,500,000.00)
			2	2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			37,000,000.00	26,343,000.00	(10,657,000.00)
			3	3 Perjalanan Dinas			150,000,000.00	78,758,000.00	(71,242,000.00)

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			7,700,000.00	3,000,000.00	(4,700,000.00)
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			3,560,000.00	3,560,000.00	0.00
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			45,635,840.00	24,500,000.00	(21,135,840.00)
			4	Program Pelayanan Umum Kecamatan					
			1	Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan			63,100,000.00	52,200,000.00	(10,900,000.00)
			2	Pembinaan Adminitrasi Pemerintah umum			34,390,000.00	8,450,000.00	(25,940,000.00)
			3	Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan			266,110,400.00	181,919,400.00	(84,191,000.00)
			4	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana			63,475,000.00	15,900,000.00	(47,575,000.00)
			5	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan					
			1	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan			528,155,000.00	158,800,000.00	(369,355,000.00)
			2	Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan			291,850,000.00	192,900,000.00	(98,950,000.00)
			6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Talang Jauh			296,200,000.00	543,128,724.00	246,928,724.00
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Cempaka Putih			296,200,000.00	324,444,328.00	28,244,328.00
			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kebun Handil			296,200,000.00	444,387,321.00	148,187,321.00
			4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Lebak Bandung			296,200,000.00	361,154,921.00	64,954,921.00
			5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Payo Lebar			296,200,000.00	398,233,465.00	102,033,465.00
			6	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jelutung			296,200,000.00	463,335,841.00	167,135,841.00
			7	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Handil Jaya			296,200,000.00	424,828,126.00	128,628,126.00
			7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
			1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talang Jauh			270,474,400.00	183,878,750.00	(86,595,650.00)
			2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cempaka Putih			432,180,400.00	450,927,950.00	18,747,550.00
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebun Handil			495,682,400.00	382,132,400.00	(113,550,000.00)
			4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lebak Bandung			643,916,000.00	640,963,150.00	(2,952,850.00)
			5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Payo Lebar			582,954,800.00	518,570,200.00	(64,384,600.00)
			6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jelutung			794,574,000.00	717,898,050.00	(76,675,950.00)
			7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Handil Jaya			471,621,200.00	398,695,250.00	(72,925,950.00)
			8	Bangkit Berdaya di Kelurahan Talang Jauh			100,000,000.00	50,800,000.00	(49,200,000.00)
			9	Bangkit Berdaya di Kelurahan Cempaka Putih			100,000,000.00	89,800,000.00	(10,200,000.00)
			10	Bangkit Berdaya di Kelurahan Kebun Handil			150,000,000.00	135,520,000.00	(14,480,000.00)
			11	Bangkit Berdaya di Kelurahan Lebak Bandung			150,000,000.00	131,132,000.00	(18,868,000.00)
			12	Bangkit Berdaya di Kelurahan Payo Lebar			150,000,000.00	85,220,600.00	(64,779,400.00)
			13	Bangkit Berdaya di Kelurahan Jelutung			250,000,000.00	146,042,000.00	(103,958,000.00)
			14	Bangkit Berdaya di Kelurahan Handil Jaya			100,000,000.00	96,460,000.00	(3,540,000.00)
		Kecamatan Pasar	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			289,000,000.00	289,000,000.00	0.00
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			283,392,000.00	261,132,000.00	(22,260,000.00)
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			584,083,200.00	567,583,200.00	(16,500,000.00)
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			100,532,160.00	100,532,160.00	0.00
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			279,000,000.00	222,000,000.00	(57,000,000.00)
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			154,400,000.00	140,800,000.00	(13,600,000.00)
			9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			42,000,000.00	42,000,000.00	0.00
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			10,000,000.00	6,000,000.00	(4,000,000.00)
			3	Perjalanan Dinas			150,000,000.00	85,000,000.00	(65,000,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			7,250,000.00	7,250,000.00	0.00
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			16,000,000.00	4,500,000.00	(11,500,000.00)
			4	Program Pelayanan Umum Kecamatan					
			1	Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan			80,200,000.00	46,200,000.00	(34,000,000.00)
			2	Pembinaan Adminitrasi Pemerintah umum			68,874,600.00	33,424,600.00	(35,450,000.00)
			3	Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan			64,054,000.00	29,500,000.00	(34,554,000.00)
			4	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana			57,100,000.00	34,500,000.00	(22,600,000.00)

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
			5	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan					
			1	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan			444,029,400.00	319,529,400.00	(124,500,000.00)
			2	Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan			287,700,000.00	172,700,000.00	(115,000,000.00)
			6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Beringin			296,200,000.00	410,376,675.00	114,176,675.00
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Orang Kayo Hitam			296,200,000.00	407,128,950.00	110,928,950.00
			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pasar Jambi			296,200,000.00	566,193,625.00	269,993,625.00
			4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Asam			296,200,000.00	407,450,825.00	111,250,825.00
			7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
			1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Beringin			371,931,440.00	266,074,140.00	(105,857,300.00)
			2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Orang Kayo Hitam			265,340,880.00	155,807,130.00	(109,533,750.00)
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Jambi			219,290,480.00	109,756,730.00	(109,533,750.00)
			4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Asam			459,021,840.00	349,488,090.00	(109,533,750.00)
			5	Bangkit Berdaya di Kelurahan Beringin			100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
			6	Bangkit Berdaya di Kelurahan Orang Kayo Hitam			70,000,000.00	0.00	(70,000,000.00)
			7	Bangkit Berdaya di Kelurahan Pasar Jambi			30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)
			8	Bangkit Berdaya di Kelurahan Sungai Asam			100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)
		Kecamatan Jambi Selatan	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			10,600,000.00	10,600,000.00	0.00
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			178,000,000.00	178,000,000.00	0.00
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			354,433,200.00	338,032,000.00	(16,401,200.00)
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			299,717,600.00	290,217,600.00	(9,500,000.00)
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pnggandaan			33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			367,288,800.00	448,088,800.00	80,800,000.00
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			143,200,000.00	143,200,000.00	0.00
			9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perengkapannya			120,200,000.00	120,200,000.00	0.00
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
			3	Perjalanan Dinas			183,154,600.00	133,154,600.00	(50,000,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			14,800,000.00	14,800,000.00	0.00
			4	Program Pelayanan Umum Kecamatan					
			1	Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan			119,550,800.00	71,750,800.00	(47,800,000.00)
			2	Pembinaan Adminitrasi Pemerintah umum			9,750,000.00	9,750,000.00	0.00
			3	Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan			55,500,000.00	67,750,000.00	12,250,000.00
			4	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana			65,350,000.00	69,350,000.00	4,000,000.00
			5	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan					
			1	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan			410,770,000.00	350,716,200.00	(60,053,800.00)
			2	Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan			222,550,000.00	159,025,000.00	(63,525,000.00)
			6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pasir Putih			293,840,000.00	345,500,000.00	51,660,000.00
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tambak Sari			296,200,000.00	318,500,000.00	22,300,000.00
			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Thehok			302,500,000.00	343,500,000.00	41,000,000.00
			4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Wijayapura			303,580,000.00	331,000,000.00	27,420,000.00
			5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pakuan Baru			345,958,000.00	308,381,000.00	(37,577,000.00)
			7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
			1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih			605,366,200.00	565,059,200.00	(40,307,000.00)
			2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambak Sari			626,228,600.00	604,967,200.00	(21,261,400.00)
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Thehok			692,051,000.00	643,537,000.00	(48,514,000.00)
			4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wijayapura			449,024,200.00	439,160,700.00	(9,863,500.00)
			5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuan Baru			440,387,000.00	492,928,400.00	52,541,400.00
			6	Bangkit Berdaya di Kelurahan Pasir Putih			300,000,000.00	0.00	(300,000,000.00)
			7	Bangkit Berdaya di Kelurahan Tambak Sari			100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)
			8	Bangkit Berdaya di Kelurahan Thehok			300,000,000.00	0.00	(300,000,000.00)
			9	Bangkit Berdaya di Kelurahan Wijayapura			150,000,000.00	0.00	(150,000,000.00)
			10	Bangkit Berdaya di Kelurahan Pakuan Baru			150,000,000.00	0.00	(150,000,000.00)

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		Kecamatan Jambi Timur	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
			2	2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			184,300,000.00	166,000,000.00	(18,300,000.00)
			3	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			436,360,000.00	436,360,000.00	0.00
			4	4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			769,420,000.00	742,920,000.00	(26,500,000.00)
			5	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			162,300,000.00	140,900,000.00	(21,400,000.00)
			6	6 Penyediaan Makanan dan Minuman			57,585,000.00	43,935,000.00	(13,650,000.00)
			7	7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			149,300,000.00	45,400,000.00	(103,900,000.00)
			8	8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			162,400,000.00	162,400,000.00	0.00
			9	9 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
			10	10 Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan/Dinas			10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	1 Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			87,000,000.00	87,000,000.00	0.00
			2	2 Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			20,000,000.00	11,000,000.00	(9,000,000.00)
			3	3 Perjalanan Dinas			213,392,600.00	152,192,600.00	(61,200,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
			2	2 Penyusunan Laporan Keuangan			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
			3	3 Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			80,000,000.00	4,000,000.00	(76,000,000.00)
			4	Program Pelayanan Umum Kecamatan					
			1	1 Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan			75,000,000.00	53,450,000.00	(21,550,000.00)
			2	2 Pembinaan Adminitrasi Pemerintah umum			61,321,000.00	9,001,000.00	(52,320,000.00)
			3	3 Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan			88,400,000.00	80,800,000.00	(7,600,000.00)
			4	4 Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana			60,100,000.00	58,000,000.00	(2,100,000.00)
			5	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan					
			1	1 Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan			474,100,000.00	302,800,000.00	(171,300,000.00)
			2	2 Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan			229,924,600.00	132,824,600.00	(97,100,000.00)
			6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			1	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sijenjang			329,355,400.00	386,736,625.00	57,381,225.00
			2	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kasang Jaya			292,200,000.00	418,056,000.00	125,856,000.00
			3	3 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Talang Banjar			273,903,400.00	320,920,847.00	47,017,447.00
			4	4 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Budiman			288,819,400.00	342,145,707.00	53,326,307.00
			5	5 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sulanjana			292,200,000.00	379,097,494.00	86,897,494.00
			6	6 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kasang			270,223,400.00	409,450,594.00	139,227,194.00
			7	7 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Sari			310,989,700.00	337,880,000.00	26,890,300.00
			8	8 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Rajawali			292,200,000.00	374,309,437.00	82,109,437.00
			9	9 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Pinang			292,200,000.00	364,229,000.00	72,029,000.00
			7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
			1	1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sijenjang			333,948,600.00	306,754,769.00	(27,193,831.00)
			2	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kasang Jaya			417,906,000.00	314,348,500.00	(103,557,500.00)
			3	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talang Banjar			631,610,600.00	613,654,000.00	(17,956,600.00)
			4	4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budiman			382,988,600.00	358,508,000.00	(24,480,600.00)
			5	5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sulanjana			334,466,400.00	273,694,600.00	(60,771,800.00)
			6	6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kasang			392,061,800.00	309,879,700.00	(82,182,100.00)
			7	7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari			491,120,300.00	497,832,105.00	6,711,805.00
			8	8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rajawali			441,810,000.00	425,635,000.00	(16,175,000.00)
			9	9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinang			601,093,200.00	573,398,200.00	(27,695,000.00)
			10	10 Bangkit Berdaya di Kelurahan Sijenjang			180,000,000.00	30,000,000.00	(150,000,000.00)
			11	11 Bangkit Berdaya di Kelurahan Kasang Jaya			120,000,000.00	20,000,000.00	(100,000,000.00)
			12	12 Bangkit Berdaya di Kelurahan Talang Banjar			200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
			13	13 Bangkit Berdaya di Kelurahan Budiman			80,000,000.00	15,000,000.00	(65,000,000.00)
			14	14 Bangkit Berdaya di Kelurahan Sulanjana			80,000,000.00	15,000,000.00	(65,000,000.00)
			15	15 Bangkit Berdaya di Kelurahan Kasang			80,000,000.00	15,000,000.00	(65,000,000.00)
			16	16 Bangkit Berdaya di Kelurahan Tanjung Sari			80,000,000.00	15,000,000.00	(65,000,000.00)
			17	17 Bangkit Berdaya di Kelurahan Rajawali			80,000,000.00	15,000,000.00	(65,000,000.00)
			18	18 Bangkit Berdaya di Kelurahan Tanjung Pinang			100,000,000.00	20,000,000.00	(80,000,000.00)
		Kecamatan Danau Teluk	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
			2	2 Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
			3	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			301,680,000.00	301,680,000.00	0.00

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				4 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			334,279,200.00	342,495,200.00	8,216,000.00
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
				7 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			91,000,000.00	38,162,500.00	(52,837,500.00)
				8 Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			139,000,000.00	139,000,000.00	0.00
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			20,000,000.00	38,400,000.00	18,400,000.00
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			3,000,000.00	11,900,000.00	8,900,000.00
			3	Perjalanan Dinas			80,000,000.00	56,000,000.00	(24,000,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
			4	Program Pelayanan Umum Kecamatan					
			1	Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan			61,300,800.00	36,500,800.00	(24,800,000.00)
			2	Pembinaan Administrasi Pemerintah umum			30,620,000.00	18,870,000.00	(11,750,000.00)
			3	Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan			77,620,000.00	77,620,000.00	0.00
			4	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana			25,600,000.00	5,000,000.00	(20,600,000.00)
			5	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan					
			1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan			787,697,400.00	406,597,400.00	(381,100,000.00)
			2	Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan			280,545,000.00	138,145,000.00	(142,400,000.00)
			6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pasir Panjang			282,046,600.00	480,511,000.00	198,464,400.00
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Raden			250,650,000.00	472,880,909.00	222,230,909.00
			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Olak Kemang			270,063,000.00	683,637,800.00	413,574,800.00
			4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Pasir			293,996,600.00	643,201,000.00	349,204,400.00
			5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Ulu Gedong			295,096,600.00	512,230,000.00	217,133,400.00
			7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
			1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang			287,663,800.00	159,672,400.00	(127,991,400.00)
			2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Raden			381,662,000.00	222,054,000.00	(159,608,000.00)
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Olak Kemang			415,240,200.00	276,165,200.00	(139,075,000.00)
			4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pasir			279,313,800.00	165,422,400.00	(113,891,400.00)
			5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong			393,925,000.00	278,883,600.00	(115,041,400.00)
			6	Bangkit Berdaya di Kelurahan Pasir Panjang			120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)
			7	Bangkit Berdaya di Kelurahan Tanjung Raden			120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
			8	Bangkit Berdaya di Kelurahan Olak Kemang			120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)
			9	Bangkit Berdaya di Kelurahan Tanjung Pasir			120,000,000.00	112,500,000.00	(7,500,000.00)
			10	Bangkit Berdaya di Kelurahan Ulu Gedong			120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)
		Kecamatan Pelayangan	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			5,000,000.00	4,500,000.00	(500,000.00)
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			170,000,000.00	168,160,000.00	(1,840,000.00)
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			309,900,000.00	309,210,000.00	(690,000.00)
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			249,594,100.00	230,643,600.00	(18,950,500.00)
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			74,217,500.00	66,795,750.00	(7,421,750.00)
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			40,000,000.00	36,000,000.00	(4,000,000.00)
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			272,300,000.00	269,920,000.00	(2,380,000.00)
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			151,600,000.00	151,600,000.00	0.00
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			44,000,000.00	44,000,000.00	0.00
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			50,000,000.00	45,000,000.00	(5,000,000.00)
			3	Perjalanan Dinas			175,000,000.00	124,525,000.00	(50,475,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			5,500,000.00	4,950,000.00	(550,000.00)
			4	Program Pelayanan Umum Kecamatan					
			1	Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan			30,095,000.00	28,180,000.00	(1,915,000.00)
			2	Pembinaan Administrasi Pemerintah umum			12,900,000.00	12,220,000.00	(680,000.00)
			3	Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan			117,825,000.00	113,950,000.00	(3,875,000.00)
			4	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana			10,000,000.00	9,150,000.00	(850,000.00)

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
			5	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan					
			1	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan			611,955,000.00	373,409,500.00	(238,545,500.00)
			2	Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan			245,125,000.00	231,975,000.00	(13,150,000.00)
			6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Arab Melayu			296,200,000.00	493,194,000.00	196,994,000.00
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mudung Laut			296,200,000.00	407,000,000.00	110,800,000.00
			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jelmu			296,200,000.00	447,062,514.00	150,862,514.00
			4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tengah			296,200,000.00	440,284,810.00	144,084,810.00
			5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tahtul Yaman			296,200,000.00	407,000,000.00	110,800,000.00
			6	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Johor			296,200,000.00	472,262,500.00	176,062,500.00
			7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
			1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arab Melayu			399,944,800.00	324,331,200.00	(75,613,600.00)
			2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mudung Laut			331,183,600.00	201,613,600.00	(129,570,000.00)
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jelmu			249,461,200.00	135,612,600.00	(113,848,600.00)
			4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tengah			254,781,600.00	124,116,475.00	(130,665,125.00)
			5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahtul Yaman			399,044,800.00	283,474,800.00	(115,570,000.00)
			6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Johor			340,872,400.00	227,636,400.00	(113,236,000.00)
			7	Bangkit Berdaya di Kelurahan Arab Melayu			156,000,000.00	0.00	(156,000,000.00)
			8	Bangkit Berdaya di Kelurahan Mudung Laut			117,000,000.00	0.00	(117,000,000.00)
			9	Bangkit Berdaya di Kelurahan Jelmu			39,000,000.00	0.00	(39,000,000.00)
			10	Bangkit Berdaya di Kelurahan Tengah			52,000,000.00	0.00	(52,000,000.00)
			11	Bangkit Berdaya di Kelurahan Tahtul Yaman			158,000,000.00	0.00	(158,000,000.00)
			12	Bangkit Berdaya di Kelurahan Tanjung Johor			78,000,000.00	0.00	(78,000,000.00)
		Kecamatan Alam Barajo	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			230,000,000.00	230,000,000.00	0.00
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			327,920,000.00	327,920,000.00	0.00
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			503,540,800.00	488,540,800.00	(15,000,000.00)
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			290,500,000.00	290,500,000.00	0.00
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			133,000,000.00	133,000,000.00	0.00
			9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			69,000,000.00	69,000,000.00	0.00
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)
			3	Perjalanan Dinas			170,000,000.00	106,268,890.00	(63,731,110.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			7,250,000.00	7,250,000.00	0.00
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			13,650,000.00	13,650,000.00	0.00
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
			4	Program Pelayanan Umum Kecamatan					
			1	Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan			100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
			2	Pembinaan Adminitrasi Pemerintah umum			60,000,000.00	52,500,000.00	(7,500,000.00)
			3	Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
			4	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana			100,000,000.00	51,850,000.00	(48,150,000.00)
			5	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan					
			1	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan			702,345,700.00	497,870,700.00	(204,475,000.00)
			2	Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan			330,172,000.00	314,172,000.00	(16,000,000.00)
			6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kenali Besar			295,200,000.00	334,540,080.00	39,340,080.00
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Rawasari			295,200,000.00	335,108,360.00	39,908,360.00
			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mayang Mangurai			295,200,000.00	327,203,545.00	32,003,545.00
			4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Baqan Pete			295,200,000.00	343,842,550.00	48,642,550.00
			5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Beliong			295,200,000.00	422,020,350.00	126,820,350.00
			7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
			1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenali Besar			990,148,700.00	974,463,700.00	(15,685,000.00)
			2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rawasari			548,812,300.00	508,979,800.00	(39,832,500.00)
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mayang Mangurai			761,599,100.00	730,814,100.00	(30,785,000.00)
			4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baqan Pete			647,855,100.00	638,337,365.00	(9,517,735.00)

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Beliang		404,206,300.00	353,672,300.00	(50,534,000.00)
				6	Bangkit Berdaya di Kelurahan Kenali Besar		250,000,000.00	0.00	(250,000,000.00)
				7	Bangkit Berdaya di Kelurahan Rawasari		150,000,000.00	0.00	(150,000,000.00)
				8	Bangkit Berdaya di Kelurahan Mayang Mangurai		250,000,000.00	199,136,110.00	(50,863,890.00)
				9	Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete		250,000,000.00	0.00	(250,000,000.00)
				10	Bangkit Berdaya di Kelurahan Beliang		100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)
		Kecamatan Danau Sipin	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			10,800,000.00	10,800,000.00	0.00
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			155,300,000.00	155,300,000.00	0.00
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			348,824,000.00	348,824,000.00	0.00
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			522,798,000.00	505,798,000.00	(17,000,000.00)
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			137,880,358.00	178,980,358.00	41,100,000.00
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			130,200,000.00	130,200,000.00	0.00
			9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			77,000,000.00	77,000,000.00	0.00
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			15,000,000.00	6,000,000.00	(9,000,000.00)
			3	Perjalanan Dinas			142,900,000.00	102,100,000.00	(40,800,000.00)
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			33,938,000.00	27,938,000.00	(6,000,000.00)
			4	Program Pelayanan Umum Kecamatan					
			1	Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan			64,688,000.00	55,688,000.00	(9,000,000.00)
			2	Pembinaan Administrasi Pemerintah umum			62,200,000.00	25,900,000.00	(36,300,000.00)
			3	Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan			85,570,000.00	84,970,000.00	(600,000.00)
			4	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana			69,830,000.00	68,680,000.00	(1,150,000.00)
			5	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan					
			1	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan			540,700,000.00	375,850,000.00	(164,850,000.00)
			2	Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan			268,561,642.00	217,286,642.00	(51,275,000.00)
			6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Putri			296,200,000.00	477,069,650.00	180,869,650.00
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Murni			296,200,000.00	495,403,444.00	199,203,444.00
			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Legok			296,200,000.00	429,387,747.00	133,187,747.00
			4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Selamat			296,200,000.00	446,049,146.00	149,849,146.00
			5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Solok Sipin			296,200,000.00	435,299,600.00	139,099,600.00
			7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
			1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Putri			517,092,200.00	400,391,225.00	(116,700,975.00)
			2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Murni			431,169,800.00	314,968,550.00	(116,201,250.00)
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Legok			743,218,600.00	630,063,600.00	(113,155,000.00)
			4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Selamat			563,835,600.00	452,340,496.00	(111,495,104.00)
			5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Solok Sipin			594,993,800.00	479,819,800.00	(115,174,000.00)
			6	Bangkit Berdaya di Kelurahan Sungai Putri			200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
			7	Bangkit Berdaya di Kelurahan Murni			200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)
			8	Bangkit Berdaya di Kelurahan Legok			200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)
			9	Bangkit Berdaya di Kelurahan Selamat			200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)
			10	Bangkit Berdaya di Kelurahan Solok Sipin			200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)
		Kecamatan Paal Merah	1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
			2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			152,296,000.00	143,150,500.00	(9,145,500.00)
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			303,956,000.00	303,956,000.00	0.00
			4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran			436,360,800.00	422,860,800.00	(13,500,000.00)
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			39,500,000.00	39,500,000.00	0.00
			6	Penyediaan Makanan dan Minuman			52,000,000.00	52,000,000.00	0.00
			7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			244,000,000.00	244,000,000.00	0.00
			8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			153,800,000.00	153,800,000.00	0.00
			9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00

NO.	URUSAN	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PAGU 2020	RENCANA PERUBAHAN PAGU 2020	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
			2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
			1	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya			65,500,000.00	65,500,000.00	0.00	
			2	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus			10,000,000.00	6,000,000.00	(4,000,000.00)	
			3	Perjalanan Dinas			160,000,000.00	82,000,000.00	(78,000,000.00)	
			3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah						
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			8,480,000.00	8,480,000.00	0.00	
			2	Penyusunan Laporan Keuangan			5,530,000.00	5,530,000.00	0.00	
			3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi			4,494,000.00	4,494,000.00	0.00	
			4	Program Pelayanan Umum Kecamatan						
			1	Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan			21,900,000.00	21,900,000.00	0.00	
			2	Pembinaan Administrasi Pemerintah umum			23,800,000.00	1,000,000.00	(22,800,000.00)	
			3	Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan			35,686,500.00	19,018,000.00	(16,668,500.00)	
			4	Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana			75,675,000.00	61,425,000.00	(14,250,000.00)	
			5	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan						
			1	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan			1,113,958,000.00	909,708,000.00	(204,250,000.00)	
			2	Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan			183,617,700.00	148,480,000.00	(35,137,700.00)	
			6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
			1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Talang Bakung			218,250,000.00	356,002,432.00	137,752,432.00	
			2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Payo Selincah			299,000,000.00	413,600,500.00	114,600,500.00	
			3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Eka Jaya			299,000,000.00	453,342,000.00	154,342,000.00	
			4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Lingkar Selatan			301,888,000.00	375,192,000.00	73,304,000.00	
			5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Paal Merah			315,200,000.00	349,541,300.00	34,341,300.00	
			7	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						
			1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talang Bakung			826,018,400.00	688,733,600.00	(137,284,800.00)	
			2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Payo Selincah			661,984,800.00	601,421,200.00	(60,563,600.00)	
			3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Eka Jaya			935,694,800.00	883,770,600.00	(51,924,200.00)	
			4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lingkar Selatan			818,904,800.00	751,779,860.00	(67,124,940.00)	
			5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paal Merah			572,505,200.00	568,838,600.00	(3,666,600.00)	
			6	Bangkit Berdaya di Kelurahan Talang Bakung			200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	
			7	Bangkit Berdaya di Kelurahan Payo Selincah			200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	
			8	Bangkit Berdaya di Kelurahan Eka Jaya			200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	
			9	Bangkit Berdaya di Kelurahan Lingkar Selatan			200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	
			10	Bangkit Berdaya di Kelurahan Paal Merah			200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	
			TOTAL					1,458,798,632,000.00	1,035,154,595,326.00	(423,636,956,674.00)